

Madaniyah

Terciptanya Insan Akademis, Berkualitas, dan Berakhlak Mulia

**Pengembangan Soal Fisika SMA/MA Politomus
Berkbasis Taksonomi Bloom Revisi**
Sarjono

Reformasi Pendidikan Perspektif Al-Qur'an dan Hadits
Yuliana Habibi

Layanan Bimbingan dan Konseling Islami melalui Teknik Modelling
Ismah

Pembelajaran IPA-Fisika Berbasis *Problem Solving*
Indah Sukmawati

Model Pembelajaran Responsif Gender di STIT Pemalang
Amirul Bakhri, Srifariyati, Purnama Rozak

Pendidikan dalam Perspektif Hukum: Antara Harapan dan Realitas
Muntoha

Membongkar Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih
Nisrokha

Kompetensi Pedagogik Guru dan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Abdul Kosim, Muhamad Rifa'i Subhi

Peran Strategis Guru dalam MEA
Puji Dwi Darmoko

Alamat Redaksi

Jl. D.I. Panjaitan Km 3 Paduraksa Pemalang
Telp. (0284) 323741 Kode Pos 52319
E-mail : pujimoko@ymail.com
Penerbit : STIT Press

Jurnal Ilmiah

ISSN: 2086-3462
Vol. 1 Edisi X, Januari 2016

Madaniyah

Terciptanya Insan Akademis, Berkualitas, dan Berakhlak Mulia

**Pengembangan Soal Fisika SMA/MA Politomus
Berkbasis Taksonomi Bloom Revisi**
Sarjono

Reformasi Pendidikan Perspektif Al-Qur'an dan Hadits
Yuliana Habibi

Layanan Bimbingan dan Konseling Islami melalui Teknik Modelling
Ismah

Pembelajaran IPA-Fisika Berbasis *Problem Solving*
Indah Sukmawati

Model Pembelajaran Responsif Gender di STIT Pemalang
Amirul Bakhri, Srifariyati, Purnama Rozak

Pendidikan dalam Perspektif Hukum: Antara Harapan dan Realitas
Muntoha

Membongkar Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih
Nisrokha

Kompetensi Pedagogik Guru dan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Abdul Kosim, Muhamad Rifa'i Subhi

Peran Strategis Guru dalam MEA
Puji Dwi Darmoko

Alamat Redaksi

Jl. D.I. Panjaitan Km 3 Paduraksa Pemalang
Telp. (0284) 323741 Kode Pos 52319
E-mail : pujimoko@ymail.com
Penerbit : STIT Press

Jurnal Ilmiah

ISSN: 2086-3462
Vol. 1 Edisi X, Januari 2016

Madaniyah

Terciptanya Insan Akademis, Berkualitas, dan Berakhlak Mulia

Visi

Sebagai sarana Komunikasi dan Publikasi
Karya Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Ke-Islaman

Misi

1. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang pendidikan melalui penelitian dan pengabdian yang mengacu pada Pola Induk Pengembangan Ilmiah (PIP) STIT Pemalang
2. Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengabdian di bidang Pendidikan Islam melalui publikasi jurnal ilmiah dan pertemuan-pertemuan ilmiah
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi pada pengembangan Pendidikan Islam

Pimpinan Redaksi
Puji Dwi Darmoko

Sekretaris Redaksi
Khaerudin

Penyunting
Mustofa Kamal
Muhamad Rifa'i Subhi

Desain Grafis
Sabar Muslim

Sirkulasi
Krisdian Linanti

Alamat Redaksi

Jl. D.I. Panjaitan Km 3 Paduraksa Pemalang
Telp. (0284) 323741 Kode Pos 52319
E-mail : pujimoko@ymail.com
Penerbit : STIT Press

SALAM REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, kali ini Jurnal Ilmiah “MADANIYAH” STIT Pemalang meski tertatih tetap mencoba konsisten hadir tiap edisinya.

Terasa sulit memang mengelola jurnal berkala agar tetap konsisten terbit sesuai agena, rentang waktu 6 bulan. Waktupun terasa begitu cepat saat harus berburu artikel ataupun hasil penelitian. Namun, Jurnal Madaniyah volume 1 edisi X bulan Januari 2016, dapat terbit.

Diharapkan melalui berbagai hasil penelitian dan pemikiran dalam jurnal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana suatu idealisme membangun Dunia Pendidikan tidak hanya dari perspektif Islam melainkan dari berbagai aspek. Selamat membaca...!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemalang, Januari 2016

Redaksi

DAFTAR ISI

Salam Redaksi	iii
Daftar Isi	v
Pengembangan Soal Fisika SMA/MA Politomus Berbasis Taksonomi Bloom Revisi	
Sarjono.....	1
Reformasi Pendidikan Perspektif Al-Qur'an dan Hadits	
Yuliana Habibi.....	17
Layanan Bimbingan dan Konseling Islami melalui Teknik Modelling	
Ismah	34
Pembelajaran IPA-Fisika Berbasis <i>Problem Solving</i>	
Indah Sukmawati	56
Model Pembelajaran Responsif Gender di STIT Pernalang	
Amirul Bakhri, Srifariyati, Purnama Rozak	69
Pendidikan dalam Perspektif Hukum: Antara Harapan dan Realitas	
Muntoha.....	90
Membongkar Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih	
Nisrokha	108
Kompetensi Pedagogik Guru dan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	
Abdul Kosim, Muhamad Rifa'i Subhi.....	124
Peran Strategis Guru dalam MEA	
Puji Dwi Darmoko.....	143

PENGEMBANGAN SOAL FISIKA SMA/MA POLITOMUS BERBASIS TAKSONOMI BLOOM REVISI

Sarjono¹

sarjono_mpd@yahoo.com

Abstrak

Tujuan pendidikan Indonesia sangat kompleks, tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi menjadikan masyarakat yang cerdas, makmur dan berakhlak mulia. Pendidikan merupakan ujung tombak suatu kehidupan seseorang dan tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Mutu pendidikan juga merupakan salah satu indikator keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Banyak upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tersebut belum mencapai hasil seperti yang di harapkan. Taksonomi Bloom pada ranah kognisi direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, dalam revisinya Anderson dan Krathwohl membagi kognisi menjadi dua dimensi yang berbeda, yaitu *knowledge dimension* dan *cognitive process dimension*. Pada umumnya perkembangan tersebut belum diterapkan di sekolah. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Kesimpulan bahwa: 1) perlu dikembangkan soal prestasi belajar fisika yang kisi-kisinya mengacu pada taksonomi Bloom revisi, 2) perlu dikembangkan soal prestasi belajar fisika bentuk uraian, 3) perlu dikembangkan pedoman penskoran, 4) soal bentuk uraian lebih akurat dibanding dengan soal bentuk pilihan ganda, 5) soal bentuk uraian lebih adil terhadap siswa, 6) soal bentuk uraian lebih detail mengungkap kemampuan siswa.

Kata kunci: Politomus, Taksonomi Bloom revisi

A. PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi

¹ MAN Pemalang

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.² Jadi tujuan pendidikan Indonesia sangat kompleks, tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi menjadikan masyarakat yang cerdas, makmur dan berakhlak mulia. Pendidikan merupakan ujung tombak suatu kehidupan seseorang dan tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Mutu pendidikan juga merupakan salah satu indikator keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan sangat penting, sebab kualitas pendidikan seseorang sangat menentukan posisinya dalam tata pergaulan di masyarakat, dan lebih luas lagi kualitas pendidikan suatu negara dapat menentukan posisinya di kancah dunia. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan pada suatu negara dapat dilihat dari berbagai *assessment*, baik tingkat Asia maupun tingkat International.

Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tersebut belum mencapai hasil seperti yang di harapkan. Jika kita perhatikan proses pembelajaran baik teori maupun praktikum serta system penilaian hasil belajar yang ada di lapangan, setidaknya kita mengetahui dan memahami betapa pentingnya suatu penilaian dalam dunia pendidikan, dari berbagai factor pendidikan yang diupayakan oleh pemerintah tersebut, factor penilaian belum diupayakan secara maksimal. Menurut Mardapi, penilaian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan, dalam pendidikan diperlukan perbaikan sistem penilaian yang akan mendorong guru dalam menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik.³ Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat bahwa penilaian merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan.

Pelajaran Fisika memberikan bekal ilmu kepada peserta didik, sebagai sarana untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang berguna untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi,

² Depdikbud, *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.*, 2013, hlm. 4.

³ Djemari Mardapi. *Pengukuran Penilaian dan Evaluasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, Cetakan I, 2012), hlm., 11-12.

juga berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Hal ini senada dengan Fahim & Pazeshki yang menyatakan bahwa berpikir kritis dapat digunakan dalam berbagai bidang studi.⁴ Oleh karena itu sangat perlu siswa untuk dilatih berpikir kritis, hal ini merupakan jembatan antara permasalahan di kelas dengan permasalahan yang ada di dunia nyata.

Model penskoran dikotomus (banar–salah) tidak dapat digunakan untuk menemukan kesalahan yang dilakukan oleh siswa secara detail, karena semua siswa yang salah akan diberi skor 0, sedangkan pada kenyataannya, kesalahan yang dilakukan oleh siswa mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penskoran secara politomus. Diantara sejumlah model penskoran politomus, *Partial Credit Model (PCM)* memiliki karakteristik penskoran yang sesuai dengan permasalahan bidang fisika.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka kiranya perlu dikembangkan soal ujian akhir semester politomus pelajaran fisika SMA/MA.

B. KAJIAN TEORI

1. Karakteristik Fisika

Materi fisika bersumber dari gejala alam yang sangat kompleks dan merupakan masalah yang sangat esensial, oleh karena itu dalam penyelesaian masalah fisika diperlukan kemampuan berpikir kritis peserta didik, dengan kata lain keterampilan berpikir kritis sangat diperlukan dalam mempelajari fisika. Hal ini senada dengan Sears & Zemansky yang menyatakan bahwa fisika merupakan ilmu yang bersifat empiris, artinya setiap hal yang dipelajari dalam fisika didasarkan pada

⁴ Fahim, M & Pazeshki, M. *Manipulating Critical Thinking Skills in Test Taking*, (International Journal of Education, Vol. 4, (1), p 1948-5476, 2012), Hlm., 154.

hasil pengamatan tentang peristiwa alam dan gejala-gejalanya, sehingga dalam mempelajarinya diperlukannya logika dan pola pikir yang cermat dan kritis.⁵

Fenomena-fenomena yang terjadi di jagad raya ini biasanya mempunyai besaran-besaran fisis, yaitu sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, selain dapat dinyatakan dengan angka besaran tersebut juga mempunyai satuan, bahkan satu besaran dapat mempunyai satuan lebih dari satu, besaran-besaran inilah yang kemudian dipelajari. Druxes dalam bukunya yang berjudul *Kompendium Didaktik Fisika* telah banyak memuat pengertian fisika yang dikemukakan oleh para ahli, dua diantaranya adalah Brockhaus, yang menyatakan bahwa fisika adalah pelajaran tentang kejadian alam, yang memungkinkan penelitian dengan percobaan, pengukuran apa yang didapat, penyajian secara matematis, dan berdasarkan peraturan-peraturan umum.⁶

Lebih lanjut Gerthsen menyatakan bahwa fisika adalah suatu teori yang menerangkan tentang gejala-gejala alam sesederhana mungkin dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataan-kenyataan, persyaratan untuk pemecahan masalahnya yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala alam tersebut.

2. Taksonomi Bloom Revisi

Pada perkembangannya, taksonomi Bloom pada ranah kognisi direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, dalam revisinya Anderson dan Krathwohl membagi kognisi menjadi dua dimensi yang berbeda, yaitu *knowledge dimension* dan *cognitive process dimension*.⁷ Pada dimensi

⁵ Sears & Zemansky. *Fisika Universitas Jilid 1*. (Jakarta: Erlangga, 1993). Hlm., 1.

⁶ Druxes, H et al.. *Kompedium Diktaktik Fisika*, (Bandung: CV Remaja Karya, 1986), hlm., 3-4

⁷ Anderson, Lorin W., David RR. Krathwohl, et. al. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York : Longman, 2001), hlm., 213.

pengetahuan, diklasifikasikan menjadi empat tingkatan mulai dari pengetahuan konkrit ke pengetahuan abstrak, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan meta kognitif.

Sedangkan pada dimensi proses kognitif, diklasifikasikan menjadi enam tingkatan dari *low order thinking* sampai *high order thinking*, yang tabelnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Taksonomi Bloom Revisi⁸

Dimensi Pengetahuan	Dimensi Proses Kognitif					
	Mengingat	Memahami	Mengaplikasikan	Menganalisis	Mengevaluasi	Menciptakan
Faktual						
Konseptual						
Prosedural						
Metakognitif						

Berdasarkan diatas terlihat bahwa pada taksonomi Bloom revisi menggunakan kata kerja. Dalam taksonomi Bloom lama untuk aspek kognitif hanya terdiri dari satu dimensi, sedangkan dalam taksonomi Bloom revisi (taksonomi Anderson & Krathwohl) menjadi dua dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Setiap dimensi proses kognitif mengandung empat macam dimensi pengetahuan, yaitu 1) dimensi pengetahuan faktual, 2) dimensi pengetahuan konseptual, 3)

⁸ Lorin W. Anderson and David R. Krathwohl, 2001: 92

dimensi pengetahuan procedural dan 4) dimensi pengetahuan meta-kognitif.⁹

1) Pengetahuan faktual (*Factual Knowledge*)

Pengetahuan berbentuk fakta, seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh nama-nama sebuah benda, nama alat ukur, nama alat dan bahan percobaan, nomor atom, angka, jumlah zat, massa benda, volume benda, bentuk benda, nama planet, nama seorang ahli fisika dan lain-lain, misalnya nomor massa atom Helium 4, nomor atomnya 2, termometer alat untuk mengukur besarnya suhu, luas lingkaran dirumuskan πr^2 , percepatan gravitasi bumi di atas permukaan air laut sekitar $9,8 \text{ m/s}^2$, dan sebagainya.

2) Pengetahuan konseptual (*Conceptual Knowledge*)

Pengetahuan yang berbentuk konsep, hukum, kaidah, teori, definisi, prinsip, postulat atau sejenisnya. Contoh definisi massa jenis, definisi hukum Newton, definisi hukum Ohm, definisi hukum Pascal, prinsip kerja GGL induksi, larangan Pauli, efek Zeman normal, model atom, teori relativitas Einstein dan sejenisnya.

3) Pengetahuan prosedural (*Procedural Knowledge*)

Pengetahuan yang berbentuk cara melakukan sesuatu. Contoh: prosedur penggunaan suatu alat ukur (neraca, jangka sorong, mikroskop dll), prosedur melakukan percobaan atau langkah-langkah percobaan, prosedur membuat kumparan, prosedur membuat teropong sederhana.

4) Pengetahuan metakognisi (*Meta-cognition Knowledge*)

Pengetahuan mengenai proses kognisi dalam strategi penerapan beberapa pengetahuan atau beberapa teori dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik. Contoh, membandingkan atau mengevaluasi beberapa hasil temuan atau artikel mengenai suatu hal dari beberapa sumber pada permasalahan yang sama.

⁹ *Ibid*, hlm 214.

3. Pedoman Penilaian

Menurut Allen dan Yen *measurement is the assigning of numbers to individual in a systematic way as a means of representing properties of the individual*.¹⁰ Selanjutnya menurut Mardapi setiap pengukuran selalu mengandung kesalahan, diantaranya dari pihak yang mengukur, untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan rubric atau pedoman penskoran dan penilaian agar lebih obyektif.¹¹

Menurut Andrade rubrik adalah alat scoring yang berisi daftar kriteria untuk sebuah kinerja, yang mengartikulasikan gradasi kualitas untuk setiap kriteria, dari yang jelek sampai sangat baik. Lebih lanjut Andrade menyatakan bahwa rubrik diperlukan oleh guru dan siswa karena berbagai alasan, antara lain:

- a. Rubrik dapat meningkatkan kinerja siswa, memonitor siswa, dengan membuat ekspektasi, hasilnya sering ditandai dengan peningkatan kualitas siswa dalam kinerja dan belajar.
- b. Ketika rubrik digunakan untuk memandu diri dan peer-assessment, siswa menjadi semakin mampu untuk menemukan dan memecahkan masalah dalam diri mereka sendiri dan kinerja orang lain.
- c. Rubrik memberikan siswa umpan balik yang lebih informatif tentang kemampuan dan kekurangannya sehingga mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki.
- d. Rubrik memungkinkan mengakomodasi kelas heterogen, misalnya rubric yang memiliki tiga atau empat gradasi atau kriteria. Jadi rubrik berisi mengenai gradasi mutu atau kualitas kinerja siswa mulai dari kinerja yang paling rendah hingga kinerja yang paling tinggi, setiap tingkatan kualitas atau gradasi kualitas disertai dengan skor yang dilengkapi dengan deskripsi kinerja siswa pada masing-masing tingkatan kualitas tersebut.¹²

¹⁰ Allen, M.J & Yen, W.M. (1979). *Introduction Measurment Theory*. (Brooks Cole. Pablising Company.1979), hlm. 2.

¹¹ Djemari Mardapi. *Op. Cit.*, hlm. 181

¹² Andrade, H & Du, Y. *Practical Assessment, Research & Evaluation*, (A peer-reviewed electronic journal, Volume 10 Number 3, Practical Assessment Research & Evaluation, Vol 10, No 3, 2005), hlm. 13.

4. Teori tes klasik

Teori tes klasik banyak orang yang menyebutnya sebagai *true score theory*, yaitu teori dasar dalam psikometri yang digunakan untuk memprediksi suatu tes terkait dengan tingkat kesulitasn butir soal dan kemampuan peserta tes. Kata klasik digunakan setelah muncul teori yang lebih modern yaitu teori respon butir (*item response theory*). Tanpa mengabaikan asumsi-asumsi yang ada pada teori tes klasik, teori tes klasik mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya mudah dipahami, baik dalam pengoperasiannya, maupun dalam penerapannya, 2) sudah lama dikenal dikalangan pendidik, maka terori tes ini cukup familier, 3) sangat berguna dalam mendeskripsikan kesalahan-kesalahan dalam pengukuran yang mempengaruhi skor amatan. Pada teori tes klasik terdapat beberapa parameter, diantaranya daya beda (a), indeks kesukaran (b), efektivitas distraktor, reliabilitas dan validitas.

Pada teori tes klasik ini, parameter-parameter tersebut karakteristiknya tergantung pada kemampuan kelompok sampel yang digunakan, kemampuan kelompok sampel bisa bersifat heterogen maupun bersifat homogeny. Ketergantungan pada kelompok subjek inilah yang merupakan salah satu kelemahan dari teori tes klasik, sehingga akan mengurangi manfaat atau keakuratan dalam mengestimasi parameter item dalam berbagai pengukuran. Dalam rangka mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada teori tes klasik tersebut, lahirlah suatu teori tes baru yang bernama *item response theory (IRT)* yang selanjutnya lebih dikenal dengan teori tes modern.

5. Teori Tes Modern

Teori Tes Modern muncul untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada Teori Tes Klasik , Teori Tes Modern disebut juga dengan *Latent-Trait Theory* karena teori ini berasumsi bahwa keberhasilan seorang peserta tes dalam mengerjakan/menjawab soal, atau dalam menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan, atau memecahkan suatu

permasalahan dapat diprediksi dari kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, Teori Tes modern juga sering disebut dengan *Item Response Theory*, artinya respon subjek terhadap suatu butir soal menunjukkan kemampuan kognitifnya. *Item Response Theory (IRT)* ada dua model analisis yaitu dikotomus dan politomus.

Menurut Hambleton, Swaminathan & Rogers menyatakan bahwa model matematis yang digunakan *Item Response Theory* menggambarkan probabilitas subyek menjawab benar terhadap butir soal yang dikerjakan tergantung pada kemampuan subyek dan karakteristik butir soal yang bersangkutan.¹³

a) IRT Dikotomus

Respons butir dikotomus mempunyai dua kategori skor jawaban, yaitu jawaban betul (skor 1) dan jawaban salah (skor 0), model ini banyak diterapkan pada soal pilihan ganda.¹⁴ Model penskoran dikotomus disebut model logistik dikotomus.¹⁵ *Item Response Theory* menggunakan model ogive normal atau ogive logistik dan terdapat tiga macam model parameter logistik, yaitu:

Model Satu Paramater Logistik, Model 1 parameter Logistik, biasa dikenal dengan model Rasch, sebagai penghargaan kepada penemunya. Fungsi karakteristik butir untuk model logistik satu parameter ditentukan dengan persamaan:¹⁶

$$P_i(\theta) = \frac{e^{(\theta-b_i)}}{1 + e^{(\theta-b_i)}} \text{ dengan } i = 1,2,3, \dots, n \dots\dots\dots(1)$$

¹³ Hambleton, R.K., Swaminathan, H., & Rogers, H.J. (1991). *Fundamentals of item response theory*. (Newbury Park, CA: Sage. 1991), hlm. 9.

¹⁴ Bond, T.G. & Fox, Ch.M. *Applying the rasch model: Fundamental measurement in the human sciences. 2-nd ed.* (Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2007), hlm. 49.

¹⁵ Hambleton, *Op., cit*, hlm. 12

¹⁶ *Ibid*, hlm, 12.

Persamaan tersebut diatas merupakan Model IRT dengan satu parameter, yakni tingkat kesukaran butir (b_i). Pada tahun 1968, Birnbaum mengembangkannya menjadi model logistik dua parameter dengan persamaan berikut:¹⁷

$$P_i(\theta) = \frac{e^{Diai(\theta-b_i)}}{1 + e^{Diai(\theta-b_i)}} \dots\dots\dots(2)$$

Model Logistik 2 Parameter, melibatkan dua parameter yakni tingkat kesukaran butir (b_i) dan daya pembeda butir (a_i), selanjutnya Model Logistik 3 Parameter, yakni tingkat kesukaran butir (b_i) dan daya pembeda butir (a_i) serta faktor tebakan (c_i), dengan persamaan:

$$P_i(\theta) = c_i + (1 - c_i) \frac{e^{Diai(\theta-b_i)}}{1 + e^{Diai(\theta-b_i)}} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan dari ketiga persamaan di atas:

- $P_i(\theta)$ = probabilitas menjawab benar teste yang mempunyai kemampuan θ dalam mengerjakan butir soal i
- θ = tingkat kemampuan peserta tes
- b_i = parameter tingkat kesulitan pada butir i
- a_i = parameter daya beda pada butir i
- c_i = parameter tebakan pada butir i
- D = simpangan baku, nilainya 1,7
- e = bilangan natural, yang nilainya sebesar 2,718
- i = nomor butir soal (nilai i dari 1 sampai n)
- n = jumlah butir soal

¹⁷ *Ibid*, hlm. 15.

b) IRT Politomus

Berdasarkan jenis respons, *Item Response Theory* politomus mempunyai dua macam model, yaitu model respons nominal dan model respons ordinal. Model respons nominal dapat diterapkan pada butir yang mempunyai alternatif jawaban yang tidak berjenjang dengan adanya berbagai tingkat kemampuan yang diukur. Model respons ordinal digunakan bila respons peserta pada sebuah butir soal diskor dalam banyaknya kategori berurutan berdasarkan kecakapannya, sebagai contoh butir-butir pada skala sikap tipe Likert yang diskor secara berjenjang, 1,2,3,4 dan seterusnya. Bentuk umum PCM menurut Muraki & Bock sebagai berikut.¹⁸

$$P_{jk}(\theta) = \frac{\exp \sum_{v=0}^k (\theta - b_{jv})}{\sum_{h=0}^m \exp \sum_{v=0}^h (\theta - b_{jv})}, k = 0, 1, 2, 3, \dots, m \dots\dots\dots (5)$$

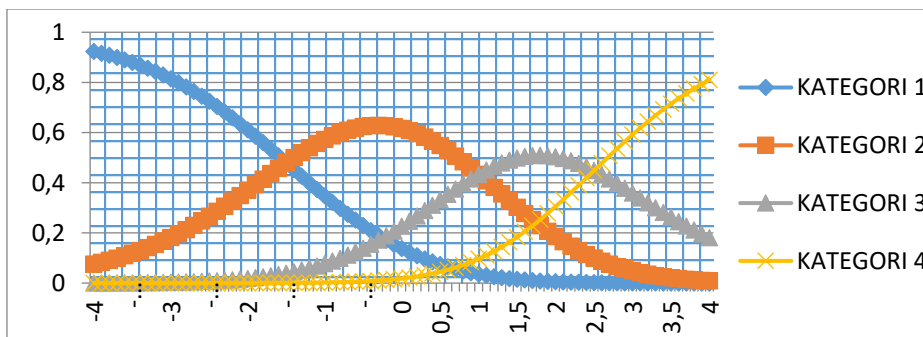
Keterangan :

- $P_{jk}(\theta)$ = Probabilitas menjawab benar seorang peserta tes yang mempunyai kemampuan θ pada butir soal ke j kategori k
- b_{jk} = indeks kesukaran pada butir soal ke j kategori k
- θ = Kemampuan peserta, j = nomor butir soal
- k = skor kategori k atau skor pada langkah k (nilai k dari 0 sampai m)
- $m + 1$ = banyaknya kategori pada suatu butir soal

Parameter tingkat kesulitan, yaitu b_i , untuk sebuah butir soal adalah titik pada skala kemampuan, pada titik itu peluang menjawab

¹⁸ Muraki, E. & Bock, R.D. Parscale: *IRT item analysis and test scoring for rating scale data*. (Chicago: Sceaientefik software International, inc. 1997), hlm. 16.

benar butir tersebut sebesar 0,5.¹⁹ Model penskoran politomus biasanya diterapkan pada angket dengan pilihan lebih dari dua kategori, misalnya 4 kategori. Kurva peluang skala politomus empat kategori dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 1.
Kurve Peluang Skala Politomus Empat Kategori

C. PROSEDUR PENGEMBANGAN

Penelitian pengembangan mangacu pada model R & D menurut Borg & Gall memiliki langkah-langkah umum dalam *Research and Development* adalah sebagai berikut: 1) *research and information collecting*, 2) *planning*, 3) *develop preliminary form of product*, 4) *preliminary field testing*, 5) *main produc revision*, 6) *main field testing*, 7) *operational produc revision*, 8) *operational field testing*, 9) *final produc revision*, 10) *desimination dan implementation*.²⁰

Prosedur penelitian pengembangan menurut Borg & Gall di atas dapat disederhanakan menjadi 5 langkah pokok, yaitu: 1) analisis kebutuhan dan pengumpulan informasi awal, 2) perencanaan dan pengembangan produk 3) validasi produk dan revisi, 4) ujicoba produk dan revisi, 5) Implementasi. Kelima langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁹ Hambleton, *Op.,cit.* hlm. 13.

²⁰ Brog, R,W & Gall, DM. *Edicational Research*. (New York, logaman, inc. 1983), hlm. 775.

1. Analisis kebutuhan dan pengumpulan informasi awal
 - a. mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kenyataan dan kondisi yang diinginkan
 - b. mencari informasi awal tentang kondisi riil di lapangan mengenai soal ujian fisika misalnya soal UTS, UAS dll, di SMA/MA dan wawan cara dengan guru fisika sebagai dasar pengembangan.
2. Perencanaan dan pengembangan produk
 - a. Menentukan tujuan tes
 - b. Merumuskan kemampuan yang diujikan
 - c. Menentukan materi yang diujikan
 - d. Menyusun kisi-kisi tes
 - e. Menyusun butir tes dengan mengacu pada berpikir kritis
 - f. Menyusun rubrik
3. Validasi produk dan revisi
 - a. Melakukan uji validitas isi oleh pakar pendidik dan pakar evaluasi dengan Expert Judgement atau teknik Delphi
 - b. Merevisi produk atas masukan atau saran pakar
 - c. Merakit tes
4. Uji coba produk dan revisi
 - a. Menentukan subyek uji coba (dua SMA dan satu MA)
 - b. Melakukan uji coba lapangan
 - c. Melakukan analisis data hasil uji coba
 - d. Melakukan evaluasi
 - e. Merevisi produk
 - f. Merakit tes
5. Implementasi
 - a. Menentukan subyek implementasi instrument
 - b. Melakukan kegiatan pengukuran
 - c. Melakukan analisis data hasil pengukuran
 - d. Interpretasi hasil pengukuran

D. PENUTUP

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian tersebut diatas, terlihat bahwa banyak kelebihan yang terdapat pada soal bentuk uraian yang diskor secara politomus, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa perlu dikembangkan soal prestasi belajar fisika yang kisi-kisinya mengacu pada taksonomi Bloom revisi; Perlu dikembangkan soal prestasi belajar fisika dalam bentuk uraian; Perlu dikembangkan pedoman penskoran; Soal bentuk uraian lebih akurat disbanding dengan soal bentuk pilihan ganda; Soal bentuk uraian lebih adil terhadap siswa; dan Soal bentuk uraian lebih lebih detail mengungkap kemampuan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Allamnakhrah, A. (2013). Learning Critical Thinking in Saudi Arabia: Student Perceptions of Secondary Pre-Service Teacher Education Programs. *Journal of Education and Learning*; Vol. 2, No. 1; 2013 ISSN 1927-5250 E-ISSN 1927-5269. Published by Canadian Center of Science and Education.
- Allen, M.J & Yen, W.M. (1979). *Introduction Measurment Theory*. Brooks/Cole. Pablisng Company.
- Alonso, M & Finn, E.J. (1980). *Dasar-dasar Fisika Universitas, Edisi. 2*, Jakarta: Erlangga.
- Anderson, Lorin W., David RR. Krathwohl, et. al. 2001. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: *A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York : Longman.
- Andrade, H & Du, Y (2005) Practical Assessment, Research & Evaluation, A *peer-reviewed electronic journal*, Volume 10 Number 3, April 2005, Practical Assessment Research & Evaluation, Vol 10, No 3
- Beng, Ms, C, S (2012) Rubrics: *Beyond Scoring*, An Enabler of Deeper Learning, Assessing Student Learning, November 2012
- Bond, T.G. & Fox, Ch.M. (2007). *Applying the rasch model: Fundamental measurement in the human sciences. 2-nd ed*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

- Brog, R.W & Gall, D.M. (1983). *Educational Research*. New York, Logam, inc.
- Depdikbud, (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan*.
- Druxes, H et al. (1986). *Kompedium Diktaktik Fisika*, CV Remaja Karya, Bandung.
- Eckes, T. (2011). Item banking for C-tests: A polytomous Rasch modeling approach. Test DaF Institute, Massenbergstr. 13 b, 44787 Bochum, Germany. *Psychological Test and Assessment Modeling*, Volume 53, 2011 (4), 414-439.
- Fahim, M & Pezeshki, M. (2012). Manipulating Critical Thinking Skills in Test Taking, *International Journal of Education*, Vol. 4, (1), p 1948-5476, 2012.
- Hambleton, R.K., Swaminathan, H., & Rogers, H.J. (1991). *Fundamentals of item response theory*. Newbury Park, CA: Sage.
- Isgiyanto, A. (2011). *Diagnosis Kesalahan Siswa Berbasis Penskoran politomus Model Partial Credit Pada Matematika*. Jurnal PEP, Pascasarjana UNY.
- Mardapi, D. (2005). *Pengembangan instrumen penelitian pendidikan*. Yogyakarta: Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2012). *Pengukuran Penilaian dan Evaluasi Pendidikan*, Cetakan I, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Wenning, C.J. (2011). Experimental inquiry in introductory physics courses, Department of Physics, Illinois State University, Normal, IL 61790-4560, *Journal. Physics. Tchr. Educ. Online*, 6(2), Summer 2011.
- Wolft, K & Stevens, E (2007) The Role of Rubrics in Advancing and Assessing Student Learning, *The Journal of Effective Teaching*, Vol. 7, No. 1, 2007 3-14
- David R. Krathwohl (2002) *A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview, Theory Into Practice*, Volume 41, Number 4, Autumn 2002, Copyright C) 2002 College of Education, The Ohio State University.
- Alonso, M & Finn, E.J. (1980). *Dasar-dasar Fisika Universitas, Edisi. 2*, Jakarta: Erlangga.

- Giancoli, Douglas C. (1998). Fisika Jilid 1. *Terjemahan Yuhilza Hanum*, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Hambleton, R.K., Swaminathan, H., & Rogers, H.J. (1991). *Fundamentals of item response theory*. Newbury Park, CA: Sage.
- Muraki, E. & Bock, R.D. (1997). *Parscale: IRT item analysis and test scoring for rating scale data*. Chicago: Sceiencetifik software International, inc.
- Sears & Zemansky. (1993). *Fisika Universitas Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Depdikbud, (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan*.

REFORMASI PENDIDIKAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

Yuliana Habibi¹

yulianahabibi@stipemalang.ac.id

Abstrak

Setiap individu dalam masyarakat merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mendukung dan melancarkan kegiatan pembangunan dalam masyarakat tersebut. Manusia sebagai individu, sebagaimana kodratnya memiliki sifat baik maupun buruk. Sifat-sifat yang kurang baik inilah perlu dibina dan dirubah sehingga melahirkan sifat-sifat yang baik lalu dibina dan dikembangkan. Proses perubahan dan pembinaan tersebut disebut dengan pendidikan. Ayat yang berkaitan dengan reformasi pendidikan adalah QS. Al-Anfal: 53 dan QS. Ar-Ra'du: 11. Reformasi pendidikan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk merubah suatu keadaan pendidikan ke arah yang lebih baik. Konstruksi reformasi pendidikan terbangun atas 4 aspek fundamental, yaitu: konten pendidikan, pelaku pendidikan, pola pembelajaran, dan arah kebijakan pendidikan.

Kata Kunci: Pola pembelajaran, Reformasi Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Empat belas abad tahun yang lalu, Allah telah mengingatkan kepada kita semua tentang perbedaan antara orang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan.² Allah berfirman dalam QS. Az-Zumar: 9:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat

¹ STIT Pemalang

² Aliyah, S. (2013). Ulul albab dalam tafsir fi zhilali al-quran. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 14(1), 115-150.

Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (QS. Az-Zumar: 9)

Ayat tersebut memberi jawaban bahwa tentu berbeda antara orang yang menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat-Nya dengan orang yang hanya menuruti hawa nafsu tanpa mengoptimalkan fungsi akal. Orang yang berpendidikan akan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan.

Pendidikan merupakan sarana paling strategis untuk membesarkan, mendorong, dan mengembangkan warga negara untuk memiliki peradaban, yang merupakan ciri dan karakter paling pokok dari masyarakat *madani*³, masyarakat yang berperadaban.⁴ Pendidikan merupakan sebuah keniscayaan yang memang harus dijalani dan dilalui oleh semua orang untuk meraih pada yang menjadi cita pengetahuannya.

Citra pendidikan yang belum begitu *digdaya* dalam membentuk masyarakat madani sebagaimana didengungkan oleh para pakar, melahirkan sikap pesimis dan ketidakpercayaan terhadap institusi pendidikan (baca : sekolah). Hal ini dapat dimaklumi karena jika pendidikan diartikan perubahan ke arah lebih baik, mulai dari watak, karakter, sifat, perilaku, sikap, pengetahuan, sampai ketrampilan, maka hal ini sungguh masih dalam tanda tanya besar. Sebab, koruptor, sindikat narkoba, dan pekerjaan lankat lainnya justru pelakunya adalah orang-orang yang berpendidikan (*white collar crimes*). Hal ini tentulah menjadi keprihatinan sekaligus mengecewakan.

Masyarakat tentu tidak menginginkan hal tersebut terjadi, semua harus mendorong terwujudnya pendidikan sebagai sarana untuk merealisasikan

³ Nurcholish Madjid mendefinisikan masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki konsep kehidupan sebagaimana pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sedangkan M. Hasyim berpendapat bahwa masyarakat Madani adalah masyarakat yang selalu memelihara perilaku beradab, sopan santun, berbudaya tinggi, baik dalam hubungannya dengan manusia yang lain maupun dengan lingkungan alam. (lihat Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004. hlm. 9-11)

⁴ Hujair AH. Sanaky, *Pembaruan Pendidikan Islam ; Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan Menuju Masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2015), hlm. 6-7

cita-citanya. Pendidikan harus mencambuk masyarakat agar bercita-cita lebih maju sehingga terwujud masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat.⁵

Perjalanan perkembangan pendidikan, selalu dihadapkan pada berbagai persoalan yang multikompleks, mulai dari persoalan konseptual-teoritis, sampai implementasi-operasional praktis.⁶ Hal ini tentu harus menjadi perhatian tersendiri dalam mengembangkan model pendidikan (baca : reformasi pendidikan).

Setiap individu dalam masyarakat merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mendukung dan melancarkan kegiatan pembangunan dalam masyarakat tersebut. Manusia sebagai individu, sebagaimana kodratnya memiliki sifat baik maupun buruk. Sifat-sifat yang kurang baik inilah perlu dibina dan dirubah sehingga melahirkan sifat-sifat yang baik lalu dibina dan dikembangkan. Proses perubahan dan pembinaan tersebut disebut dengan pendidikan.⁷

Salah satu aspek yang sangat penting untuk dikaji dalam reformasi pendidikan adalah reformasi pola pembelajaran. Reformasi pada aspek ini jauh lebih mudah untuk dipraktikkan daripada aspek pendidikan lainnya. Guru memegang peranan kunci pada tahapan ini. Untuk itulah, makalah ini akan membahas bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam reformasi pola pembelajaran tersebut.

Penulis menggunakan Pendekatan *Tafsir Mau'dui* (tematik), dalam membahas dan mengklasifikasikan ayat dan hadits yang berkaitan dengan reformasi pendidikan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari dan

⁵ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1989), hlm. 5

⁶ Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 23

⁷ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta : Buku Kompas, 2002), hlm. 12

menginventarisir ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan reformasi pendidikan, kemudian mengurutkannya sesuai dengan urutan turunnya, dan memaparkan pandangan-pandangan *mufasirin* terhadap ayat ataupun hadits tersebut, dan selanjutnya melakukan kontekstualisasi dalam upaya reformasi pendidikan,⁸ dengan membuat format konstruksi ideal pendidikan menurut perspektif Al-Quran dan hadits, dan reformasi pola pembelajaran.

B. PEMBAHASAN

1. Reformasi Pendidikan

Reformasi Pendidikan merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “reformasi” dan “pendidikan”. Secara *etimologi* (bahasa), reformasi terdiri dari kata “re” yang berarti kembali, dan “formasi” yang artinya susunan. Maka reformasi artinya menyusun kembali, perubahan radikal untuk perbaikan (bidang politik, sosial, agama, dll) dalam suatu masyarakat atau negara.⁹

Sedangkan pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰

Berangkat dari definisi tersebut, maka secara *terminologi* (istilah), reformasi pendidikan berarti perubahan format dari sebuah sistem pendidikan yang telah ada, ke arah sistem pendidikan yang lebih baik untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan.

⁸ Lukman Fauroni, *Ayat-ayat tentang Konsumsi*, Millah (Jurnal Studi Islam), Vol. VIII No.1, UII Yogyakarta, 2008. hlm. 134-144

⁹ Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997, hlm. 827

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas RI)

2. Reformasi Pendidikan Perspektif Quran-Hadits

Dalam Al-Quran maupun hadits tidak ditemukan kata atau istilah reformasi pendidikan, karena kata reformasi itu sendiri merupakan kosa kata yang relatif baru muncul. Namun secara eksplisit berangkat dari pengertian reformasi pendidikan maka setidaknya ada 2 (dua) ayat yang dapat dijadikan sandaran pokok dalam membahas reformasi pendidikan. Kedua ayat tersebut adalah, *pertama*, QS. Al Anfal (8): 53:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

(siksaan) yang demikian itu adalah karena **Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri**, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Jenis surat **Madaniyah**. Menurut Ibnu Abas, surat ini turun berkenaan dengan perang Badar tahun 2 H.¹¹ Orang-orang Quraisy mengingkari nikmat Allah, ketika Allah mengutus rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayatNya, mereka mendustakan dan bahkan mengusirnya, lalu memerangnya. Allah menyiksa mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka.




Kedua, QS. Ar-Ra'du (13): 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. **Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada**

¹¹ Dikutip dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/surah_al-anfal, pada hari Selasa, 26 Januari 2016 jam 20.45 WIB

pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Jenis Surat **Madaniyah**. Kata  dalam ayat ini berarti sesuatu yang bisa bersifat umum (apapun). Sedangkan  berarti kolektif (umat, kelompok, bangsa). Pendeknya, perubahan yang terjadi adalah perubahan kolektif. Ada bentuk persyaratan disini (*sighat as-syurth*), karena Allah menggunakan kata . Jadi perubahannya bersifat proaktif, bukan pasif menunggu pertolongan Allah.¹²

3. Pandangan Para Mufasirin

Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin Asy-Suyuthi dalam tafsirnya *Tafsir Jalalain* menafsirkan bahwa ayat ini menceritakan perilaku yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Berbagai makanan dilimpahkan kepada mereka, sehingga mereka tidak kelaparan, diamankan pula dari rasa takut, kemudian diutuslah kepada mereka nabi yang membawa peringatan. Kesemuanya itu dibalas oleh mereka dengan kekafiran.¹³

Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah berbuat adil dalam hukum. Ketentuan nikmat yang diberikan kepada suatu kaum tidak dicabut sehingga kaum tersebut menggantinya dengan kekufuran,¹⁴

¹² Dikutip dari <http://lembagadakwahkampus.wordpress.com/2009/06/08/tafsir-ar-ra'du-11>, pada hari Selasa, 26 Januari 2016 jam 21.12 WIB

¹³ Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin Asy-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, alih bahasa oleh Bahrn Abu Bakar, Jilid 2 (Bandung : Sinar Baru Al Gesindo, 2012), hlm. 732

¹⁴ Tim penyusun Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia (UII) juga berpendapat bahwa nikmat pemberian Allah yang diberikan kepada umat atau perseorangan selalu dikaitkan dengan akhlak dan amal mereka sendiri. Semakin orang atau umat mempunyai akhlakul karimah dan beramal saleh, maka ketentuan atas pemberian yang Allah anugerahkan kepada mereka tidak akan dikurangi (baca: dicabut). Lihat *Tafsir Al-Quran UII, Jilid IV*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf UII,1995), hlm. 19

sebagaimana dahulu Allah mencabut kenikmatan yang diberikan kepada Raja Fir'aun akibat dari kekufurannya.¹⁵

Lebih jauh, Hamka menafsirkan bahwa sesungguhnya Allah SWT mengetahui setiap gerak-gerik dan tingkah laku manusia yang telah berubah atau berpaling dari jalan kebenaran menuju jalan kebatilan dengan melakukan banyak pelanggaran atau kemaksiatan. Hamka juga menegaskan bahwa QS Al-Anfal: 53, dan QS Ar-Ra'du : 11 tersebut merupakan jawaban tak terbantahkan bagi penganut paham *jabariyah* tentang perilaku manusia dan takdirnya, bahwa ternyata Allah sendiri memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih perilakunya sendiri.¹⁶

Dari pendapat beberapa mufasirin terhadap QS. Al-Anfal: 53 dan QS. Ar-Ra'du: 11, dapat ditarik beberapa pokok pikiran tentang reformasi pendidikan sebagai berikut :

- a. Secara fitrah, manusia telah dibekali atau dianugerahi berbagai macam kenikmatan (baca : kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan ketrampilan tertentu) oleh Allah SWT.¹⁷ Ini merupakan modal dasar dari setiap individu untuk mengembangkan pendidikan, karena hakikatnya manusia lahir dalam keadaan menjadi manusia terdidik.
- b. Manusia diberi juga akal pikiran untuk memilih setiap perilakunya terhadap nikmat pemberian Allah tersebut, apakah mensyukuri

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh H. Salim Bahreisy, Jilid 4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 618

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz X*, (Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1985), hlm. 32-33. Lebih lanjut, Muh. Hasbi Ash-Shiddieqy juga memberikan penafsiran yang mirip dengan Hamka, yaitu orang-orang yang merubah keadaan dirinya dengan meninggalkan amal kebaikan yang merupakan fitrah manusia, dan justeru mengerjakan sebaliknya. (lihat *Tafsir Al-Bayan Edisi III*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 250)

¹⁷ Lihat QS. Nahl 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”

(baca: mengelaborasi seluruh kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan ketrampilannya untuk mendekat kepada Allah), atau mengkufuri nikmat Allah tersebut dengan sengaja melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah, dan mengerjakan perbuatan yang Allah murkai.¹⁸ Dengan akal pikirannya, manusia mampu untuk merubah keadaan pendidikan dari baik menjadi buruk, atau sebaliknya dari keadaan pendidikan yang buruk menjadi pendidikan yang baik.

- c. Allah SWT menegaskan tidak akan merubah keadaan (baca: mencabut atau menghilangkan nikmat pemberian Allah SWT) suatu kaum atau individu manusia, selama kaum atau individu tersebut tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Keadaan yang *stagnan* tentu akan terus-menerus terjadi dari waktu ke waktu, tidak berubah, selama tidak ada reformis-reformis yang muncul untuk merubah *status quo* ke arah yang lebih baik.¹⁹

Kedua ayat (QS. Al-Anfal: 53 dan QS. Ar-Ra'du: 11) memang secara *implisit* menyebutkan bahwa perubahan di sini adalah perubahan dari keadaan yang baik menuju keadaan yang tidak baik, sehingga Allah SWT merubah nikmat pemberian yang telah dianugerahkan kepadanya. Namun demikian, jika yang terjadi adalah keadaan yang buruk terlebih dahulu, pendidikan yang carut-marut, pendidikan yang belum dapat menjawab problematika sosial, dan sebagainya, maka tentu manusia juga tidak boleh tinggal diam. Selama tidak ada orang atau kaum yang mau merubah keadaan buruk tersebut, maka keadaan itu akan tetap seperti itu. Maka, reformasi pendidikan merupakan sebuah keniscayaan. Yang menjadi persoalan sekarang adalah, reformasi pendidikan seperti apa

¹⁸ Lihat QS. An-Nahl: 83:

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ...

“...Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya.” (Lihat pula QS. Al-Baqarah : 152, QS. Ibrahim : 7)

¹⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam ; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta : Buan Bintang, 2001), hlm. 54-55

yang berlandaskan nash-nash atau dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadits?

4. Konstruksi Ideal Reformasi Pendidikan

Dalam tataran konsep, reformasi pendidikan bersifat *on going process*, artinya reformasi itu akan terus menerus terjadi sampai pada tataran ideal yang dibutuhkan. Hal ini perlu dipahami karena memang pendidikan bukanlah paket jadi yang konsepnya dapat dijalankan begitu saja, ia terikat pula pada kondisi, situasi, perubahan jaman juga merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari.

Pendidikan, sebagaimana dipahami oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif, merupakan salah satu faktor strategis dalam pembangunan bangsa. Walaupun ia bukan satu-satunya faktor, tetapi pendidikan mempunyai implikasi pada semua aspek kehidupan.²⁰ Pendidikan (Islam) tidak hanya sekedar mentransfer nilai-nilai universal, tetapi juga emmberikan makna nilai-nilai tersebut untuk manusia agar berakhlak mulia.²¹ Pendidikan sangat erat kaitannya dengan aspek kehidupan yang lain, sehingga menjadikan reformasi pendidikan tidak sederhana. Reformasi pendidikan setidaknya mencakup 4 ranah utama, yaitu *konten* atau materi pendidikan yang diajarkan, *pola pembelajaran*,²² *Pelaku pendidikan*,²³ dan yang terakhir *arah kebijakan pendidikan*.²⁴

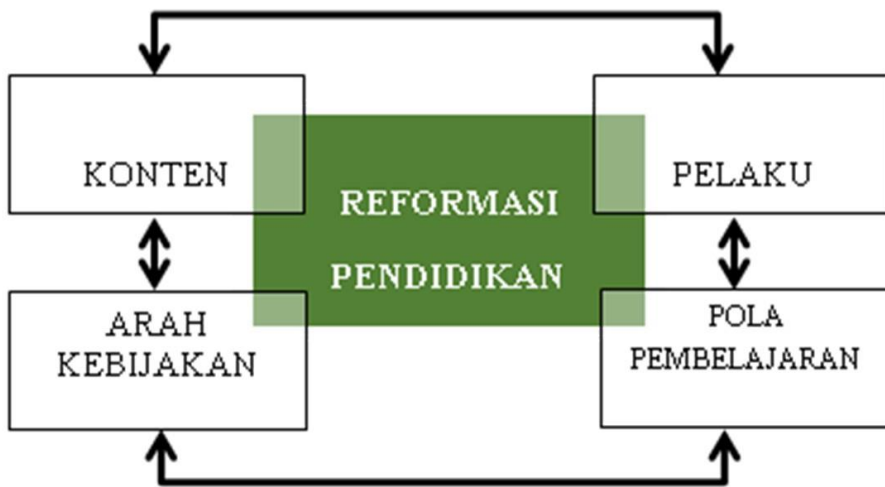
²⁰ Winarno Surakhmad, dkk. *Reformasi Pendidikan Muhammadiyah; Sebuah Keniscayaan*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2003), hlm. xxvii

²¹ Sarbiran, dalam Imam Machali (ed.), *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, (Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2004), hlm. 24

²² Syamsul Nizar dan Muh. Syaifudin, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), hlm. 53-61

²³ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Latanbora Press, 2003), hlm. 57

²⁴ Syamsul Nizar, *Ibid*, hlm. 82-85



5. Reformasi Pola Pembelajaran

Islam tidak menganut dikotomi ilmu dalam pendidikan. Semua ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat wajib dipelajari oleh semua orang. Bahkan, kita diwajibkan untuk bertanya tentang pengetahuan yang kita tidak tahu kepada orang yang lebih mengetahui. Allah berfirman dalam QS. an-Nahl ayat 43:

“... Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Pola pembelajaran menjadi salah satu kunci suksesnya sebuah proses pendidikan. Reformasi pola pembelajaran tentu erat kaitannya dengan interaksi guru-murid. Reformasi aspek ini diarahkan pada upaya perubahan paradigma tentang pendidikan. Guru misalnya, haruslah mempunyai pandangan bahwa pendidikan bukan hanya bersifat *transfer of knowledge* tetapi juga *transfer of value*. Mendidik dengan hati, dan mencintai pekerjaannya.²⁵ Murid juga mempunyai prinsip bahwa hanya

²⁵ Abdullah Munir, *Spiritual Teaching*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2006), hlm. 3-4

dengan pendidikan ia akan bisa menjadi manusia yang sebenarnya. Nasib masa depan bangsa ini tergantung di pundaknya, sehingga ia akan bersungguh-sungguh dalam belajar dan menerima pelajaran.²⁶

6. Upaya-upaya Reformasi Pola Pembelajaran

a. Kontekstualisasi Ilmu Pengetahuan yang Diajarkan dalam Pembelajaran

Yaitu dengan menarik teks ke dalam konteks. Nash-nash yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun Hadits haruslah diimplementasikan dalam kehidupan nyata, khususnya yang berkaitan pengetahuan.²⁷ Ilmu pengetahuan jangan dipahami dalam dataran konsep-teoritis saja, tetapi bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat diimplementasikan atau dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pendidikan harus mampu menjadi jawaban atas persoalan yang dihadapi sehari-hari.

Ketika Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya tentang sholat misalnya, Beliau langsung naik memperagakan shalat

²⁶ Harus diakui bahwa banyak anak yang belum memahami mengapa ia harus belajar (baca : sekolah), kesadaran akan hakikat belajar belumlah tertanam di hati anak-anak. Maka yang terjadi adalah rutinitas sekolah yang menjemukan (*al muyu'ah, at-tafahah*), kecerobohan (*al-istihtar*), dan ketidakpedulian (*al-lamubalah*). Orang tua juga harus memiliki kepedulian yang tinggi dalam pendidikan anak-anaknya, karena hakikatnya pendidikan anak merupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Rasulullah pernah bersabda :

قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, Setiap anak dilahirkan dlm keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yg menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi." HR. al-Bukhari & Muslim. (lihat Amru Khalid, *Quantum Change*, Semarang: Pustaka Nuun, 2008, hlm. 309-3012

²⁷ Ada juga yang berpendapat adanya Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan pertama kali dicetuskan oleh Sayyed Hossein Nasr dalam bukunya *The Encounter of Man dan Nature (1968)* yang kemudian disuarakan kembali oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Isma'il Raji Al-Faruqi, dan Ziauddin Sardar, dll. (Lihat Abdullah Ahmad Na'im, *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta : Jendela, 2003, hlm. 338)

dari takbir sampai dengan salam, dan kemudian berkata kepada para sahabatnya : *صلوا كما رأيتموني أصلي* “Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat”²⁸

b. Pemberlakuan Pembiasaan Perilaku Islami

Misalnya, bagaimana menyapa guru, menyapa teman, membuang sampah pada tempatnya, makan dan minum dengan tangan kanan sambil duduk, jika terdengar suara adzan guru langsung mengakhiri pelajarannya dan mengajak murid-murid untuk ke mushola sekolah, dan contoh lainnya.

c. Keteladanan Guru

Guru memang harus menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Jangan sampai ada anggapan bahwa guru hanya pandai bicara saja tetapi tidak mampu untuk mempraktikkannya, sementara ia menyuruh murid-muridnya mengerjakannya. Firman Allah dalam QS. ash-Shaaf ayat 2-3:

“(2) Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?”

(3) Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”

d. Mengenal (Karakteristik) Murid

Murid tentu berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, suku-ras, agama, budaya, kebiasaan, kaya-miskin, rajin-malas, dan sebagainya. Mengenal karakteristik dan kepribadian murid sangat penting untuk mengembangkan potensi dan memilih pendekatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.²⁹

²⁸ Imam Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Bab Tentang Sholat

²⁹ Muhammad Yaumi, *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 120-121

e. Memotivasi Siswa

Guru harus menjadi motivator dalam setiap pembelajaran yang berlangsung, adanya motivasi akan menciptakan kondisi pembelajaran yang nyaman, bersemangat dan meningkatkan produktivitas belajar.³⁰ Motivasi penting dalam menentukan seberapa banyak siswa akan belajar dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa banyak menyerap informasi yang disajikan kepada mereka. Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan menyerap dan mengendapkan materi itu dengan lebih baik. Firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 87:

“Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan **jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah**. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”.

Adapun fungsi dari motivasi dalam pembelajaran diantaranya:

- 1) Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan, tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan misalnya belajar.
- 2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.

f. Mengembangkan Bahan Pembelajaran

Guru atau pendidikan semestinya harus menyadari bahwa bahan pembelajaran seperti yang telah tercantum dalam kurikulum merupakan standar minimal, artinya terbuka ruang yang sangat lebar bagi guru untuk lebih berkesplorasi dengan sajian bahan

³⁰ Ivor K. Davies, *The Management of Learning*, alih bahasa oleh Sudarsono Sudirjo, dalam *Pengelolaan Belajar* (Jakarta : CV Rajawali, 1991), hlm. 215-217

pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi pembelajaran yang berlangsung.³¹

C. PENUTUP

Upaya reformasi pendidikan memang tidak sesederhana seperti dalam teori. Dalam tataran praktik di lapangan ada banyak aspek yang saling terkait, dan saling berpengaruh antara satu dengan lainnya. Hal ini perlu dipahami karena memang pendidikan bukanlah paket jadi yang konsepnya dapat dijalankan begitu saja, ia terikat pula pada kondisi, situasi, perubahan jaman juga merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ayat yang berkaitan dengan reformasi pendidikan adalah QS. Al-Anfal: 53 dan QS. Ar-Ra'du : 11. Para mufasirin, diantaranya Jalaludin Asy-Syuyuti (Tafsir Jalalain), Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir), Hamka (Tafsir Al-Azhar), Hasbi Ash-Shiddieqy (Tafsir Al-Bayan), menafsirkan bahwa kedua ayat ini berbicara tentang perubahan atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada suatu kaum, yang apabila kaum itu bersyukur maka nikmat itu akan tetap melekat pada dirinya, tetapi sebaliknya apabila mereka kufur, maka Allah akan merubah keadaan baik tersebut menjadi keburukan.
2. Reformasi pendidikan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk merubah suatu keadaan pendidikan ke arah yang lebih baik.
3. Konstruksi reformasi pendidikan terbangun atas 4 aspek fundamental, yaitu: konten pendidikan, pelaku pendidikan, pola pembelajaran, dan arah kebijakan pendidikan.
4. Aspek reformasi pola pembelajaran dipilih sebagai pembahasan karena implementasinya dapat dilakukan oleh seorang guru.

³¹ Muhammad Yaumi, *Prinsip*, hlm. 272-274.

5. Upaya-upaya dalam reformasi pola pembelajaran antara lain: Kontekstualisasi ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam pembelajaran; Pemberlakuan pembiasaan perilaku Islami; Keteladanan guru; Mengenal (karakteristik) murid; Memotivasi siswa; dan Mengembangkan bahan pembelajaran.

Saran dan rekomendasi dari penelitian ini adalah

1. Reformasi pendidikan haruslah melibatkan semua pihak yang merupakan *stake holder* Pendidikan;
2. Upaya reformasi pendidikan dapat dimulai dari reformasi pola pembelajaran yang harus dilakukan oleh masing-masing guru di kelasnya masing-masing;
3. Perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil, maka jangan menganggap remeh perubahan yang kita ciptakan dalam proses belajar-mengajar.

Demikian penelitian ini disusun. Kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini tentu menjadi bagian terpenting dari keseluruhan pembahasan tentang reformasi pendidikan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Sri. (2013). Ulul albab dalam tafsir fi zhilali al-quran. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 14(1), 115-150.
- Al-Mahalli, Jalaludin, dan Jalaludin Asy-Suyuthi. (2012). *Tafsir Jalalain Jilid 2*, alih bahasa oleh Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Al Gesindo
- Ash-Shiddieqy, Muh. Hasbi, (2015). *Tafsir Al-Bayan Edisi III*, Semarang : Pustaka Rizki Putra
- Azra, Azyumardi, (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta : Buku Kompas
- _____, (2004). *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

- Davies, Ivor K. (1991). *The Management of Learning*, alih bahasa oleh Sudarsono Sudirjo. *Pengelolaan Belajar*, Jakarta: CV Rajawali
- Fauroni, Lukman, (2008). *Ayat-ayat tentang Konsumsi*, Yogyakarta : Millah (Jurnal Studi Islam), Vol. VIII No.1, UII Yogyakarta
- Hamka, (1985). *Tafsir Al-Azhar Juz X*, Jakarta : Pustaka Panji Mas
- Hasan, Muhammad Tholhah, (2003). *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Latanbora Press
- Katsir, Ibnu, (2005). *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh H. Salim Bahreisy, Jilid 4. Surabaya : PT Bina Ilmu
- Khalid, Amru, (2008). *Quantum Change*, Semarang: Pustaka Nuun
- Kurniawan, Syamsul, dan Erwin Mahrus, (2011). *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Marimba, Ahmad D., (1989). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung : Al-Ma'arif.
- Munir, Abdullah, (2006). *Spiritual Teaching*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
- Na'im, Abdullah Ahmad, (2003). *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela
- Nasution, Harun, (2001). *Pembaharuan Dalam Islam ; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta : Buan Bintang
- Nizar, Syamsul, dan Muh. Syaifudin, (2010). *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia
- Sanaky, Hujair AH., (2015). *Pembaruan Pendidikan Islam ; Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan Menuju Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta : Kaukaba
- Sarbiran, dalam Imam Machali (ed.), (2004). *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta : Ar Ruzz Media
- Surakhmad, Winarno, dkk. (2003). *Reformasi Pendidikan Muhammadiyah ; Sebuah Keniscayaan*, Yogyakarta : Pustaka SM
- Tim Penyusun Kamus Depdikbud, (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Tafsir Al-Quran UII, (1995). *Tafsir Al-Quran UII, Jilid IV*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf UII

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas RI)

Yaumi, Muhammad, (2013). *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran*, Jakarta :
Kencana

http://id.m.wikipedia.org/wiki/surah_al-anfal, pada hari Selasa, 26 Januari
2016

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAMI MELALUI TEKNIK *MODELLING*

Ismah

ismah_bk@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat siswa pada layanan bimbingan dan konseling (BK) khususnya bimbingan dan konseling islami. Hal itu terlihat dari minimnya siswa yang datang keruang layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana layanan informasi dengan teknik *modelling* dapat menarik minat siswa pada layanan bimbingan dan konseling islami. Diharapkan hasil kajian dalam penulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan minat siswa berkunjung ke ruang bimbingan dan konseling (BK) secara sadar dan tanpa paksaan melalui layanan bimbingan dan konseling islami dengan layanan informasi teknik *modelling*.

Kata kunci : Layanan Informasi, Minat Siswa, Teknik *Modelling*.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang penting bagi setiap individu, sebab pendidikan merupakan bagian dari kehidupan di masa yang akan datang.¹ Dalam pendidikan dapat dipastikan setiap anak mendapatkan beberapa materi pelajaran umum atau materi pelajaran agama, termasuk layanan yang diberikan oleh guru BK (Bimbingan dan Konseling) atau Bimbingan Konseling Islam (BKI) bagi sekolah yang berorientasi pada agama khususnya agama islam.²

Bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari istilah Inggris *guidance and counseling*, dulu istilah *counseling* di-Indonesia-kan menjadi

¹ Ajat Sudrajat. Mengapa pendidikan karakter?. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1). 2011.

² Kamaluddin. Bimbingan dan konseling sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(4), 2011. hlm. 447-454.

penyuluh (nasihat).³ Akan tetapi, karena istilah penyuluhan banyak digunakan di bidang lain, semisal dalam penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana yang sama sekali berbeda isinya dengan yang dimaksud *counseling*, maka agar tidak menimbulkan salah, istilah *counseling* tersebut langsung diserap menjadi konseling. Mengenai kedudukan dan hubungan antara bimbingan dan konseling terdapat banyak pandangan, salah satunya memandang konseling sebagai teknik bimbingan, dengan kata lain konseling berada di dalam bimbingan. Pendapat lain mengatakan bahwa bimbingan terutama memusatkan diri pada pencegahan munculnya masalah, sementara konseling memusatkan diri pada pencegahan masalah yang dihadapi individu.

Sementara berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29/90, Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenai lingkungan, dan merencanakan masa depan.⁴ Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *Guidance and Counseling*. Kata *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti memimpin, menunjukkan, atau membimbing kejalan yang baik. Jadi kata *guidance* dapat berarti pemberian pengarahan, atau pemberian petunjuk kepada seseorang. Sedangkan *Counseling* berasal dari kata kerja *to counsel* yang berarti menasihati, atau menganjurkan kepada seseorang secara *face to face*.⁵

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan

³ Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Cet. 1. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 23.

⁴ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 18 dan 21.

⁵ Zainal Aqib, *Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Surabaya: Yrama Widya, 2012), hlm 27.

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁶

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan (*proses of helping*) konselor kepada individu (konseli) secara berkesinambungan agar mampu memahami potensi diri dan lingkungannya, menerima dirinya secara optimal, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan (agama dan budaya) sehingga mencapai kehidupan yang bermakna (berbahagia), baik secara personal maupun sosial. Lebih lanjut Prayitno, mengemukakan bahwa: "Konseling adalah pertemuan empat mata antara klien dan konselor yang berisi usaha yang laras, unik, dan *human* (manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku".⁷

Bimbingan merupakan suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan, yang bersifat *helping* yang identik *aiding*, *assisting*, atau *availing*, yang berarti bantuan atau pertolongan. Sedangkan konseling merupakan suatu hubungan profesional yang diadakan oleh seorang konselor yang sudah dilatih untuk pekerjaannya, dalam hubungan bersifat profesional klien mempelajari keterampilan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta tingkah laku atau sikap-sikap baru, dan hubungan profesional berdasarkan kesukarelaan antara klien dan konselor.⁸

Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pemberian bantuan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling (BK) kepada siswa. Sedangkan fungsi dari bimbingan dan konseling diantaranya: (1)

⁶ Prayitno, dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, . 2004), hlm 99.

⁷ Syamsu Yusuf , *Program Bimbingan & Konseling di Sekolah*, (Bandung: Rizqi Press, . 2009), hlm 38.

⁸ Syamsu Yusuf, LN dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 6 dan 8.

fungsi pemahaman, yaitu pemahaman tentang diri klien beserta permasalahannya, serta pemahaman tentang lingkungan klien, (2) fungsi pencegahan yaitu mencegah agar dalam diri klien tidak terjadi suatu permasalahan, (3) fungsi pengentasan, yaitu membantu klien mengambil keputusan dalam proses pengentasan masalah, (4) fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu membantu siswa memelihara dan mengembangkan segala hal baik yang ada dalam diri individu.⁹

Sedang Konseling adalah proses *helping* atau bantuan konselor (*helper*) kepada konseli, baik melalui tatap muka maupun media (elektronik, internet atau telepon), agar klien dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalahnya, sehingga berkembang menjadi seorang pribadi yang bermakna, baik bagi dirinya sendiri, maupun orang lain, dalam rangka mencapai kebahagiaan bersama.¹⁰ Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.¹¹ Zainal Aqib menyatakan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.¹²

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling Islam adalah proses bantuan yang di berikan konselor pada klien berdasarkan Alqur'an dan hadist dan berdasarkan hukum islam, dengan harapan klien bisa menyelesaikan masalahnya sendiri setelah melakukan proses bimbingan dan konseling, atau dapat dikatakan proses pemberian bantuan kepada individu atau siswa secara berkesinambungan dan

⁹ Winkel, WS dan Sri Hastuti, *Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan*, (Yogyakarta : Media Abadi, 2004), hlm 15.

¹⁰ Syamsu Yusuf L, *Program Bimbingan.*, hlm 45.

¹¹ Prayitno, dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan.*, hlm 105.

¹² Zainal Aqib, *Op., cit*, hlm 28

berlandaskan norma-norma agama Islam yang berlaku dimasyarakat, agar individu mampu memahami potensi, mengembangkan kemampuan dirinya sendiri, dan menyesuaikan diri secara positif.

Salah satu hal yang menjadi penyebab enggannya siswa melakukan kegiatan bimbingan dan konseling adalah persepsi siswa yang keliru akan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri, diantaranya kebanyakan guru pembimbing dianggap sebagai *polisi sekolah*.¹³ Hal ini terlihat ketika ada seorang siswa yang bertindak melanggar tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut, siswa langsung dipanggil dan diberi hukuman yang cenderung berbentuk hukuman fisik. Misalnya, lari mengelilingi lapangan, membersihkan kamar mandi, berjemur di lapangan dan sebagainya.

Hal lain yang mempengaruhi rendahnya minat siswa pada layanan bimbingan dan konseling adalah *rapport* (hubungan timbal balik antara guru pembimbing dan siswa) dan empati guru pembimbing. Pada umumnya seorang guru pembimbing diharapkan memiliki sikap tenang, menawan hati, memiliki kapasitas berempati, ditambah lagi dengan beberapa sifat kepribadian seperti: sederhana, jujur, emosi stabil, ramah, mempunyai perhatian terhadap orang lain. Siswa lebih senang mendatangi guru pembimbing yang dianggap mempunyai kepribadian baik daripada konselor yang dianggap galak, cerewet, semena-mena dan sebagainya.

Siswa sekolah menengah sebagai salah satu golongan remaja menuju dewasa sering kali mengalami permasalahan dan hambatan, namun biasanya mereka malu untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada guru pembimbing ataupun teman akrabnya. Di samping itu, siswa juga menganggap guru bimbingan dan konseling (BK) merupakan figur yang menakutkan, sehingga ketika dipanggil untuk kegiatan bimbingan dan konseling, mereka datang dengan membawa perasaan takut dan penuh keterpaksaan.

¹³ Sofyan Willis, S, *Teori dan Praktek Konseling Individual*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 9.

Dari berbagai permasalahan yang ada di atas, menunjukkan bahwa minat siswa dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling masih rendah. Minat siswa pada layanan bimbingan dan konseling yang rendah, tidak boleh dibiarkan. Fungsi sekolah adalah menyediakan pelayanan yang luas untuk siswa secara efektif, membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal dalam mengatasi permasalahannya. Maka di sinilah dirasakan perlunya layanan bimbingan dan konseling Islam untuk mendorong minat siswa pada layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Bimbingan dan Konseling Islami

Landasan (fondasi atau dasar pijak) utama bimbingan dan konseling Islami adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam, seperti disebutkan oleh Nabi Muhammad saw, yang artinya sebagai berikut :
"Aku tinggalkan sesuatu bagi kalian semua yang jika kalian selalu berpegang teguh kepadanya niscaya selama-lamanya tidak akan pernah salah langkah tersesat jalan; sesuatu itu yakni Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. (H.R Ibnu Majah).¹⁴

2. Peran Konselor

Bukan hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa konselor adalah orang yang amat bermakna bagi klien.¹⁵ Konselor menerima klien apa adanya dan bersedia dengan sepenuh hati membantu masalahnya saat kritis sekalipun. Pembimbing dan konseling pendidikan Islam atau konselor seyogyanya orang-orang yang memiliki kemampuan (kompetensi) sebagai berikut :¹⁶

¹⁴ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press. 2001). hlm. 5.

¹⁵ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang, UMM Press, 2004), hlm 45.

¹⁶ Aunur Rahim Faqih, *Op.,cit.* hlm 116.

- a. Menguasai ilmu bimbingan dan konseling
- b. Memahami (memiliki) wawasan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar (termasuk psikologi pendidikan, psikologi perkembangan dan lain-lain)
- c. Memahami syaria'ah Islamiyah secara memadai.

3. Minat Siswa pada Layanan Bimbingan dan Konseling

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila orang melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, orang merasa berminat dan kemudian mendatangkan kepuasan.¹⁷ Bila siswa melihat bahwa layanan bimbingan dan konseling akan bermanfaat bagi dirinya, maka akan muncul minat untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, dan kemudian akan mendatangkan kepuasan.

Dalam menangani masalah untuk meningkatkan minat siswa pada layanan bimbingan dan konseling seorang konselor atau guru BK dapat menggunakan layanan informasi, karena layanan informasi ini mempunyai fungsi pemahaman dan pengembangan apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemberian layanan informasi diadakan untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan dan bidang perkembangan pribadi-sosial.¹⁸

Minat menurut Khairani Makmun merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang seseorang inginkan.¹⁹ Minat timbul bersumber dari hasil pengenalan dengan lingkungan, atau hasil berinteraksi dan belajar dengan lingkungannya. Bila minat pada sesuatu sudah dimiliki seseorang, maka ia akan menjadi potensi bagi

¹⁷ Hurlock, B. Elizabeth. *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 114.

¹⁸ Winkel, WS dan Sri Hastuti. *Bimbingan dan Konseling di*, hlm 316.

¹⁹ Khairani Makmun, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2013), hlm 135.

orang yang bersangkutan untuk dapat meraih sukses di bidang itu. Sebab minat akan melahirkan energy yang luar biasa untuk berjuang mendapatkan apa yang dia minati. Sementara pengertian Minat menurut WS Winkel dan Sri Hastuti adalah kecenderungan yang agak menetap pada seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang itu.²⁰

Dari beberapa pengertian minat di atas dapat disimpulkan minat pada layanan bimbingan dan konseling adalah ketertarikan dengan diikuti rasa senang dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling, sehingga siswa mampu memahami potensi, mengembangkan kemampuan, memecahkan masalah kehidupannya dan memperoleh kepuasan dalam mencapai kebahagiaan.

4. Aspek- Aspek Minat pada Layanan Bimbingan dan Konseling

Aspek-aspek minat pada layanan bimbingan dan konseling adalah:²¹

- a. Perhatian yaitu pemusatan pikiran saat mengikuti pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling
- b. Ketertarikan yaitu bentuk adanya perhatian seseorang mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling. Ketertarikan ini ditunjukkan dengan usaha untuk berhubungan dan melakukan tindakan layanan bimbingan dan konseling.
- c. Keinginan yaitu dorongan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang layanan bimbingan dan konseling.
- d. Keyakinan yaitu individu yang merasa yakin dengan kegiatan yang dilakukan dan akan memberikan kepuasan sebagaimana yang diinginkan. Keyakinan muncul setelah individu mempunyai

²⁰ Winkel, WS dan Sri Hastuti. *Bimbingan dan Konseling di*, hlm 650.

²¹ Frank Jefkins. *Periklanan*. (Jakarta: Erlangga, 1994.), hlm 242.

informasi atau data yang cukup terhadap layanan bimbingan dan konseling, sehingga merasa yakin terhadap layanan bimbingan dan konseling.

- e. Tindakan, adalah hal yang akan dilakukan individu jika sudah memiliki perhatian, ketertarikan, keinginan, keyakinan. Setelah menentukan semuanya, individu melakukan tindakan yaitu untuk melaksanakan dan memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling tanpa adanya paksaan dari pihak lain melainkan dari dirinya sendiri yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahannya.

Menurut Khairani Makmun minat pada layanan bimbingan dan konseling mengandung aspek-aspek sebagai berikut:²²

- a. Minat adalah suatu gejala psikologis. Gejala psikologis yaitu proses perubahan perilaku manusia dalam kehidupannya. Hal ini berarti minat adalah kesadaran individu untuk mencari pemecahan permasalahan yang dihadapi melalui kegiatan layanan bimbingan dan konseling, sehingga terjadi perubahan perilaku yang baik.
- b. Adanya pemusatan perhatian terhadap layanan bimbingan dan konseling karena tertarik.
- c. Adanya perasaan senang terhadap layanan bimbingan dan konseling.
- d. Adanya kemauan atau kecenderungan pada individu untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling guna mencapai tujuan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat pada Layanan Bimbingan dan Konseling

Minat pada hakikatnya merupakan sebab akibat dari pengalaman. Minat berkembang sebagai hasil daripada suatu kegiatan dan akan menjadi sebab akan dipakai lagi dalam kegiatan yang sama.²³ Minat

²² Khairani Makmun, *Psikologi Belajar*, hlm. 137.

²³ Khairani Makmun, *Psikologi Belajar*, hlm. 139.

sebagai salah satu aspek psikologis dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang sifatnya dari dalam (internal) maupun dipengaruhi dari luar (eksternal).²⁴ Faktor-faktor minat tersebut adalah sebagai berikut: ²⁵

- a. *The Factor Inner Urge* :Rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat.
- b. *The Factor of Social Motive* : Minat seseorang terhadap obyek atau sesuatu hal. Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor dalam diri manusia dan motif sosial.
- c. *Emosional Factor*: Faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap obyek, misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut.

6. Layanan Informasi pada Layanan Bimbingan dan Konseling

Layanan informasi secara umum bermaksud memberikan pemahaman baru kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas suatu kegiatan. Hallen berpendapat bahwa layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa.²⁶

Sementara Achmad Juntika Nurihsan mengemukakan layanan informasi merupakan layanan memberi informasi yang dibutuhkan oleh individu.²⁷ Tujuan layanan ini agar individu punya pengetahuan

²⁴ Slameto (dalam Khairani, 2013: 145)

²⁵ Crow and Crow (dalam Khairani, 2013: 139-140)

²⁶ Hallen, A. *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm 77.

²⁷ Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 19.

(informasi yang memadai) baik tentang dirinya maupun tentang lingkungannya, lingkungan perguruan tinggi, masyarakat, serta sumber-sumber belajar termasuk internet.

Layanan informasi oleh Dewa Ketut Sukardi diartikan sebagai layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik (terutama orang tua) dalam menerima dan memahami informasi (seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat.²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian layanan informasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa layanan informasi adalah layanan bantuan yang diberikan kepada siswa yang bermaksud untuk membekali pengetahuan di bidang pendidikan sekolah, dan bidang pribadi-sosial sebagai pertimbangan, pengambilan keputusan dan merencanakan kehidupannya sendiri.

7. Tujuan Layanan Informasi pada Layanan Bimbingan dan Konseling

Tujuan layanan informasi agar siswa mengetahui cara menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya serta agar individu memahami berbagai informasi dengan segala seluk beluknya.²⁹ Penguasaan akan berbagai informasi ini untuk mencegah timbulnya masalah, pemecahan suatu masalah, untuk memelihara dan mengembangkan potensi individu serta memungkinkan individu dapat membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya.

²⁸ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 61.

²⁹ Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 147.

Prayitno dan Erman mengemukakan layanan informasi bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalin suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki.³⁰

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan informasia adalah untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk merencanakan masa depan dan mengambil keputusan berdasarkan kaidah-kaidah Islam.

8. Jenis-Jenis Layanan Informasi

Jenis-jenis layanan informasi menurut Winkel, WS dan Sri Hastuti meliputi:³¹

- a. Informasi tentang pendidikan sekolah yang mencakup semua data mengenai variasi program pendidikan sekolah dan pendidikan prajabatan dari berbagai jenis, mulai dari persyaratan penerimaan sampai dengan bekal yang dimiliki pada waktu tamat.
- b. Informasi tentang jabatan (dunia kerja) yang mencakup semua data mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat, mengenai gradasi posisi dalam lingkup suatu jabatan, mengenai persyaratan tahap dan jenis pendidikan, mengenai system klarifikasi jabatan, dan mengenai prospek masa depan berkaitan dengan kebutuhan riil masyarakat akan jenis pekerjaan tertentu.
- c. Informasi tentang sosial-budaya mengenai perkembangan manusia muda serta pemahaman terhadap sesama manusia mencakup semua data dan fakta mengenai tahap-tahap perkembangan serta lingkungan hidup fisik dan psikologis, bersama dengan hubungan

³⁰ Prayitno, dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan.*, hlm 259.

³¹ Winkel, WS dan Sri Hastuti. *Bimbingan dan Konseling di*, hlm 318.

timbal balik antara perkembangan kepribadian dan pergaulan sosial di berbagai lingkungan masyarakat. informasi yang mencakup hal ini antara lain: pemahaman diri, dan penerimaan orang lain, pembinaan jalinan hubungan sosial yang sehat dan wajar, pendidikan seks, fase-fase dalam kehidupan manusia dewasa, dan lain-lain.

Prayitno, dan Erman Amti membedakan layanan bimbingan dan konseling pada tiga jenis layanan informasi, yaitu:³²

- a. Informasi Pendidikan : Dalam pendidikan banyak individu yang bersetatus siswa atau calon siswa yang diharapkan pada kemungkinan timbulnya masalah atau kesulitan. Diantara masalah atau kesulitan tersebut berhubungan dengan (a) pemilihan program studi, (b) pemilihan sekolah, fakultas dan jurusan, (c) penyesuaian diri dengan program studi, (d) penyesuaian diri terhadap suasana belajar, dan (e) putus sekolah.
- b. Informasi Jabatan : Informasi jabatan atau pekerjaan yang baik sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: (a) stuktur dan kelompok-kelompok jabatan atau pekerjaan utama, (b) uraian tugas masing-masing jabatan atau pekerjaan, (c) kualifikasi tenaga yang diperlukan untuk masing-masing jabatan, (d) cara-cara atau prosedur penerimaan, (e) kondisi kerja, (f) kesempatan-kesempatan untuk pengembangan karir.
- c. Informasi Sosial-Budaya : Setiap warga negara perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman isi informasi tentang keadaan sosial-budaya berbagai daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyajian informasi sosial-budaya yang meliputi: (a) macam-macam suku bangsa, (b) adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan, (c) agama dan kepercayaan, (d) bahasa, terutama istilah-istilah yang dapat

³² Prayitno, dan Erman Amti., *Op.,cit.* hlm 261.

menimbulkan kesalahpahaman suku bangsa lainnya, (e) potensi-potensi daerah, (f) kekhususan masyarakat atau daerah tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa jenis-jenis layanan informasi itu meliputi informasi pendidikan, pekerjaan dan sosial budaya. Informasi tersebut disampaikan melalui ceramah umum, melalui format klasikal, dan penyediaan berbagai publikasi yang relevan.

9. Tahap-Tahap Proses Layanan Informasi

Tahapan layanan informasi menurut Tohirin antara lain:³³

- a. Perencanaan yang mencakup kegiatan: identifikasi kebutuhan informasi, menetapkan materi informasi, menetapkan subyek sasaran layanan, menetapkan nara sumber, menyiapkan prosedur, perangkat dan media layanan, menyiapkan kelengkapan administrasi.
- b. Pelaksanaan yang mencakup kegiatan: mengorganisasikan kegiatan layanan, mengaktifkan peserta layanan, mengoptimalkan penggunaan media.
- c. Evaluasi yang mencakup kegiatan: menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumeh evaluasi, mengaplikasikan instrumen evaluasi, mengolah hasil aplikasi instrumen.
- d. Analisis basil evaluasi yang mencakup kegiatan: menetapkan norma atau standar evalnasi, melakukan analisis, menafsirkan hasil analisis.
- e. Tindak lanjut yang mencakup kegiatan: menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak yang terkait, melaksanakan tindak lanjut.

³³ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di*, hlm. 152.

- f. Pelaporan yang mencakup kegiatan: menyusun laporan layanan informasi, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, mendokumentasikan laporan kegiatan.

Layanan informasi yang diberikan kepada siswa akan menjadi mudah penyampaiananya kalau ada teknik yang menyertainya,³⁴ salah satu teknik yang dipakai dalam memberikan layanan informasi adalah teknik *modelling*.

10. Teknik Modelling pada Layanan Bimbingan dan Konseling

a. Jenis-Jenis Teknik *Modelling*

Jenis-jenis teknik *modelling* menurut Gantina Komalasari antara lain *live model* seperti terapis, guru, anggota keluarga atau tokoh yang dikagumi dijadikan model oleh konseli.³⁵ *Symbolic model* seperti tokoh yang dilihat melalui film, video atau media lain. Serta *multiple model* seperti terjadi dalam kelompok, seorang anggota mengubah sikap dan mempelajari sikap baru setelah mengamati anggota lain bersikap.

Singgih Gunarsa berpendapat bahwa di dalam jenis-jenis *modelling* terdapat *live model* atau biasa disebut penokohan yang dijadikan model oleh pasien atau klien.³⁶ Penokohan simbolik (*symbolic model*) merupakan tokoh yang dilihat melalui film, video, atau media lain.³⁷ Penokohan ganda (*multiple model*) yang terjadi

³⁴ Hanung Sudibyo, Model Evaluasi Layanan Informasi Bimbingan dan Konseling Berbasis Context Input Process Product (CIPP). *Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1). 2013.

³⁵ Gantina Komalasari, dkk. *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: Indeks, 2011), hlm 179.

³⁶ Singgih Gunarsa, D. *Psikologi Praktis*. (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2004), hlm 223.

³⁷ Lilik Nofijantie dan Rukfatul Fitriah. Terapi Behaviour melalui Strategi Modeling Partisipan untuk Mengatasi Siswa yang tidak Berani Mengemukakan Pendapat di Kelas (Study kasus pada siswa 'X'di SMPN 1 Kokop Bangkalan). *Jurnal Kependidikan Islam*, 4(1), 2014. 125-148.

dalam kelompok, seorang anggota dan sesuatu kelompok mengubah sikap dan mempelajari sesuatu sikap baru, setelah mengamati bagaimana anggota lain dalam kelompoknya bersikap. Dalam kajian ini diberikan layanan informasi dengan teknik *modelling* simbolis, modelnya disajikan melalui material tertulis berupa rekaman audio atau video, film atau *slide* tentang berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling. Model-model simbolis dapat dikembangkan melalui format bimbingan klasikal.

Lebih lanjut Gantina Komalasari mengatakan *Modelling* merupakan bentuk belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menggeneralistis berbagai pengamatan sekaligus, melibatkan proses kognitif.³⁸

Sementara Soli Abimanyu dan Thayeb Manrihu menyebutkan teknik *modelling* adalah proses belajar melalui observasi tingkah laku dari seorang individu atau kelompok, sebagai model, berperan sebagai rangsangan bagi pikiran-pikiran, sikap-sikap, atau tingkah laku sebagai bagian dari individu yang lain yang mengobservasi model yang ditampilkan.³⁹

Berdasarkan pembahasan mengenai layanan informasi dan teknik *modeling* di atas, maka dapat dikatakan bahwa layanan informasi dengan teknik *modelling* adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa dengan bekal pengetahuan di bidang pendidikan sekolah, dan bidang pribadi-sosial sebagai pertimbangan, pengambilan keputusan dan merencanakan kehidupannya sendiri dengan melalui observasi tingkah laku dari seorang individu atau kelompok, sebagai model, dengan menambahkan mengurangi tingkah laku yang diamati untuk

³⁸ Gantina Komalasari, dkk. *Teori dan Teknik*, hlm 176.

³⁹ Soli Abimanyu dan Thayeb Manrihu, *Teknik dan Laboratorium Konseling*, (Jakarta: Depdiknas, 2006) hlm 256.

mengubah sikap dan tingkah laku menjadi baik, berdasarkan hukum Islam apabila modelnya Islam.

- b. Tujuan Teknik *Modelling* pada Layanan Bimbingan dan Konseling
Sofyan Willis mengemukakan teknik *modelling* memiliki tujuan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Untuk perolehan tingkah laku sosial yang lebih adaptif
- 2) Agar individu dapat belajar sendiri menunjukkan perbuatan yang dikehendaki tanpa harus belajar lewat *trial and error*
- 3) Membantu individu merespon hal-hal baru
- 4) Melaksanakan tekun respon-respon yang semula terhambat atau terhalang
- 5) Mengurangi respon-respon yang tidak layak

Menurut Gantina Komalasari tujuan dari teknik *modelling* yaitu: menghilangkan perilaku tertentu dan membentuk perilaku baru yang sesuai.⁴¹

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai tujuan layanan informasi dan tujuan teknik *modelling*, diambil garis merahnya bahwa tujuan dari layanan informasi dengan teknik *modelling* adalah membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal untuk membantu individu merespon hal-hal baru, melaksanakan respon-respon yang semula terhambat dan individu memperoleh tingkah laku sosial yang lebih adaptif, **dan sesuai agama Islam.**

- c. Tahap-Tahap Teknik *Modelling*

Dalam hal ini Sofyan Willis menyebutkan bahwa tahap-tahap *modelling* adalah:⁴²

⁴⁰ Ahmad Fauzan, *Model-Model Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 56.

⁴¹ Sofyan Willis, S, *Teori dan Praktek Konseling Individual*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 78 .

⁴² Gantina Komalasari dkk. *Teori dan Teknik*, hlm 178-179.

- 1) Menetapkan bentuk penokohan, seperti *live model*, *symbolic model*, *multiple model*.
- 2) Pada *symbolic model*, tentukan video yang akan diperlihatkan pada siswa.
- 3) Kompleksitas perilaku yang dimodelkan harus sesuai yang sebenarnya.
- 4) Kombinasikan modeling dengan aturan, intruksi, dan penguatan.
- 5) Pada saat siswa memperhatikan penampilan tokoh, berikan penguatan alamiah.
- 6) Bila mungkin buat desain pelatihan untuk konseli menirukan model secara tepat, sehingga akan mengarahkan siswa pada penguatan alamiah. Bila tidak maka buat perencanaan pemberian penguatan untuk setiap peniruan tingkah laku yang tepat. Bila perilaku bersifat kompleks, maka kegiatan modeling dimulai dari yang paling mudah ke yang paling sulit.
- 7) Skenario modeling harus bersikap realistik.
- 8) Melakukan modeling, film dipertontonkan menunjukkan perilaku yang menimbulkan rasa takut pada siswa (dengan sikap manis, perhatian, Bahasa yang lembut dan perilaku yang menyenangkan).

Tahapan pelaksanaan layanan informasi dengan teknik *modelling* dapat disimpulkan :

- 1) Perencanaan, yang mencakup kegiatan: menetapkan jenis modeling (*symbolic modeling*), menetapkan materi layanan informasi, menyiapkan perangkat serta media layanan (LCD dan Video), menetapkan kelengkapan administrasi siswa.
- 2) Pelaksanaan, yang mencakup kegiatan: mengorganisasikan kegiatan layanan, melakukan teknik modeling, mengkombinasikan kegiatan modeling dengan aturan, interaksi serta penguatan alamiah, dan mengoptimalkan penggunaan media.

- 3) Evaluasi, yang mencakup kegiatan: menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi.
- 4) Tindak lanjut, yang mencakup kegiatan: menetapkan jenis tindak lanjut.
- 5) Pelaporan, yang mencakup kegiatan: menyusun laporan layanan informasi.

Minat pada layanan bimbingan dan konseling adalah ketertarikan dengan diikuti rasa senang dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling, sehingga siswa mampu memahami potensi, mengembangkan kemampuan, memecahkan masalah kehidupannya dan memperoleh kepuasan dalam mencapai kebahagiaan.

Untuk meningkatkan minat siswa pada layanan bimbingan dan konseling khususnya bimbingan dan konseling Islam dapat menggunakan layanan informasi dengan teknik *modelling*. Karena layanan informasi bertujuan supaya siswa mengetahui cara menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya serta agar individu memahami berbagai informasi dengan segala seluk beluknya. Penguasaan akan berbagai informasi ini untuk mencegah timbulnya masalah, pemecahan suatu masalah, untuk memelihara dan mengembangkan potensi individu serta memungkinkan individu dapat membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya yang tidak terlepas dari nilai-nilai agama khususnya agama Islam.

C. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, Teknik *modelling* individu dapat mengamati secara langsung seseorang yang dijadikan model baik *live* model maupun *symbolic* model, sehingga individu bisa dengan cepat memahami perilaku yang ingin diubah dan bisa mendapatkan perilaku

yang lebih efektif.⁴³ Kedua, Teknik modeling, jika model kurang bisa memerankan tingkah laku yang diharapkan, maka tujuan tingkah laku yang didapat individu bisa jadi kurang tepat. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka di bawah ini beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan:

1. Bagi siswa, hendaknya bersedia dan lebih aktif dalam memanfaatkan fungsi bimbingan konseling di sekolah terutama layanan-layanan yang ada.
2. Bagi guru pembimbing lebih mengefektifkan pendekatan dengan menggunakan layanan informasi dengan teknik *modelling* untuk meningkatkan minat siswa pada layanan bimbingan dan konseling.
3. Bagi guru pembimbing hendaknya lebih sering memberikan layanan yang efektif dan intensif kepada siswa
4. Bagi sekolah, hendaknya memberikan jam khusus untuk kegiatan bimbingan dan konseling serta memberikan kelengkapan fasilitas ruang bimbingan konseling beserta jadwal pelaksanaan bimbingan dan konseling agar dapat lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hallen. (2005). *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Press.
- Abimanyu, Soli dan Thayeb Manrihu. (2006). *Teknik dan Laboratorium Konseling*. Jakarta: Depdiknas.
- Adji, S. (1983). *Modifikasi Perilaku: Penerapan Sehari-hari dan Penerapan Profesional*, Yogyakarta.
- Ahmadi, Abu dan Ahmad Rohani. (1991). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Cet. 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aqib, Zainal. (2012). *Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Surabaya: Yrama Widya.
- Hurlock, Elizabeth, B. (2009). *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga.

⁴³ Adji, S, *Modifikasi Perilaku: Penerapan Sehari-hari dan Penerapan Profesional*, (Yogyakarta, 1983), hlm 87.

- Faqih, Aunur Rahim. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UII Press.
- Fauzan, Ahmad. (2009). *Model-Model Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gunarsa, D., Singgih. (2004). *Psikologi Praktis*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Jefkins, Frank. (1994). *Periklanan*, Jakarta: Erlangga.
- Kamaluddin. (2011). Bimbingan dan konseling sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(4), 447-454.
- Komalasari, Gantina dkk. (2011). *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta: Indeks.
- Makmun, Khairani. (2013). *Psikologi Belajar*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Muhaimin. (2004). *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Surabaya: Pustaka Belajar.
- Nofijantie, Lilik dan Rukfatul Fitriah. (2014). Terapi Behaviour melalui Strategi Modeling Partisipasi untuk Mengatasi Siswa yang tidak Berani Mengemukakan Pendapat di Kelas (Study kasus pada siswa 'X' di SMPN 1 Kokop Bangkalan). *Jurnal Kependidikan Islam*, 4(1).
- Nurihsan, Achmad Juntika. (2006). *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Bandung: Refika Aditama.
- Prayitno dan Erman Amti. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudibyo, Hanung. (2013). Model Evaluasi Layanan Informasi Bimbingan Dan Konseling Berbasis Context Input Process Product (CIPP). *Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1).
- Sudrajat, Ajat. (2011). Mengapa pendidikan karakter?. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1).
- Sugiono, (2011). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah Pedoman Teoritis dan Praktis Bagi Konselor Sekolah*, Semarang : Widya Karya.
- Sukardi, Dewa Ketut. (2008). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surya, Hendra. (2003). *Teori-Teori Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Bani

- Tohirin. (2011). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Willis, S, Sofyan. (2007). *Teori dan Praktek Konseling Individual*, Jakarta: Rineka Cipta.
- WS, Winkel dan Sri Hastuti. (2004). *Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan*, Yogyakarta : Media Abadi.
- Yusuf, Syamsu. (2009). *Program Bimbingan & Konseling di Sekolah*, Bandung: Rizqi Press.
- Yusuf, Syamsu., LN dan A. Juntika Nurihsan. (2010). *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

PEMBELAJARAN IPA-FISIKA BERBASIS *PROBLEM SOLVING*

Indah Sukmawati¹
I.Sukmawati42@yahoo.com

Abstrak

Berpikir kritis merupakan faktor penting dalam pembelajaran pada semua mata pelajaran. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial dalam semua aspek kehidupan. Kemampuan berpikir kritis bukan warisan dari orang tua atau bawaan sejak lahir, tetapi sesuatu yang perlu pembiasaan, yaitu dilatih secara bertahap dan berkesinambungan. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang autentik, esensial, dapat dilogika dan dinalar dengan akal sehat serta merupakan ilmu yang sangat mendasar. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran kooperatif, pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk berpartisipasi aktif, baik secara individu maupun kelompok dengan menggunakan suatu permasalahan sebagai titik awal disetiap pembelajarannya. Seorang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar dituntut untuk menjadikan peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan bisa memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Penerapan model pembelajaran *problem solving* pada mata pelajaran IPA-fisika tingkat SMP, diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritisnya, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan pada kehidupan nyata di masyarakat setelah lulus sekolah.

Kata Kunci: Berpikir kritis, Pembelajaran *problem solving*.

A. PENDAHULUAN

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Berpikir kritis merupakan kompetensi penting yang dapat memainkan peran penting dalam membentuk siswa cara belajar dan berpikir dalam era informasi sekarang ini. Berpikir kritis dan kreatif merupakan keterampilan seumur hidup, keterampilan dengan aplikasi yang luas baik di dalam maupun di luar

¹ SMP N 3 Pemalang

kelas.² Kemampuan berpikir kritis tidak hanya diperlukan dalam dunia pendidikan, namun sangat bermanfaat ketika seseorang terjun langsung di masyarakat atau dihadapkan pada suatu persoalan yang rumit.

Jadi, kebiasaan berpikir kritis akan menjadikan seorang peserta didik mampu menyelesaikan masalah dengan mudah bahkan peserta didik tersebut dapat sebagai *problem solver* bagi orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang mampu memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya berarti dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat hidup sejahtera.

Strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah (*problem solving*) serta menciptakan dialogis lingkungan untuk pemecahan masalah dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik keperawatan harus dikembangkan di kelas.³ Tentu saja pernyataan tersebut tidak hanya berlaku untuk sekolah perawat, tetapi berlaku juga untuk semua peserta didik di berbagai macam sekolah. Tentunya semua ini berlaku untuk semua guru mata pelajaran di sekolah menengah semuanya diharapkan melakukan proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk berperan aktif, sehingga dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada diri peserta didik.

Berdasarkan hal di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah model pembelajaran IPA-fisika berbasis *problem solving* dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik tingkat SMP?. Tujuan penelitian ini adalah Menerapkan model pembelajaran fisika berbasis *problem solving* yang dapat mengkondisikan peserta didik berpartisipasi aktif guna melakukan pembiasaan berpikir kritis pada peserta didik tingkat SMP. Manfaat dari penelitian ini adalah dengan adanya pembiasaan pemecahan masalah (*problem solving*), di setiap pembelajaran fisika, itu berarti bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik diasah. Dengan demikian

² Huda Umar Alwehaibi, Novel program to promote critical thinking among higher education students: Empirical study from Saudi Arabia. *Asian Social Science* 8.11, 2012. hlm. 193.

³ Dong-Hee. (2012). *Improvement in problem solving and critical thinking among Korean nursing students over an academic year*, (International Research Journals, Vol. 2(8), pp. 257-265, Educational ISSN: 2026 - 6332 August 2012), hlm, 257-265

diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan pada kehidupan nyata di masyarakat setelah peserta didik tersebut lulus sekolah/madrasah.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Fisika

Pada hakekatnya suatu ilmu pengetahuan terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seorang dapat memahami suatu gejala alam yang ada di sekitarnya, dengan ilmu pengetahuan juga memungkinkan seorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman secara langsung, yaitu dengan melakukan eksperimen atau melakukan percobaan sendiri, dan juga dapat diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan melalui orang lain yang sampai kepada kita dengan perantara berbagai macam media baik cetak maupun elektronik. Memverifikasi kebenaran ilmu pengetahuan fisika yang telah disampaikan oleh guru fisika di dalam kelas, kita dapat melakukan ujicoba yang biasa disebut dengan istilah praktikum fisika. Untuk melakukan praktikum ini kita memerlukan suatu tempat yang biasa disebut laboratorium.

Menurut Gerthsen dalam Druxes menyatakan bahwa fisika adalah suatu teori yang menerangkan gejala-gejala alam sesederhana mungkin dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataan-kenyataan persyaratan untuk pemecahannya yaitu dengan mengamati gejala-gejala alam tersebut.⁴ Sedangkan Shipam & Wilson menyatakan bahwa fisika adalah pengetahuan yang terorganisir dengan lingkungan fisik dan perlu digunakan metode untuk mendapatkan ilmu fisika tersebut.⁵ Sementara

⁴ Druxes, H et al, *Kompedium Diktatik Fisika*, (Bandung: CV Remaja Karya, 1986), hlm. 3.

⁵ Shipam, J.T. & Wilson, J.D. *Physical Science*. (Lexington D.C: Health and Company, 1990), hml. xvii

Mundilarto mengungkapkan bahwa fisika sebagai ilmu dasar memiliki karakteristik yang mencakup fakta, konsep, prinsip, postulat dan teori serta metodologi keilmuan.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fisika merupakan bagian dari sains, fisika merupakan ilmu pengetahuan yang lahir berdasarkan fakta-fakta peristiwa alam yang saling terkait satu sama lain, fisika juga merupakan hasil gagasan atau pemikiran yang logis oleh para ahli dan atau hasil eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan, sehingga fisika merupakan ilmu pengetahuan yang autentik, esensial, dapat dilogika dan dinalar dengan akal sehat serta merupakan ilmu yang sangat mendasar.

2. Pembelajaran Berbasis *Problem Solving*

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran kooperatif, pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk berpartisipasi aktif, baik secara individu maupun kelompok dengan menggunakan suatu permasalahan sebagai titik awal di setiap pembelajarannya. Bila seorang guru menggunakan pemecahan masalah sebagai model pembelajaran di sekolah, maka pembelajaran harus dimulai dari sesuatu permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang perlu dipecahkan atau dikaji. Pembelajaran fisika berbasis masalah diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

Dalam pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, jumlah siswa dalam satu kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik dalam satu kelas, setiap kelompok diberi masalah yang berbeda. Setiap peserta didik dalam satu kelompok bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan cara mengeluarkan ide-ide, gagasan, saran untuk didiskusikan dalam kelompoknya.

⁶ Mundilarto, *Penilaian hasil belajar fisika*. (Yogyakarta: P2IS, 2010), hlm. 4

Setiap peserta didik harus menghargai pendapat dari teman lain dalam satu kelompok. Metode ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk meleak teknologi informasi karena peserta didik di tuntut untuk mengerahkan segala kemampuannya dalam rangka pemecahan masalahnya.

3. Pengertian Berpikir Kritis

Menuru Lee dalam Marashi & Jafari meskipun konsensus mengenai definisi berpikir kritis saat ini tidak ada, orang sering mengutip empat kategori terakhir dari taksonomi Bloom pada tujuan pendidikan, yaitu aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi semua memerlukan pemikiran yang lebih tinggi sebagai ciri khas dari berpikir kritis.⁷ Sejalan dengan pendapat tersebut, Dimitriadou & Anastasiadou menyatakan bahwa pengembangan berpikir kritis merupakan bagian penting dari pendidikan, tetapi kita yakin bahwa *pre-service* guru dapat menentukan konsep *Critical Thinking* untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas, dengan keyakinan bahwa *Critical Thinking* dapat dipelajari, dikembangkan dan ditingkatkan.⁸

Pendapat tersebut diperkuat oleh Yildirim dalam Yildirim & Özkahraman yang menyatakan bahwa berpikir kritis adalah proses mencari, memperoleh, mengevaluasi, menganalisis, mensintesis dan konseptualisasi informasi sebagai panduan untuk mengembangkan pemikiran seseorang dengan kesadaran diri, dan kemampuan menggunakan informasi. Semua kemampuan yang dibutuhkan untuk berpikir kritis yang ideal dapat diidentifikasi dan kemudian digunakan sebagai sumber daya untuk mengajarkan keterampilan kepada peserta

⁷ Marashi, H & Jafari, R. *The Comparative Effect of Using Critical Thinking, Constructivist Learning, and a Combination of the Two Techniques on EFL Learners' Writing*, (The Iranian EFL Journal Vol. 8 Issue 4, August 2012), hlm. 208.

⁸ Dimitriadou, A & Anastasiadou, D. *What does Critical Thinking mean?* (A statistical data analysis of pre-service teachers' defining statements, Vol. 1 No. 7, Special Issue –June 2011), hlm. 73.

didik, serta untuk membantu meningkatkan kemampuan mereka.⁹
Menurut Nasser & Romanowski adalah:

*Critical thinking skills are not innate but are taught and fostered formally and informally in schools and universities through teaching practices that instill a critical and transformative perspective.*¹⁰

Jadi, keterampilan berpikir kritis bukan bawaan, tetapi perlu diajarkan dan dapat dipupuk secara formal dan informal di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi melalui praktek-praktek pengajaran yang menanamkan perspektif kritis dan transformatif. Menurut Azizmalayeri, kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan metode pengajaran inkuiri terbimbing, metode pengajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis secara signifikan pada peserta didik kelas XI SMA.¹¹

Berpikir kritis merupakan hirarki, di mana seorang siswa yang melakukan berpikir kritis khususnya dalam pelajaran fisika melalui tahap demi tahap, hal ini senada dengan Carind & Sund yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis meliputi:

- a. mengamati atau mengobservasi: dapat menuliskan hasil pengamatan secara kualitatif maupun kuantitatif,
- b. mengklasifikasi: mampu mengklasifikasikan informasi, ide dan data yang tersedia,
- c. mengukur: dapat menggunakan alat ukur dengan benar dan memilih satuan yang sesuai,

⁹ Özkahraman, S & Yildirim, B. *An Overview of Critical Thinking in Nursing and Education, American International*, (Journal of Contemporary Research, Vol. 1 No. p 2; September 2011), hlm. 191

¹⁰ Nasser, R & Romanowski, M. *Critical Thinking and Qatar's Education For a New Era, Negotiating Possibilities*, (International Journal of Critical Pedagogy, Vol 4 (1), 2012), hlm. 118-134.

¹¹ Azizmalayeri, K, et al. *The development of critical thinking skills in physics and sociology curricula*, (Life Science Journal, (3) 2012), hlm. 1991.

- d. mengumpulkan dan mengorganisir data: mampu mengumpulkan dan mengelompokkan data ke dalam bentuk tabel dengan benar,
- e. menginferensi atau menginterpretasikan: mampu membuat kesimpulan atau penilaian sementara, menjelaskan kejadian dalam tabel, diagram maupun grafik,
- f. menghipotesis atau memprediksi: membuat sebuah hipotesis ketika diberi suatu permasalahan, dapat menyajikan prediksi sederhana,
- g. merancang percobaan: mampu merancang suatu percobaan atau eksperimen untuk memecahkan suatu masalah,
- h. mengoperasionalkan suatu definisi,
- i. memformulasikan suatu model: mampu mengkonversi suatu model ke dalam bentuk persamaan.¹²

C. PEMBAHASAN

Berpikir kritis adalah awal dari kesuksesan pribadi, kemajuan dan pembangunan nasional, oleh karena itu harus ditangani dengan serius dan harus melibatkan semua *stake holder* yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Bankole menyarankan agar:

1. Keterampilan berpikir kritis sebaiknya diperkenalkan sebagai mata pelajaran tersendiri atau sebagai mata kuliah di perguruan tinggi,
2. Guru harus didorong untuk bekerja lebih di dalam kelas, dari tingkat kognisi yang rendah ke tingkat kognisi yang lebih tinggi,
3. Guru harus mengadopsi metode pengajaran yang sesuai, seperti metode Sokrates, metode *Inquiry*, pemecahan masalah dll, metode yang konsisten dengan perkembangan keterampilan berpikir kritis pada siswa,
4. Antara guru dan siswa keduanya harus menyerap sikap empati dan kerendahan hati intelektual yang berpuncak pada pandangan luas yang dibutuhkan untuk pengembangan keterampilan,

¹² Carind, A dan Robert, B Sund, *Teaching Science Trought Discovery*, (USA: Merrill Publishing Company, 1970), hal. 147.

5. peserta didik harus didorong untuk menerapkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.¹³

Pada tingkat SMP, materi IPA-fisika merupakan pelajaran yang sangat esensial, karena materi fisika mendasari teknologi-teknologi peralatan yang berada disekitar kita. Pelajaran fisika juga merupakan wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi pelajaran fisika merupakan bekal bagi peserta didik sebagai prasyarat untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu dan teknologi. Fisika merupakan salah satu disiplin ilmu yang merupakan dasar dari kemajuan ilmu dan teknologi, yang ikut andil dalam kemajuan dan perkembangan zaman.

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sementara itu fisika juga merupakan pelajaran yang mendasari teknologi suatu peralatan yang ada disekitar kita. Oleh karena itu sangat perlu siswa untuk dilatih berpikir kritis, hal ini merupakan jembatan antara permasalahan di kelas dengan permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Keterampilan berpikir kritis sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari saat peserta didik terjun di dunia nanti setelah lulus sekolah, sehingga tidaklah berlebihan jika selama di sekolah siswa dilatih untuk berpikir kritis.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk hidup bermasyarakat dengan layak, agar dapat hidup dengan layak, peserta didik harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Pembelajaran di sekolah seharusnya dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman dan pemecahan masalah, hal ini dapat dilakukan dengan pembiasaan berpikir kritis, sehingga siswa mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu

¹³ Bonkale, S. *Developing Critical Thinking Skills in Students, A Mandate for Higher Education in Nigeria*, (European Journal Of Educationan Research Vol. 1, (2) p.155-161, ISSN 2165-8714 Copyright, 2012 EUJER, 2012), hlm. 160-161.

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Peserta didik tidak hanya memahami pelajaran di sekolah saja, tetapi juga harus memahami aktivitas sosial di sekitarnya yang menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan dan budi pekerti,¹⁴ yang semuanya itu menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, untuk itu peserta didik perlu diberi pembiasaan berpikir kritis selama di sekolah yang terintegrasi dalam setiap pelajaran, terutama pembelajaran IPA-fisika.

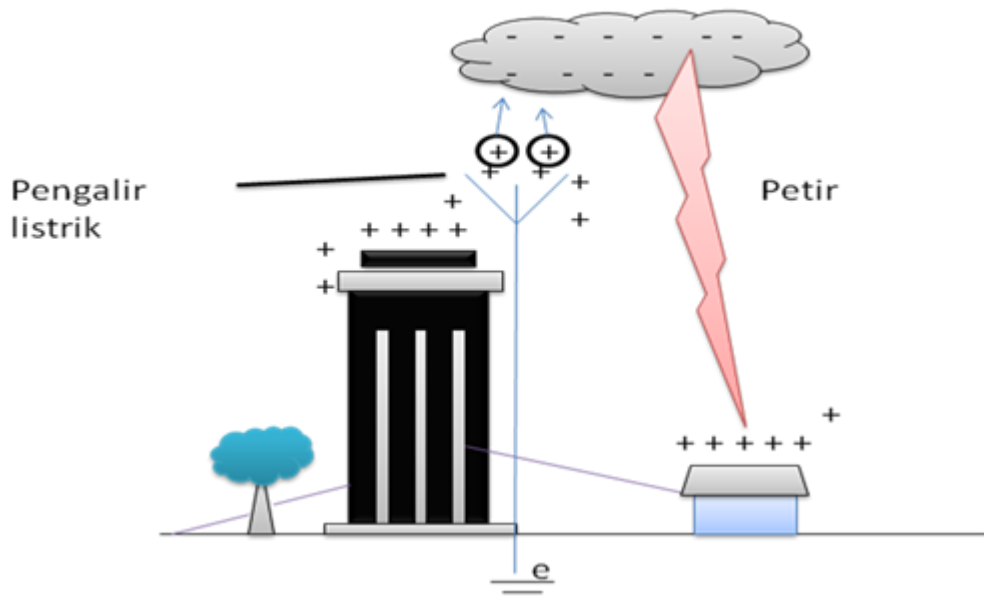
Ada beberapa cara pembiasaan berpikir kritis dalam pelajaran fisika, diantaranya adalah mengkaitkan pokok bahasan dalam pelajaran fisika dengan gejala alam atau kejadian-kajadian/peristiwa alam nyata yang ada disekitar kita. Sebagai contoh materi fisika dengan Pokok Bahasan Listrik Statis, mengapa tarjadi Guntur? Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan, sehingga tidak ada misteri yang berkaitan dengan fenomena disekitar kita. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan meteri fisika pokok bahasan Listrik Statis, dalam pokok bahasan ini dinyatakan bahwa; Guntur adalah pemuain yang mendadak yang menghasilkan suara yang menggelegar.

Petir dapat terjadi dari awan ke bumi,dari bumi ke awan atau dari awan ke awan.¹⁵ Orang yang menyatakan bahwa petir merupakan listrik statis Benjamin Franklin pada tahun 1700. Ia mengungkapkan bahwa listrik statis dapat bergerak cepat pada bahan-bahan tertentu dan permukaan runcing, karena permukaan runcing lebih banyak menarik electron dari pada permukaan datar. Cara untuk menghindari bahaya petir diantaranya jangan pergi ke tanah lapang, kemudian untuk gedung yang tinggi perlu dipasang penangkal petir yang terbuat dari tembaga dan ditancapkan ke dalam tanah. Adapun tembaga yang berujung runcing di pasang pada ujung bangunan.

¹⁴ Moh. Fachri, Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Bangsa. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 1.1. 2014.

¹⁵ Deni Septiadi, Safwan Hadi, dan Bayong Tjasyono. "Karakteristik Petir dari Awan ke Bumi dan Hubungannya dengan Curah Hujan." *Jurnal Sains Dirgantara* 8.2. 2011.

Gambar prinsip kerja penangkal petir



Gambar 1
Prinsip Kerja Penangkal Petir

Berpikir kritis perlu diajarkan pada semua disiplin ilmu dan semua tingkatan sekolah, terutama sekolah menengah, baik secara independen maupun secara terintegrasi dalam setiap pelajaran atau disiplin ilmu, hal ini demi meningkatkan efektivitas belajar dan sekaligus membekali siswa sebelum terjun di dunia nyata setelah lulus nanti. Mengapa Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena menurut Piaget dalam Mundilarto menyatakan bahwa perkembangan kognitif siswa sekolah menengah telah berada pada tahap berpikir hipotesis, proporsional, refleksi, logis, sintesis, imajinatif, kombinasional, etis dan verbal serta memahami operasi-operasi yang bersifat abstrak.¹⁶

¹⁶ Mundilarto, *Kapita Selekta Pendidikan Fisika*, (Yogyakarta: FMIPA UNY, 2002), hlm, 68.

D. PENUTUP

Kemampuan berpikir kritis bukan warisan dari orang tua atau bawaan sejak lahir, tetapi berpikir kritis merupakan sesuatu yang perlu dilatih secara bertahap dan berkesinambungan. Kemampuan berpikir kritis ini tidak hanya diperlukan dalam dunia pendidikan, tetapi kemampuan berpikir kritis akan sangat bermanfaat ketika seseorang terjun langsung di masyarakat atau dihadapkan pada suatu persoalan yang rumit yang ada dalam kehidupan nyata. Pembiasaan berpikir kritis di sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran fisika dengan mengedepankan *problem solving*. Jadi, kebiasaan seseorang menyelesaikan suatu masalah dapat mengasah kemampuan berpikir kritisnya. Dengan demikian guru IPA-fisika di SMP khususnya kelas IX diharapkan menggunakan model pembelajaran *problem solving*, yaitu suatu model pembelajaran yang mampu menciptakan situasi dan kondisi yang membawa peserta didik ikut serta berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan peristiwa disekitar kita. Selain itu pembelajaran *problem solving* dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizmalayeri, K, et al. 2012 *The development of critical thinking skills in physics and sociology curricula*, Life Science Journal9, (3).
- Bonkale, S. 2012. *Developing Critical Thinking Skills in Students, A Mandate for Higher Education in Nigeria*, European Journal Of Educationan Research Vol. 1, (2) p.155-161, ISSN 2165-8714 EUJER.Hal.161-162. Copyright,
- Carind, A dan Robert, B Sund. 1970. *Teaching Science Trought Discovery*, USA: Merrill Publishing Company.

- Dimitriadou, A & Anastasiadou, D. 2011. *What does Critical Thinking mean?*. A statistical data analysis of pre-service teachers' defining statements, Vol. 1 No. 7 [Special Issue –June 2011].
- Dong-Hee. 2012. Improvement in problem solving and critical thinking among Korean nursing students over an academic year, *International Research Journals*, Vol. 2(8), pp. 257-265, Educational ISSN: 2026 - 6332 August 2012.
- Druxes, H, et al. 1986. *KompediumDiktaktikFisika*, CV RemajaKarya, Bandung.
- Fachri, M. (2014). Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Bangsa. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Marashi, H & Jafari, R. 2012. *The Comparative Effect of Using Critical Thinking, Constructivist Learning, and a Combination of the Two Techniques on EFL Learners' Writing*, The Iranian EFL Journal Vol. 8 Issue 4, August 2012.
- Mundilarto, 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Fisika*, Yogyakarta, FMIPA UNY.
- , 2010. *Penilaian hasil belajar fisika*. Yogyakarta: pusat pengembangan Instruksional sains (P2IS),
- Nasser, R & Romanowski, M. 2012. *Critical Thinking and Qatar's Education For a New Era, Negotiating Possibilities*, International Journal of Critical Pedagogy, 2012.Vol 4 (1) pp 118-134,
- Nazari, O & Fahmi, M. 2012. *Practicing Action Research for Enhancing Critical Thinking*, *Journal of Science (JOS)* 84 Vol. 2, (1), Copyright © World Science Publisher, United States.
- Özkahraman, S & Yildirim, B. 2011. *An Overview of Critical Thinking in Nursing and Education*, American International Journal of Contemporary Research, 2011. Vol. 1 No. p 2; September
- Septiadi, D., Hadi, S., & Tjasyono, B. (2011). Karakteristik Petir dari Awan ke Bumi dan Hubungannya dengan Curah Hujan. *Jurnal Sains Dirgantara*, 8(2).
- Shipam, J, T. & Wilson, J.D. 1990. *Physical Science*. Lexington D.C: Health and Company.
- Umar, H. 2012. *Novel Program to Promote Critical Thingking among Higher Education*, Student, Empirical Study from Saudi Arabia, Publish by

Canadian Center Of Science and Education, , Asian Social science;
Educationol. Vol. 8, (11),ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025, 2012.

Yildirim, B & Özkahraman, S. 2011. *Critical Thinking in Nursing Process and Education*, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 (13), [Special Issue – September 2011].

MODEL PEMBELAJARAN RESPONSIF GENDER DI STIT PEMALANG

Amirul Bakhri, Srifaryati, Purnama Rozak¹

amirulbakhri@stipemalang.ac.id

Abstrak

Salah satu usaha untuk mengeliminir kesenjangan gender adalah melalui pendidikan responsif gender dengan menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender melalui model Pembelajaran responsif gender. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pematang dalam rangka memperkecil ketimpangan gender pada aspek pendidikan dituntut dan diharapkan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan model pembelajaran responsif gender yang memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan mahasiswa laki-laki dan perempuan secara seimbang dari aspek akses/peluang, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dalam pengembangan ini dilakukan beberapa uji coba yaitu uji coba skala kecil dengan lapangan terbatas, uji coba skala besar dengan lapangan diperluas dan uji validasi model, dengan hasil sebagai berikut: 1) Akses dalam belajar, prosentase menunjukkan responsif gender yakni di semester 1 A: 92,59%, di semester 1 B: 93,3%, di semester 3 A: 90,47%, di semester 3 B: 100%, di semester 5 A: 79,41% dan di semester 5 B: 96,15%. 2) Partisipasi dalam belajar, prosentase menunjukkan tidak responsif gender. Hal ini disebabkan karena mahasiswa dan mahasiswi yang tidak bekerjasama dalam tugas kelompok yang diberikan dosen. 3) Memiliki kontrol atas sumber pembelajaran, prosentase menunjukkan responsif gender yakni di semester 1 A: 62,96%, di semester 1 B: 80%, di semester 3 A: 85,72%, di semester 3 B: 68,18%, di semester 5 A: 67,65% dan di semester 5 B: 76,92%., dan 4) Manfaat dalam belajar, prosentase menunjukkan responsif gender dengan hasil 100% di semua tingkatan semester.

Kata kunci: Model pembelajaran, Pendidikan gender, Responsif gender.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini terjadi perubahan paradigma kehidupan menyangkut persoalan hubungan relasi, status, peran dan fungsi antara laki-laki dan

¹ STIT Pematang

perempuan atau gender. Salah satu isu gender yang disoroti adalah adanya ketimpangan gender dalam aspek pendidikan. Persoalan lainnya adalah adanya tantangan dan kebutuhan masyarakat pada aspek pendidikan yang responsif gender, di mana sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional² dan Departemen Agama selama ini masih banyak yang bias gender, baik dari aspek kurikulum atau bahan ajar, proses pembelajaran, tenaga pengajar, siswa, bantuan dana, dan lain-lain.³

Penelitian di bidang pendidikan menunjukkan terjadinya bias gender pada berbagai aspek seperti: materi pembelajaran/ bahan ajar, metode dan media pembelajaran, sikap dan perilaku dosen dalam pembelajaran terhadap siswa, hal tersebut dapat melestarikan ketimpangan gender di masyarakat. Salah satu usaha untuk mengeliminir kesenjangan gender adalah melalui pendidikan yang responsif gender, untuk membentuk karakter manusia (*human character building*). Maka para dosen harus menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dengan cara mengembangkan dan menerapkan model Pembelajaran responsif gender di kelas pada setiap proses belajar mengajar. Proses pembelajaran yang efektif untuk mentransfer dan mengembangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender harus didukung oleh komponen-komponen seperti: kebijakan pendidikan, sensitivitas gender dosen, kurikulum (tujuan pembelajaran, bahan ajar, metode/strategi pembelajaran dan evaluasi) serta fasilitas dan media pendidikan lainnya.

Sehubungan dengan tugas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang untuk memperkecil ketimpangan gender pada aspek pendidikan, STIT Pemalang dituntut dan diharapkan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan model Pembelajaran responsif gender. Oleh karena itu dosen STIT Pemalang harus memiliki sensitivitas gender yang tinggi dan

² Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Sekretariat Negara RI, 2003.

³ Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1981, hal. 14.

mempraktekkan model Pembelajaran responsif gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Persoalannya adalah tidak semua dosen memiliki tingkat sensitivitas gender yang tinggi dan pemahaman dosen yang masih beragam tentang gender serta dosen belum mengetahui model Pembelajaran responsif gender.

Oleh karena itu perlu dikembangkan model Pembelajaran responsif gender di STIT Pemalang. Pengembangan model Pembelajaran responsif gender yang dimaksud adalah pengembangan model atau pola belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas dengan memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan mahasiswa laki-laki dan perempuan secara seimbang dari aspek akses/peluang, partisipasi, kontrol dan manfaat.

B. PEMBAHASAN

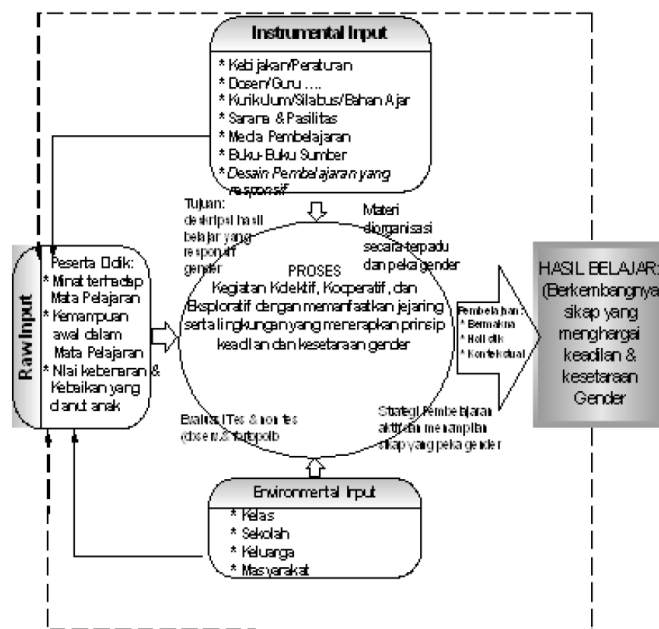
1. Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender

Pengembangan model pembelajaran adalah upaya mengembangkan seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran.⁴ Sehubungan dengan tugas dosen sebagai pengelola dan perencana pembelajaran, maka untuk itu dosen harus merancang dan mengembangkan model pembelajaran sebelum terjadi interaksi pembelajaran di kelas. Secara sistematis kerangka berpikir penelitian ini, dapat dilihat dalam bentuk bagan 1.

Model pembelajaran responsif gender dirancang kearah desain pembelajaran yang memiliki muatan nilai dan sikap yang peka terhadap keadilan dan kesetaraan gender (KKG). Untuk itu diperlukan dukungan berbagai unsur pendidikan seperti: Unsur Instrumental Input dalam pembelajaran meliputi; kebijakan/peraturan pendidikan, dosen, sarana dan fasilitas pembelajaran, kurikulum, buku sumber dan media pengajaran, sampai desain pembelajarannya. Pembelajaran responsif gender dirancang dengan parameter KKG yaitu dari segi akses,

⁴ Kerlinger, N. Fred, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hal. 56.

partisipasi, kontrol, dan penerimaan manfaat. Unsur Raw Input dalam pembelajaran adalah peserta didik, yaitu terkait dengan: minat anak terhadap mata pelajaran, kemampuan awal anak terhadap materi yang diberikan dan nilai-nilai yang dimiliki anak sebelumnya mengenai kebenaran dan kebaikan.



Bagan 1.

Kerangka berpikir penelitian ini, dapat dilihat dalam bentuk

Hal ini menjadi pertimbangan dalam menganalisis, merencanakan dan menilai Pembelajaran responsif gender. Unsur Environmental Input dalam pembelajaran meliputi: lingkungan kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat sekitar peserta didik.⁵ Ke tiga unsur tersebut diimplementasikan melalui model Pembelajaran responsif gender dengan proses kolektif, kooperatif dan eksploratif⁶ sehingga diperoleh hasil

⁵ Hartati, Netty, *Metodologi Penelitian Berwawasan Gender. Dalam Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hal. 47.

⁶ Fakhri Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 39.

belajar yang mengembangkan sikap dan menghargai keadilan dan kesetaraan gender.

2. Studi Pendahuluan Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender

Sebagai langkah awal untuk pengembangan model Pembelajaran responsif gender, perlu upaya mencari data awal proses Pembelajaran responsif gender yang dialami mahasiswa/mahasiswi STIT Pemalang melalui parameter KKG yaitu dari segi akses, partisipasi, kontrol, dan penerimaan manfaat.

a. Akses dalam belajar

Data dari semester I, ada 53 orang mahasiswa-mahasiswi yakni $53 : 73 \times 100\% = 72,6\%$ menganggap bahwa mahasiswa-mahasiswi mempunyai akses yang sama dalam belajar di kelas. Ada 17 mahasiswa-mahasiswi yakni $17 : 73 \times 100\% = 23,3\%$ menganggap bahwa mahasiswa-mahasiswi masih belum seimbang dalam memperoleh akses dalam belajar baik mahasiswa maupun mahasiswi. Ada 2 mahasiswa yakni $2 : 73 \times 100\% = 2,7\%$ menganggap bahwa mahasiswa masih belum seimbang dalam memperoleh akses dalam belajar. Ada 1 mahasiswa yakni $1 : 73 \times 100\% = 1,4\%$ menganggap bahwa mahasiswi masih belum seimbang dalam memperoleh akses dalam belajar.

b. Partisipasi dalam belajar

Data dari semester I, ada 53 orang mahasiswa-mahasiswi yakni $53 : 73 \times 100\% = 72,7\%$ menganggap bahwa mahasiswa-mahasiswi mempunyai partisipasi yang sama dalam belajar di kelas terutama dalam mengerjakan tugas kelompok. Ada 4 mahasiswa-mahasiswi yakni $4 : 73 \times 100\% = 5,4\%$ menganggap bahwa mahasiswa-mahasiswi masih belum seimbang dalam partisipasi belajar di kelas, terutama yang mahasiswi karena tugas kelompok dilakukan oleh mahasiswa saja. Sedangkan ada 16 mahasiswa-mahasiswi yakni $16 :$

$73 \times 100\% = 21,9\%$ menganggap bahwa mahasiswa-mahasiswi masih belum seimbang dalam partisipasi belajar di kelas dengan alasan, semua yang mengerjakan tugas kelompok adalah yang mahasiswi.

c. Memiliki kontrol atas sumber pembelajaran

Data dari semester I, ada 64 orang mahasiswa-mahasiswi yakni $64 : 73 \times 100\% = 87,6\%$ menganggap bahwa mahasiswa-mahasiswi mempunyai akses sumber pembelajaran yang sama dalam belajar di kelas. Sedangkan ada 9 mahasiswa-mahasiswi yakni $9 : 73 \times 100\% = 12,4\%$ menganggap bahwa mahasiswa-mahasiswi masih belum seimbang dalam akses sumber belajar di kelas dengan alasan:

- 1) Sumber pembelajaran dari dosen yang susah untuk dicari
- 2) Sumber pembelajaran dari perpustakaan yang masih kurang memadai

d. Manfaat dalam belajar

Dari data di semester I, 73 mahasiswa-mahasiswi yakni $73 : 73 \times 100\% = 100\%$ menganggap bahwa semuanya menerima manfaat dari pembelajaran yang dilakukan dosen di dalam kelas.

3. Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender

Setelah melakukan observasi awal terhadap para mahasiswa-mahasiswi untuk mengetahui bias gender atau tidak dalam proses pembelajaran, selanjutnya perlu disusun indikator-indikator model Pembelajaran responsif gender yakni melalui perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan penutup proses pembelajaran dengan mencari data lewat para dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pematang.

NO	ASPEK-ASPEK MODEL PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN RESPONSIF GENDER	
1.	PERENCANAAN	Membuat perencanaan pembelajaran yang responsif gender secara tertulis
		Tujuan dirumuskan secara terpadu

			dan seimbang antara kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang mengacu pada hasil belajar yang responsif gender
			Materi dideskripsikan secara terpadu dan responsif gender
			Metode dan media dirancang dengan memperhatikan keadilan gender
			Evaluasi disusun secara responsif gender
2.	PROSES BELAJAR MENGAJAR	Tahap Pendahuluan	Mengucapkan salam Menyebutkan pokok bahasan Melakukan pre test Memotivasi belajar mahasiswa secara responsif gender
		Tahap Mengembangkan dan Menyampaikan materi	Mendemonstrasikan penguasaan materi ajar yang responsif gender Materi dijabarkan secara sistematis dari sederhana-komplek, mudah-rumit, dan konkrit-abstrak Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pembelajaran secara adil gender.
		Memilih& mengembangkan media pembelajaran	Menggunakan contoh dan gambar yang responsif gender Menggunakan Model asli yang responsif gender Menggunakan media cetak dan elektronik yang sesuai dengan kebutuhan gender

		Memilih sumber belajar (nara sumber, buku paket dan pelengkap, lingkungan, laboratorium, dll)	<p>Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan yang menggambarkan responsif gender</p> <p>Kesesuaian sumber belajar dengan perkembangan mahasiswa dengan memperhatikan kebutuhan dan keadilan gender</p> <p>Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang responsif gender yang disampaikan</p>
		Menentukan jenis kegiatan pembelajaran (penjelasan dosen, observasi, diskusi, belajar kelompok, eksperimen, membaca, demonstrasi, dll)	<p>Sesuai tujuan yang menggambarkan responsif gender</p> <p>Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender</p> <p>Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mahasiswa secara gender</p> <p>Melibatkan mahasiswa secara adil gender</p>
		Menentukan cara-cara pengorganisasian agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran	<p>Pengaturan pengorganisasian individu, kelompok(klasikal) dengan memperhatikan kebutuhan gender</p> <p>Penyebaran tugas dengan memperhatikan kebutuhan dan keadilan gender</p> <p>Penjelasan alur dan cara kerja dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender</p> <p>Kesempatan bagi mahasiswa untuk mendiskusikan hasil/tugas</p>
		Menentukan prosedur dan	Prosedur penilaian awal, tengah dan

		jenis penilaian	akhir Jenis penilaian lisan, tulisan dan perbuatan
3.	KEGIATAN PENUTUP		Merangkum pokok bahasan dan melakukan post tes atau memberi tugas Menyampaikan tema bahasan untuk pertemuan berikutnya Mengucapkan salam dan meninggalkan kelas

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Coba Model Skala Terbatas

Dari indikator-indikator model pengembangan Pembelajaran responsif gender yang telah disusun, kemudian perlu melakukan uji coba tahap awal dengan lapangan terbatas yakni di semester 1 B di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang. Hal ini dilakukan mencari data mahasiswa/mahasiswi STIT Pemalang dengan model Pembelajaran responsif gender dirancang melalui parameter KKG yaitu dari segi akses, partisipasi, kontrol, dan penerimaan manfaat.

a. Akses Dalam Belajar

Dalam hal ini, ada 28 mahasiswa dan mahasiswi yakni $28 : 30 \times 100\% = 93,3\%$ yang setuju agar dosen tidak membedakan mahasiswa-mahasiswi ketika sedang dalam pembelajaran diperkuliahan. Dari 28 mahasiswa dan mahasiswi ini merasa kecewa kalau dosen membedakan mahasiswa/mahasiswi di perkuliahan. Hanya ada 2 mahasiswi yang tidak setuju yakni $2 : 30 \times 100\% = 6,7\%$ yang setuju agar dibeda-bedakan di dalam kelas.

b. Partisipasi dalam belajar

Dalam hal ini, ada 6 mahasiswa-mahasiswi yakni $6 : 30 \times 100\% = 20\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa lah yang

mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 19 mahasiswa-mahasiswi yakni $19 : 30 \times 100\% = 63,3\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 5 orang mahasiswa-mahasiswi yakni $5 : 30 \times 100\% = 16,7\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa dan mahasiswi lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Walaupun sebenarnya 100% mahasiswa-mahasiswi sudah diberikan prosedur pengerjaan tugas oleh dosen dengan saling bekerjasama.

c. Memiliki kontrol atas sumber pembelajaran

Dalam hal ini, ada 24 mahasiswa-mahasiswi yakni $24 : 30 \times 100\% = 80\%$ menyatakan sumber pembelajaran yang disampaikan oleh dosen tidak membedakan gender. Hanya 6 mahasiswa-mahasiswi yakni $6 : 30 \times 100\% = 20\%$ yang menganggap sumber pembelajaran yang disampaikan oleh dosen masih membedakan gender yakni membedakan mahasiswa dan mahasiswi.

d. Manfaat dalam belajar

Dalam hal ini, 30 mahasiswa-mahasiswi yakni $30 : 30 \times 100\% = 100\%$ menganggap bahwa semua mahasiswa dan mahasiswi menerima manfaat dari pembelajaran yang dilakukan dosen di dalam kelas.

2. Uji Coba Model Dalam Skala Sedang

Dari uji coba model pengembangan pembelajaran responsif gender dalam skala terbatas, ditemukan bahwa model pembelajaran mengindikasikan responsif gender. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji coba model dalam skala terbatas di semester 1 B yakni segi akses pembelajaran, 93,3% yang setuju agar dosen tidak membedakan mahasiswa-mahasiswi ketika sedang dalam pembelajaran diperkuliahan. Untuk lebih menemukan hasil yang lebih valid, perlu mencoba melakukan uji coba dalam skala sedang yakni di kelas 1 A dan 3 A di

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang melalui parameter KKG yaitu dari segi akses, partisipasi, kontrol dan penerimaan manfaat.

a. Data Semester 1 A

1) Akses Dalam Belajar

Dalam hal ini, ada 25 mahasiswa dan mahasiswi yakni $25 : 27 \times 100\% = 92,59\%$ yang setuju agar dosen tidak membedakan mahasiswa-mahasiswi ketika sedang dalam pembelajaran diperkuliahan. Dari 27 mahasiswa dan mahasiswi ini merasa kecewa kalau dosen membedakan mahasiswa/mahasiswi di perkuliahan. Hanya ada 2 mahasiswi yang tidak setuju yakni $2 : 27 \times 100\% = 7,41\%$ yang setuju agar dibeda-bedakan di dalam kelas.

2) Partisipasi dalam belajar

Dalam hal ini, ada 8 mahasiswa-mahasiswi yakni $8 : 27 \times 100\% = 29,63\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 12 mahasiswa-mahasiswi yakni $12 : 27 \times 100\% = 44,44\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswi lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 7 orang mahasiswa-mahasiswi yakni $7 : 27 \times 100\% = 25,93\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa dan mahasiswi lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Walaupun sebenarnya 100% mahasiswa-mahasiswi sudah diberikan prosedur pengerjaan tugas oleh dosen dengan saling bekerjasama.

3) Memiliki kontrol atas sumber pembelajaran

Dalam hal ini, ada 24 mahasiswa-mahasiswi yakni $17 : 27 \times 100\% = 62,96\%$ menyatakan sumber pembelajaran yang disampaikan oleh dosen tidak membedakan gender. Hanya 10 mahasiswa-mahasiswi yakni $10 : 27 \times 100\% = 37,04\%$ yang menganggap sumber pembelajaran yang disampaikan oleh

dosen masih membedakan gender yakni membedakan mahasiswa dan mahasiswi.

4) Manfaat dalam belajar

Dalam hal ini, 27 mahasiswa-mahasiswi yakni $27 : 27 \times 100\% = 100\%$ menganggap bahwa semua mahasiswa dan mahasiswi menerima manfaat dari pembelajaran yang dilakukan dosen di dalam kelas.

b. Data Semester 3 A

1) Akses Dalam Belajar

Dalam hal ini, ada 19 mahasiswa dan mahasiswi yakni $19 : 21 \times 100\% = 90,47\%$ yang setuju agar dosen tidak membedakan mahasiswa-mahasiswi ketika sedang dalam pembelajaran diperkuliahan. Dari 21 mahasiswa dan mahasiswi ini merasa kecewa kalau dosen membedakan mahasiswa/mahasiswi di perkuliahan. Hanya ada 2 mahasiswi yang tidak setuju yakni $2 : 21 \times 100\% = 9,53\%$ yang setuju agar dibeda-bedakan di dalam kelas.

2) Partisipasi dalam belajar

Dalam hal ini, ada 1 mahasiswa yakni $1 : 21 \times 100\% = 4,76\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 17 mahasiswa-mahasiswi yakni $17 : 21 \times 100\% = 80,95\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswi lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 3 orang mahasiswa-mahasiswi yakni $3 : 21 \times 100\% = 14,29\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa dan mahasiswi lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Walaupun sebenarnya 100% mahasiswa-mahasiswi sudah diberikan prosedur pengerjaan tugas oleh dosen dengan saling bekerjasama.

3) Memiliki kontrol atas sumber pembelajaran

Dalam hal ini, ada 18 mahasiswa-mahasiswi yakni $18 : 21 \times 100\% = 85,72\%$ menyatakan sumber pembelajaran yang disampaikan oleh dosen tidak membedakan gender. Hanya 3 mahasiswa-mahasiswi yakni $3 : 21 \times 100\% = 14,28\%$ yang menganggap sumber pembelajaran yang disampaikan oleh dosen masih membedakan gender yakni membedakan mahasiswa dan mahasiswi.

4) Manfaat dalam belajar

Dalam hal ini, 21 mahasiswa-mahasiswi yakni $21 : 21 \times 100\% = 100\%$ menganggap bahwa semua mahasiswa dan mahasiswi menerima manfaat dari pembelajaran yang dilakukan dosen di dalam kelas.

3. Uji Coba Model Dalam Skala Besar

Dari uji coba model pengembangan pembelajaran responsif gender dalam skala sedang, ditemukan bahwa model pembelajaran mengindikasikan responsif gender. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji coba model dalam skala sedang di semester 1 A dan 3 A yakni di semester 1 A, dari segi akses pembelajaran, 92,59% yang setuju agar dosen tidak membedakan mahasiswa-mahasiswi ketika sedang dalam pembelajaran diperkuliahan. Sementara itu, di semester 3 A dari segi akses pembelajaran, 90,47% yang setuju agar dosen tidak membedakan mahasiswa-mahasiswi ketika sedang dalam pembelajaran diperkuliahan. Untuk lebih menemukan hasil yang lebih valid, perlu mencoba melakukan uji coba dalam skala besar yakni di kelas 3 B, 5 A dan 5B di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang melalui parameter KKG yaitu dari segi akses, partisipasi, kontrol dan penerimaan manfaat.

a. Data Semester 3 B

1) Akses Dalam Belajar

Dalam hal ini, ada 22 mahasiswa dan mahasiswi yakni $22 : 22 \times 100\% = 100\%$ yang setuju agar dosen tidak membedakan mahasiswa-mahasiswi ketika sedang dalam pembelajaran diperkuliahan. Dari 22 mahasiswa dan mahasiswi ini merasa kecewa kalau dosen membedakan mahasiswa/mahasiswi di perkuliahan.

2) Partisipasi dalam belajar

Dalam hal ini, ada 4 mahasiswa yakni $4 : 22 \times 100\% = 18,18\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 15 mahasiswa-mahasiswi yakni $15 : 22 \times 100\% = 68,18\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswi lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 3 orang mahasiswa-mahasiswi yakni $3 : 22 \times 100\% = 13,64\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa dan mahasiswi lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Walaupun sebenarnya 100% mahasiswa-mahasiswi sudah diberikan prosedur pengerjaan tugas oleh dosen dengan saling bekerjasama.

3) Memiliki kontrol atas sumber pembelajaran

Dalam hal ini, ada 15 mahasiswa-mahasiswi yakni $15 : 22 \times 100\% = 68,18\%$ menyatakan sumber pembelajaran yang disampaikan oleh dosen tidak membedakan gender. Hanya 7 mahasiswa-mahasiswi yakni $7 : 22 \times 100\% = 31,82\%$ yang menganggap sumber pembelajaran yang disampaikan oleh dosen masih membedakan gender yakni membedakan mahasiswa dan mahasiswi.

4) Manfaat dalam belajar

Dalam hal ini, 22 mahasiswa-mahasiswi yakni $22 : 22 \times 100\% = 100\%$ menganggap bahwa semua mahasiswa dan

mahasiswi menerima manfaat dari pembelajaran yang dilakukan dosen di dalam kelas.

b. Data Semester 5 A

1) Akses Dalam Belajar

Dalam hal ini, ada 27 mahasiswa dan mahasiswi yakni $27 : 34 \times 100\% = 79,41\%$ yang setuju agar dosen tidak membedakan mahasiswa-mahasiswi ketika sedang dalam pembelajaran diperkuliahan. Dari 34 mahasiswa dan mahasiswi ini merasa kecewa kalau dosen membedakan mahasiswa/mahasiswi di perkuliahan. Hanya ada 7 mahasiswi yang tidak setuju yakni $7 : 34 \times 100\% = 20,59\%$ yang setuju agar dibeda-bedakan di dalam kelas.

2) Partisipasi dalam belajar

Dalam hal ini, ada 2 mahasiswa yakni $2 : 34 \times 100\% = 5,89\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 21 mahasiswa-mahasiswi yakni $21 : 34 \times 100\% = 61,76\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswi lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 11 orang mahasiswa-mahasiswi yakni $11 : 34 \times 100\% = 32,35\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa dan mahasiswi lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Walaupun sebenarnya 100% mahasiswa-mahasiswi sudah diberikan prosedur pengerjaan tugas oleh dosen dengan saling bekerjasama.

3) Memiliki kontrol atas sumber pembelajaran

Dalam hal ini, ada 23 mahasiswa-mahasiswi yakni $23 : 34 \times 100\% = 67,65\%$ menyatakan sumber pembelajaran yang disampaikan oleh dosen tidak membedakan gender. Hanya 3 mahasiswa-mahasiswi yakni $3 : 34 \times 100\% = 8,82\%$ yang menganggap sumber pembelajaran yang disampaikan oleh

dosen masih membedakan-gender yakni membedakan mahasiswa dan mahasiswi.

4) Manfaat dalam belajar

Dalam hal ini, 34 mahasiswa-mahasiswi yakni $34 : 34 \times 100\% = 100\%$ menganggap bahwa semua mahasiswa dan mahasiswi menerima manfaat dari pembelajaran yang dilakukan dosen di dalam kelas.

c. Data Semester 5 B

1) Akses Dalam Belajar

Dalam hal ini, ada 25 mahasiswa dan mahasiswi yakni $25 : 26 \times 100\% = 96,15\%$ yang setuju agar dosen tidak membedakan mahasiswa-mahasiswi ketika sedang dalam pembelajaran diperkuliahan. Dari 25 mahasiswa dan mahasiswi ini merasa kecewa kalau dosen membedakan mahasiswa/mahasiswi di perkuliahan. Hanya ada 1 mahasiswi yang tidak setuju yakni $1 : 26 \times 100\% = 3,85\%$ yang setuju agar dibeda-bedakan di dalam kelas.

2) Partisipasi dalam belajar

Dalam hal ini, ada 6 mahasiswa yakni $6 : 26 \times 100\% = 23,08\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 18 mahasiswa-mahasiswi yakni $18 : 26 \times 100\% = 69,23\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswi lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ada 2 orang mahasiswa-mahasiswi yakni $2 : 26 \times 100\% = 7,69\%$ dalam proses perkuliahan, mahasiswa dan mahasiswi lah yang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Walaupun sebenarnya 100% mahasiswa-mahasiswi sudah diberikan prosedur pengerjaan tugas oleh dosen dengan saling bekerjasama.

3) Memiliki kontrol atas sumber pembelajaran

Dalam hal ini, ada 20 mahasiswa-mahasiswi yakni $20 : 26 \times 100\% = 76,92\%$ menyatakan sumber pembelajaran yang disampaikan oleh dosen tidak membedakan gender. Hanya 6 mahasiswa-mahasiswi yakni $6 : 26 \times 100\% = 23,08\%$ yang menganggap sumber pembelajaran yang disampaikan oleh dosen masih membedakan gender yakni membedakan mahasiswa dan mahasiswi.

4) Manfaat dalam belajar

Dalam hal ini, 26 mahasiswa-mahasiswi yakni $26 : 26 \times 100\% = 100\%$ menganggap bahwa semua mahasiswa dan mahasiswi menerima manfaat dari pembelajaran yang dilakukan dosen di dalam kelas.

Berikut ini rangkuman hasil dari model pengembangan responsif gender di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang:

Tabel 1. Rangkuman Hasil Model Pengembangan Responsif Gender dalam Hal Akses dalam Belajar

Semester	Akses dalam belajar	
	Responsif Gender	Tidak Responsif Gender
1 A	92,59%	7,41%
1 B	93,3%	6,7%
3 A	90,47%	9,53%
3 B	100%	0%
5 A	79,41%	20,59%
5 B	96,15%	3,85%

Tabel 2. Rangkuman Hasil Model Pengembangan Responsif Gender dalam Hal Partisipasi dalam Belajar

Semester	Partisipasi dalam belajar	
	Responsif Gender	Tidak Responsif Gender
1 A	25,93%	$29,63\% + 44,44\% = 74,07\%$
1 B	16,7%	$20\% + 63,3\% = 83,3\%$
3 A	14,29%	$4,76\% + 80,95\% = 85,71\%$
3 B	13,64%	$18,18\% + 68,18\% = 86,36\%$
5 A	32,35%	$5,89\% + 61,76\% = 67,65\%$
5 B	7,69%	$23,08\% + 69,23\% = 92,31\%$

Tabel 3. Rangkuman Hasil Model Pengembangan Responsif Gender dalam Hal Memiliki Kontrol atas Sumber Pembelajaran

Semester	Memiliki kontrol atas sumber pembelajaran	
	Responsif Gender	Tidak Responsif Gender
1 A	62,96%	37,04%
1 B	80%	20%
3 A	85,72%	14,28%
3 B	68,18%	31,82%
5 A	67,65%	32,35%
5 B	76,92%	23,08%

Tabel 4. Rangkuman Hasil Model Pengembangan Responsif Gender dalam Hal Manfaat dalam Belajar

Semester	Manfaat dalam belajar	
	Responsif Gender	Tidak Responsif Gender
1 A	100%	0%
1 B	100%	0%
3 A	100%	0%
3 B	100%	0%
5 A	100%	0%
5 B	100%	0%

Dari prosentase rangkuman hasil dari model pengembangan responsif gender di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang, didapatkan bahwa prosentase model pengembangan gender yang dilakukan sangat responsif gender. Meskipun ada kendala yang dihadapi oleh dosen antara lain dari segi partisipasi mahasiswa dan mahasiswi, dimana partisipasi mahasiswa dan mahasiswi terutama dalam hal pembuatan tugas kelompok atau tugas bersama. Misalnya di semester 1 A: $29,63\% + 44,44\% = 74,07\%$, hasil $29,63\%$ menunjukkan bahwa tugas makalah yang diberikan dosen hanya dikerjakan oleh mahasiswa saja. Sedangkan $44,44\%$ menunjukkan bahwa tugas makalah yang diberikan dosen hanya dikerjakan oleh mahasiswi saja. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para dosen untuk memberikan edukasi yang lebih agar pengerjaan tugas misalnya dengan tugas kelompok, agar dikerjakan dengan tanpa bias gender.

D. PENUTUP

Upaya untuk mengembangkan model Pembelajaran responsif gender sudah dilakukan oleh berbagai macam pihak terutama oleh pemerintah. Akan

tetapi realita yang terjadi masih dijumpai pendidikan yang bias gender. Dari upaya mengembangkan model pembelajaran responsif gender di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang ini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi pendidikan yang bias gender dengan menerapkan model Pembelajaran responsif gender. Model Pembelajaran responsif gender ini bisa dilakukan mulai dari: perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan penutupan pembelajaran yang dilakukan dengan responsif gender. Sehingga akan mengikis pembelajaran yang bias gender. Semoga penelitian ini bisa digunakan oleh berbagai kalangan untuk menerapkan model pengembangan Pembelajaran responsif gender di institusi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, (1981). *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Asriati Jamil, Amani Lubis, (2003). *Seks dan Gender*, Jakarta: PSW. UIN Syarif.
- Bashin, Kamla. (1996). *What is Patriarchy. Terjemah "Menggugat Patriarki"* oleh Nur Katjasungkana. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Bappenas, (2000). *Rangkuman Pembangunan Berperspektif Gender*, Jakarta: Bappenas.
- Bogdan, Robert dan Biklen, (1982). *Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and Methods*. Boston, Allynand Bacon.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2003). *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Sekretariat Negara RI.
- Eichler, M. (1988). *Nonsexist Research Methods. A Practical Guide*. London. Allen & Unwin.
- Fakih Mansour, (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Yusuf, Amir, (1995). *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Hartati, Netty, (2003). *Metodologi Penelitian Berwawasan Gender. Dalam Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah.
- Hornby, A.S, (1965). *The Edvanded Leaner's Dictionary of Current English*. London.
- John M.Echols dan Hassan Shadily, (1996). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI. (2003). *Membangun Simpati Pilih*. Jakarta Kementrian PP.RI.
- Kerlinger, N. Fred, (1996). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lisa Tuttle, (1986). *Encyclopedia of femeinism*. London: Longman Group Limited.
- Mosse, Cleves, Yulia. (1993). *Gemder dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa.

PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANTARA HARAPAN DAN REALITAS

Muntoha¹

muntoha@stipemalang.ac.id

Abstrak

Sistem Pendidikan Nasional telah diatur secara lengkap dalam konstitusi negara, akan tetapi belum terimplementasi dengan baik dan sesuai secara penuh. Realitanya, perkembangan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal. Bentuk pendidikan ditinjau dari berbagai perspektif dari para ahli, yaitu ahli hukum, ahli pendidikan, dan juga dilihat dari perspektif perundang-undangan di Indonesia. Diantara tokoh atau ahli hukum yang dibahas ialah Mokhtar Kusumaatmaja, Satjipto Rahardjo, dan Romli Atmasastmita. Sedangkan di antara tokoh atau ahli pendidikan yang dibahas ialah Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Maskawaih, dan Ki Hajar Dewantara. Adapun Perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini ialah Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, serta Undang-undang Nomor 14 tahun 2005.

Kata Kunci: Pendidikan, Perspektif Hukum, Harapan dan Realitas

A. PENDAHULUAN

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang

keadilan sosial.² Kalimat tersebut menjelaskan terdapat kewajiban bagi negara tentang bagaimana caranya mengusahakan agar semua rakyat dapat mengenyam pendidikan dan memerlukan suatu dasar pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau konstitusi.

Dalam UUD 1945 juga mengamanatkan Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.³ Sehingga perlu melakukan perubahan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dengan demikian, sesuai perkembangan waktu dan pendidikan, UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diganti dan disempurnakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

² Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³ Syarifatul Marwiyah. Konsep Pendidikan Berbasis Kecakapan Hidup. *Jurnal Falasifa* 3.1. 2012. hlm. 75-97.

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara konstitusi, jelas semua urusan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, namun bukan berarti masyarakat tidak boleh lepas tanggung jawab. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengadakan perubahan, pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan.⁴

Pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sesungguhnya sistem pendidikan nasional telah diatur secara lengkap dalam konstitusi, akan tetapi belum terimplementasi dengan baik dan sesuai secara penuh. Apalagi dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara

⁴ Tabrani, Z. A. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam (Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah). *Serambi Tarbawi* 1.2. 2013.

maksimal. Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini akan mengungkap bagaimana pendidikan di Indonesia dalam perspektif hukum.

B. PEMBAHASAN

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan perubahan sosial budaya manusia termasuk di dalamnya tentang bagaimana merubah perilaku manusia melalui konsep hukum, kaidah hukum, asas hukum yang tercermin dalam norma hukum, di antaranya sebagai berikut.

1. Mokhtar Kusumaatmaja

Mokhtar Kusumaatmaja pada tahun 1969 menyampaikan sebuah teori dalam ilmu hukum yang dikenal dengan “Teori Hukum Pembangunan”. Mokhtar mengembangkan 3 hal baru dalam dunia ilmu hukum yaitu (1) konsep hukum baru; (2) hukum sebagai sarana pembaharuan; (3) dana hukum ada yang bersifat netral dan tidak netral.⁵

Konsepsi hukum baru ini menyatakan bahwa hukum bukan semata-mata kaidah atau norma dan asas melainkan juga merupakan suatu gejala sosial budaya. Konsepsi ini didasarkan atas temuan-temuan para antropologi dan sosiologi, terutama di Amerika yang mengambil hukum sebagai obyek kajiannya. Hal ini dipandang baru karena selama ini konsep hukum di Indonesia dikuasai oleh ajaran hukum normatif.

Pemikiran hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat berasal dari pakar dan pemikir yang tergabung dalam suatu mazhab yang berkembang di Amerika yaitu: *anthro-sociological jurisprudence* yang diprakarsai oleh Roscoe Pound, dimana Pound menyampaikan teorinya yaitu: *law is a tool of social engineering*, yang diterjemahkan bukan sebagai “alat” yang memiliki konotasi mekanistik, tetapi olehnya diterjemahkan dengan kata “sarana”.⁶

⁵ Mokhtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, tt), hlm. 72.

⁶ Roscoe Pound, *An Introduction of The Philosophy of Law*, (Oxford: Oxford Universiti Press, 1975).

Hukum disebut netral jika tidak ada kaitannya sama sekali dengan faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan budaya suatu masyarakat.⁷ Hukum yang bersifat netral dapat dibentuk kapanpun diperlukan. Hal ini berbeda dengan hukum yang bersifat tidak netral, seperti hukum waris, hukum keluarga dan lain-lain.

Mokhtar adalah pemikir ilmu hukum di zaman Pemerintahan Orde Baru yang sangat dipercaya oleh penguasa saat itu karena Teori Hukum Pembangunannya, sehingga demi lancarnya dan berkesinambungan pembangunan moril dan materil, konsep-konsep pembangunan tidak lepasnya. Banyak konsep Mokhtar di bidang hukum yang kemudian diimplementasikan atau diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pembangunan dan pembaharuan di bidang pendidikan.⁸

Sering bergantinya kebijakan di bidang pendidikan, sistem, kurikulum dan lainnya merupakan cerminan konsep hukum darinya, di mana cita-cita bangsa kita yang ada dalam pembukaan UUD 1945, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dibuat aturan di bidang pendidikan. Karena untuk bisa mengubah masyarakat atau bangsa Indonesia menjadi manusia yang cerdas harus diubah melalui hukum yaitu norma-norma hukum yang ada di peraturan perundang-undangan.

Sistem Pendidikan Nasional sebagai suatu sistem harus terbentuk secara holistik dan komprehensif serta diperkaya dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang sudah maju. Pembentukan Sistem Pendidikan Nasional sampai saat ini masih belum selesai dan patut dipertanyakan sebelum dan setelah Indonesia memasuki era reformasi. Pembentukan tersebut lebih banyak dihasilkan dari harmonisasi pengaruh luar dan hasil kompromi politik,

⁷ Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika* 30.1, 2015. hlm. 26-53.

⁸ Atip Latipulhayat, Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Journal of Law* 1.3. 2014.

sehingga sudah menjadi tradisi, bergantinya pemerintahan, berganti pula sistem, bergantinya menteri berganti pula kebijakan, sehingga hasilnya pun hanya berupa manusia yang tidak cerdas moril dan material.

Teori Hukum Pembangunan dari Mokhtar, apabila diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan diterapkan di dunia pendidikan terutama di Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan, maka akan tercapai apa yang menjadi tujuan pendidikan.

Teori Hukum Pembangunan justru dalam praktek pembentukan hukum terutama di bidang pendidikan sering mengalami hambatan-hambatan, antara lain kebiasaan kurang terpuji, yaitu pengambil kebijakan sering memanfaatkan celah untuk menggunakan hukum sekedar sebagai alat dengan tujuan memperkuat dan mendahulukan kepentingan kekuasaan dari pada kepentingan dan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya.⁹

Hambatan lain adalah sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum di bidang pendidikan, sedikitnya data empiris yang digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif, sukarnya mengadakan ukuran yang obyektif untuk mengukur berhasil tidaknya usaha pembaharuan hukum, terutama di bidang pendidikan.

2. Satjipto Rahardjo

Teori Hukum Satjipto Rahardjo, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dikenal dengan Teori Hukum Progresif. Pandangan Satjipto mengenai karakteristik dan fungsi serta peranan hukum dalam pembangunan dibedakan dalam dua hal yaitu: *pertama*, hukum selalu ditempatkan untuk mencari landasan pengesahan atas suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari dasar hukum dan dasar peraturan. *Kedua*, hukum dalam pembangunan adalah sifat

⁹ Maroni, "Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 41.2 (2012): 306-314.

instrumental yang dipandang oleh beliau mengalami pertukaran dengan kekuatan-kekuatan di luar hukum sehingga hukum menjadi saluran untuk menjalankan keputusan politik atau hukum sebagai perekayasa sosial.¹⁰

Satjipto merinci hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya;
- 2) Hukum memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata;
- 3) Hukum menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat;
- 4) Hukum menciptakan iklim dan lingkungan yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.¹¹

Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Satjipto dengan Mokhtar, terdapat persamaan dan perbedaannya. Titik persamaannya yaitu; keduanya menghendaki agar hukum memiliki peranan jauh ke depan yaitu memberikan arah dan dorongan perkembangan masyarakat agar tercapai masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera.

Peranan hukum bagi kedua ahli hukum tersebut bukan sekedar sebagai alat (*tools*) melainkan harus dipahami sebagai sarana (dinamis) untuk mencapai kemajuan peradaban masyarakat. Pandangan kedua ahli hukum mengenai teori hukum tersebut tidak berhenti pada hukum sebagai sistem norma (*system of norms*) yang hanya bersandar pada “*rules and logic*” saja melainkan juga hukum sebagai sistem perilaku (*behavior system*).

Kesamaan pandangan keduanya terletak pada fungsi dan peranan hukum dalam bekerjanya hukum yang dihubungkan dengan pendidikan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009).

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 20.

terutama pendidikan dibidang ilmu hukum. Perbedaan kedua teori hukum tersebut, terletak pada tolak pangkal pemikirannya.

Pertama, Mokhtar beranjak dari bagaimana memfungsikan hukum dalam proses pembangunan nasional, Satjipto beranjak dari kenyataan dan pengalaman tidak bekerjanya hukum sebagai suatu sistem perilaku. *Kedua*, Mokhtar menegaskan bahwa kepastian hukum dalam arti keteraturan masih harus dipertahankan sebagai pintu masuk menuju ke arah kepastian hukum dan keadilan, Satjiptomenyatakan bahwa demi kepentingan manusia, maka hukum tidak dapat memaksakan ketertiban manusia. Sebaliknya, hukum yang harus ditinjau kembali, dan menambahkan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya, serta hukum dijalankan dengan nurani. *Ketiga* ialah bagi Mokhtar hukum seyogyanya diperankan sebagai sarana (bukan alat) pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), akan tetapi Satjipto menegaskan bahwa model pemeranan hukum sedemikian dikhawatirkan menghasilkan “*dark engineering*” jika tidak disertai dengan hati nurani penegak hukumnya.¹²

Menurut Satjipto “Hukum adalah untuk manusia, maka hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.” Pandangan Satjipto tersebut memiliki makna yang sangat dalam dan kuat terhadap pengaruh filsafat kemanusiaan, dan pandangan ini hanya mendapat tempat di dalam bekerjanya hukum (undang-undang) yang dijalankan oleh penegak hukum yang mumpuni, baik dari sudut filsafat maupun substansi hukum dan memang struktur kekuasaan kehakiman yang dianut mendukung ke arah adagium hukum Satjipto Rahardjo, yakni “hukum dibuat untuk

¹² Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 15.

manusia, bukan sebaliknya”.¹³ Jadi, berdasarkan teori tersebut, dunia hukum dan dunia pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh teori hukum Satjipto Rahardjo.

3. Romli Atmasasmita

Pembangunan hukum di Indonesia pada tahun 1970-an memiliki ciri, karakteristik, visi dan misi yang berbeda dengan pembangunan hukum era reformasi tahun 1998, begitu pula pembangunan hukum di kedua era tersebut berbeda dengan pembangunan hukum di tengah-tengah era globalisasi di segala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum dan pendidikan. Pembangunan hukum di era reformasi sampai saat ini tengah mengalami tantangan perubahan, baik dalam negeri maupun luar negeri,¹⁴ dan di bidang pendidikan, bagaimana hukum di bidang pendidikan harus reformis untuk menjawab tantangan dan kemajuan pendidikan nasional kita yang boleh dikatakan mulai tertinggal dari negara-negara lain terutama negara-negara tetangga.

Teori Hukum Pembangunan dalam menghadapi tantangan perubahan mengandalkan hukum sebagai kekuatan normatif yang harus berakar pada masyarakatnya, akan tetapi pada saat yang sama hukum harus diberdayakan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakatnya yang lebih utama di bandingkan dengan pengubahan sikap dan perilaku birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Teori Hukum Progresif tidak mengakui kelebihan kekuatan normatif dari hukum tertulis atau undang-undang sebagai sarana untuk menemukan solusi dalam kehidupan masyarakat atau bahkan sebagai sarana pembaruan masyarakat karena semua produk hukum tertulis, dipandang selalu mencerminkan kepentingan kekuasaan dari pada kepentingan keadilan rakyatnya. Teori Hukum Progresif memandang

¹³ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai*, hlm. 30.

¹⁴ Suwarno Widodo, Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. *CIVIS* 1.1 (2011).

kekuatan hukum tiada lain merupakan pencerminan dari kehendak pemegang kekuasaan di mana manusia tidak diberdayakan sebagai subyek hukum yang harus dihormati melainkan justru telah dijadikan “korban” dari kekuasaan melalui hukum yang telah dibuatnya.

Bertolak dari pandangan kedua guru besar hukum Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa jika hukum menurut Mokhtar merupakan sistem norma (*system of norms*) dan menurut Satjipto hukum sebagai sistem perilaku (*system of Behavior*). Romli Atmasasmita melengkapi bahwa hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai sistem nilai (*system of values*).¹⁵

Ketiga hakekat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai moral dan sosial. Ketiga hakekat hukum dalam satu wadah pemikiran. Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, itulah yang oleh Romli Atmasasmita dinamakan Teori Hukum Integratif.¹⁶

Teori Hukum Integratif dapat digunakan untuk menganalisis, mengantisipasi dan merekomendasikan solusi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan serta perkembangan dan kemajuan pendidikan. Teori Hukum Integratif harus dipahami dalam pengertian yang dinamis, tidak bersifat status quo dan pasif, melainkan hukum memiliki mobilitas fungsi dan peranan secara aktif sesuai dengan

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 79.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, hlm. 80.

perkembangan keadaan masyarakat nasional dan internasional dari waktu ke waktu.

Pandangan Teori Hukum Integratif berbeda pandangan dengan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif karena Teori Hukum Integratif tidak hanya menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks “*inward looking*“, melainkan juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia, termasuk di bidang pendidikan.

Dampak Teori Hukum Integratif terhadap bidang pendidikan hukum termasuk bidang pendidikan lainnya akan sangat nyata karena paradigma yang dibangun adalah menciptakan hasil bukan semata-mata sebagai media membangun kecerdesaan dan kematangan intelektual, melainkan juga membangun yang peduli terhadap masalah bangsa, ketidakadilan, dan kerentanan sosial bangsa Indonesia. Model kurikulum pendidikan yang cocok dengan Teori Hukum Integratif adalah yang dapat menghasilkan lulusan, siap menghadapi tantangan di masa mendatang dengan muatan: 50% penguatan penghayatan Pancasila sebagai ideologi dan filsafat hidup bangsa Indonesia, pendidikan agama dan ilmu-ilmu sosial; dan 50% muatan karakteristik, asas-asas dan kaidah hukum atau norma norma yang hidup di masyarakat bangsa Indonesia.¹⁷

4. Imam Al-Ghazali

Pemikiran pendidikan menurut Imam Al-Ghazali, bahwa tinggi rendahnya kehidupan manusia sangat ditentukan oleh sifat penguasaan ilmu pengetahuan.¹⁸ Kewajiban utama manusia dalam pendidikan dan penggalan ilmu pengetahuan adalah tentang Dzat Allah, Maha Muthlaq. Hal ini dikarenakan kebenaran ilmu pengetahuan sifatnya nisbi, pertama-tama harus diketahui tentang kebenaran muthlaq yang hanya dimiliki oleh

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, hlm. 101.

¹⁸ Eko Setiawan, "Tinjauan Pendidikan Menurut Pandangan Al-ghazali." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1 (2015).

Allah. Pengetahuan dalam bentuk apapun tidak akan sampai pada kebenaran muthlaq karena ilmu bersumber dari yang Maha Mutlaq, yakni Allah s.w.t.¹⁹

Dalam kitab Ar-Risalah, Imam Al-Ghazali membagi klasifikasi ilmu menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu *syar'i* dan ilmu *aqli*. Pembagian ini mengakibatkan berkembangnya ilmu dan sekaligus ia menilai tingkat validitas ilmu sesuai hirarkinya. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi metode perolehan ilmu menjadi dua, yaitu metode pengajaran manusia dan metode pengajaran dari Tuhan (Allah). Metode Pengajaran Manusia merupakan yang biasa dilakukan di sekolah formal dan non-formal, yang mengandalkan komunikasi interpersonal dan interaksi sosial. Adapun Metode Pengajaran dari Tuhan merupakan metode pengajaran yang melibatkan komunikasi manusia dengan Allah s.w.t.²⁰

Pandangan Imam Al-Ghazali tentang pendidikan digambarkan melalui aktivitasnya yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Dasar pemikiran pendidikannya adalah menyatukan konsep ilmu dengan dua energi manusia, yakni akal dan hati. Sedangkan indera banyak menimbulkan keraguan.²¹ Oleh sebab itu, semua ilmu harus berujung pada ilmu yang meyakinkan.

Apabila disistematisasikan, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pentingnya pendidikan berkaitan dengan lima aspek, yaitu:

- a. Pendidikan dalam aspek kerohanian dan keimanan
- b. Pendidikan dalam aspek perilaku atau akhlak
- c. Pendidikan dalam aspek *social engineering* atau rekayasa sosial

¹⁹ Jamal Fakhry, Sains dan Teknologi dalam al-Qur'an dan Implikasinya dalam Pembelajaran. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 15.01. 2010. hlm. 121-142.

²⁰ Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih*, terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 95.

²¹ Anik Faridah, "Pemikiran Al-Ghazali dan Sumbangsihnya pada Dunia Pendidikan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3.1. 2012. hlm. 51-63.

- d. Pendidikan dalam aspek pengembangan akal atau intelektual dan kecerdasannya
- e. Pendidikan dalam aspek biologis manusia atau kejasmanian.²²

5. Ibnu Khaldun

Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak dari statemennya yang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia dicirikan oleh akalnya yang berfungsi memikirkan segala sesuatu, merekayasa sesuatu dan bahkan meningkatkan rasa iman kepada Allah.²³

Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan hanya tumbuh dalam peradaban dan kebudayaan yang berkembang pesat. Perkembangan kebudayaan sangat bergantung pada cara berpikir masyarakat, sedangkan perkembangan dan kemajuan pemikiran masyarakat bergantung pada pendidikannya. Oleh karena itu, jika menginginkan kemajuan ilmu pengetahuan, manusia harus mengembangkan pendidikan.

Menurut Ibnu Khaldun, ilmu yang harus dikembangkan adalah ilmu tradisional konvensional sebagai ilmu yang ditetapkan oleh Allah, sehingga manusia tidak banyak memikirkannya, tetapi lebih tepatnya mengamalkan. Sedangkan yang terus dikembangkan adalah ilmu filsafat, sebagai ilmu yang memaklumi manusia sebagai makhluk berpikir.²⁴ Dengan demikian, pesan yang dapat diambil dari pernyataan Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut:

- 1) Kebudayaan akan berkembang apabila pendidikan dikembangkan, karena pendidikan akan mengembangkan manusia dalam berpikir,

²² Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah: Panduan Lengkap*, hlm. 105.

²³ Syamsul Hidayat dan Ana Nur Wakhidah. Konsep Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Relevansinya Terhadap Pendidikan Nasional. *Profetika: Jurnal Studi Islam* 16.1. 2015. hlm. 93-102.

²⁴ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, (Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2008), hlm. 75.

sedangkan perkembangan kebudayaan sangat ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan masyarakat dan cara berpikirnya.

- 2) Pendidikan harus mengembangkan ilmu naqliyah dan ilmu aqliyah, sehingga ada keseimbangan antara ilmu yang memperkuat keimanan dan ilmu yang mengembangkan cara berpikir.²⁵

Pendidikan menurut Ibnu Khaldun intinya bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis dalam kehidupan, lebih jelasnya pendidikan bukan harus dibatasi dalam hal belajar mengajar melainkan suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman.

6. Ibnu Miskawaih

Teori Pendidikan menurut Ibnu Miskawaih menekankan segi intelektual, kejiwaan, dan pendidikan moral yang ditujukan pada upaya melahirkan manusia yang baik menurut pandangan masyarakat. Ibnu Miskawaih percaya bahwa pendidikan harus berkaitan dengan keahlian yang berlaku. Ibnu Maskawaih memiliki pandangan bahwa pendidikan fisik harus diberikan lebih dahulu dari pada pendidikan yang bersifat spiritual dan intelektual.²⁶

7. Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional, peletak dasar pendidikan nasional yang progresif untuk generasi sekarang dan yang akan datang merumuskan pengertian pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak). Dalam Taman Siswa, tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar kita memajukan kesempurnaan hidup,

²⁵ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, hlm. 95.

²⁶ Ernita Dewi, Akhlak dan Kebahagiaan Hidup Ibnu Miskawaih. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13.2. 2011. hlm. 257-266.

kehidupan, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya.²⁷

Berdasarkan pengertian pendidikan di atas secara singkat pendidikan dapat dirumuskan sebagai tuntunan pertumbuhan manusia sejak lahir hingga tercapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi dengan alam dan lingkungan masyarakatnya. Pendidikan merupakan proses yang terus menerus, tidak berhenti. Dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia (yang terlibat dalam pendidikan ini) adalah subyek dari pendidikan. Karena merupakan subyek dalam pendidikan, maka dituntut suatu tanggung jawab agar tercapai suatu hasil pendidikan yang baik.

Apabila diperhatikan bahwa manusia sebagai subyek dan pendidikan meletakkan hakekat manusia padahal yang terpenting, maka perlu diperhatikan juga masalah otonomi pribadi. Melalui pendidikan manusia menyadari hakekat dan martabatnya di dalam hubungannya yang tak terpisahkan dengan alam lingkungannya dan sesamanya. Hal itu berarti, pendidikan sebenarnya mengarahkan manusia menjadi insan yang sadar diri dan sadar lingkungan. Dari kesadarannya itu lah mampu memperbaharui diri tanpa kehilangan kepribadian dan tidak tercerabut dari akar tradisinya.

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Pengertian pendidikan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan

²⁷ Ki Hajar Dewantara, *Karya Ki Hajar Dewantara*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), hlm. 14.

nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pada ayat 3 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

C. PENUTUP

Berdasarkan semua yang diuraikan di atas, baik teori hukum yang disampaikan para ahli hukum, para ahli pendidikan dan seperti yang termuat dalam Undang-Undang sebagai norma aturan tentang sistem pendidikan nasional, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara kondisi hukum di suatu daerah dengan bentuk pendidikan yang dikembangkan di daerah tersebut.
2. Salah satu wujud kondisi hukum secara nyata di Indonesia ialah adanya berbagai macam bentuk politik dengan berbagai bentuk kepentingannya masing-masing.
3. Adanya kondisi hukum berupa keadaan politik yang tidak konsisten di suatu negara, dapat berakibat fatal terhadap dunia pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang semestinya dapat tercapai tidak secara maksimal tercapai, atau bahkan tidak akan pernah bisa tercapai.
4. Terciptanya kondisi hukum yang stabil dan sesuai dengan beberapa teori di atas, berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia pendidikan yang selanjutnya dapat sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam.
5. Selain dimensi duniawi, beberapa konsep pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli, juga menekankan pada dimensi ukhrowi, yang tidak tersentuh dalam konsep pendidikan secara umum, terlebih dalam konsep hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syafi'i, Imam. (2008). *Ar-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih*, terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Dewantara, Ki Hajar. (1977). *Karya Ki Hajar Dewantara*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa,
- Dewi, Ernita. (2011). Akhlak dan Kebahagiaan Hidup Ibnu Miskawaih. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 257-266.
- Fakhry, Jamal. (2010). Sains dan Teknologi dalam al-Qur'an dan Implikasinya dalam Pembelajaran. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(01), 121-142.
- Faridah, Anik. (2012). Pemikiran Al-Ghazali dan Sumbangsihnya pada Dunia Pendidikan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(1), 51-63.
- Hidayat, Syamsul, dan Ana Nur Wakhidah. (2015). Konsep Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Relevansinya Terhadap Pendidikan Nasional. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 93-102.
- Khaldun, Ibnu. (2008). *Mukaddimah*, Jakarta: Penerbit Al-Kautsar,
- Kusumaatmaja, Mokhtar. (tt). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3).
- Maroni, M. (2012). Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 306-314.
- Marwiyah, S. (2012). Konsep pendidikan berbasis kecakapan hidup. *Jurnal Falasifa*, 3(1), 75-97.
- Pound, Roscoe. (1975). *An Introduction of The Philosophy of Law*, Oxford: Oxford Universiti Press.
- Setiawan, Eko. (2015). Tinjauan Pendidikan Menurut Pandangan Al-ghazali. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1).

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas,

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Usman, Atang Hermawan. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

Widodo, Suwarno. (2011). Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. *CIVIS*, 1(1).

Z. A., Tabrani. (2013). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam (Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah). *Serambi Tarbawi*, 1(2).

MEMBONGKAR KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK IBNU MISKAWAIH

Nisrokha¹

nisrokha@stipemalang.ac.id

Abstrak

Nama Lengkap Ibnu Miskawaih adalah Abu Ali Al Khazin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ya'kub Miskawaih. Gelar lainnya adalah Al Khazin yang berarti bendaharawan, disebabkan pada masa Adhud Al Daulah dari Bani Buwaih ia memperoleh kepercayaan sebagai bendahara. Ibnu Miskawaih terkenal sebagai seorang pemikir muslim yang produktif, salah satunya adalah teori etika yang bersumber pada filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran syariat islam dan pengalaman pribadi yang banyak dipengaruhi ajaran Plato dan Aristoteles serta Galen. Usaha Miskawaih adalah mempertemukan ajaran syariat islam dengan teori-teori etika dalam filsafat. Ibnu Miskawaih memberikan pengertian karakter (khuluk) adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Tujuan pendidikan akhlak yang dirumuskan oleh Ibnu Miskawaih adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik sehingga dapat mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempurna. Ibnu Miskawaih menyebutkan tiga hal pokok sebagai materi pendidikan akhlak yaitu Pertama, Materi-materi yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia, Kedua Materi-materi yang wajib bagi jiwa, Ketiga Materi-materi yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia.

Kata Kunci: Ibnu Miskawaih, Pendidikan Akhlak.

A. PENDAHULUAN

Nama Lengkap Ibnu Miskawaih adalah Abu Ali Al Khazin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ya'kub Miskawaih, Sebutan namanya yang lebih mashur adalah Miskawaih atau Ibnu Miskawaih. Nama tersebut diambil dari nama

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang

kakeknya yang semula beragama majusi (Persia) kemudian masuk islam.² Gelarnya adalah Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabat Ali yang bagi kaum Syi'ah dipandang sebagai pemimpin umat islam sepeninggalnya. Dari gelar ini tidak salah apabila orang menyebutnya sebagai orang syi'ah. Gelar lainnya adalah Al Khazin yang berarti bendaharawan, disebabkan pada masa Adhud Al Daulah dari Bani Buwaih ia memperoleh kepercayaan sebagai bendahara.³

Ibnu Miskawaih lahir di Kota Ray (Iran) pada 320 H dan wafat di Asfagan pada 9 Syafar 421 H (16 Februari 1030 M).⁴ Ayahnya Abu Syuja' Buwaih adalah pemimpin suku yang amat gemar berperang dan kebanyakan pengikutnya adalah berasal dari daerah pegunungan Dailan Persia, di daerah pegunungan pantai selatan laut Waswain yang merupakan pendukung keluarga Saman.⁵

Pendidikan Ibnu Miskawaih tidak berbeda dari kebiasaan anak menuntut ilmu pada masanya, yaitu bermula dengan belajar membaca, menulis, mempelajari Al Qur'an dan dasar-dasar bahasa Arab, Nahwu dan Arrudh (Ilmu membaca dan menulis syair), Mata pelajaran dasar tersebut diberikan di surau-surau.⁶ Setelah Ilmu dasar ilmu itu diberikan, anak-anak baru diberikan pelajaran ilmu fiqh, hadist, Sejarah (Persi, Arab, dan India), Matematika juga ilmu praktis seperti musik, bermain catur dan furusiah (Kemiliteran). Meskipun Ibnu Miskawaih tidak mengikuti pelajaran privat karena ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk mendatangkan guru terutama untuk pelajaran lanjut yang biayanya mahal. Perkembangan ilmu Ibnu Miskawaih diperoleh melalui jalan membaca buku pada saat menjadi

² Muhaimin, Tadjab Abd, Mudjib, *Dimensi Studi Islam*, (Surabaya: Abdi Tama, 1994), hlm. 302.

³ A. Musthofa, *Filsafat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 166.

⁴ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 56.

⁵ A. Musthofa, *Filsafat Islam*, hlm. 166-167.

⁶ Ghozali Munir, *Jurnal Penelitian Wali Songo*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 1998), hlm. 47.

pustakawan Ibn Al Amid, Menteri Rukn Al Daulah yang akhirnya menjadi bendaharawan Adhud Al Daulah.⁷

Ibnu Miskawaih terkenal sebagai seorang pemikir muslim yang produktif, ia telah banyak menghasilkan karya tulis tapi hanya sebagian kecil yang sekarang masih ada.⁸ Adapun karya – karya Ibnu Miskawaih yang dapat terekam diantaranya adalah:⁹

1. Al Fauz Al Akbar (Kemenangan Besar)
2. Al Fauz Al Asgar (Kemenangan Kecil)
3. Tajarib Al Umam (Pengalaman bangsa-bangsa, sebuah sejarah tentang banjir besar yang ditulis pada tahun 369 H/ 979 M)
4. Uns Al Faraid (Kesenangan yang tiada taranya : Kumpulan anekdot, syair, peribahasa dan kata-kata mutiara)
5. Tartib Asa'adah (tentang akhlak dan politik)
6. Al Musthofa (yang terpilih syair-syair pilihan)
7. Jawidan Khirad (Kumpulan ungkapan bijak)
8. Al Jami' (Tentang Jama'ah)
9. As Syiar (Tentang aturan hidup)
10. Kitab Asyirabah (Tentang minuman)
11. Tahdzib Al Akhlak (Pembinaan Akhlak)
12. On The Simple Drugs Tentang Kedokteran)
13. On The Composition of The Bajats (Seni Memasak)
14. Risalah Fi Al Lazdzat Wa Alam Fi Jauhar Al Nafs (Naskah di Istambul, Raghil Majmumah No. 1436, Lembar 57 a – 59 a)
15. Aj Wibah Wa Asi'lah Fi Al Nafs Wal Aql (dalam majmu'ah tersebut diatas dalam Raghil di Istambul)
16. Al Jawab Fi Masa'il Al Tsalats (Naskah di Teheran, Fihris Maktabat Al Majlis, II, No. 634 (31))

⁷ A. Musthofa, *Filsafat Islam*, hlm. 168.

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 2*, Cet.2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 162.

⁹ A. Musthofa, *Filsafat Islam*, hlm. 58.

17. Risalah Fi Jawab Fi Su'ul Ali bin Muhammad abu Hayyan al Shufi fi Haqiqat Al Aql (Perpustakaan Mashdad di Iran)
18. Thaharat Al Nafs (Naskah di Koprulu , Istambu)

B. PEMBAHASAN

Teori etika Ibnu Miskawaih bersumber pada filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran syariat islam dan pengalaman pribadi. Pengaruh Plato dan Aristoteles serta Galen amat jelas dalam teori etika ibnu Miskawaih. Usaha Miskawaih adalah mempertemukan ajaran syariat islam dengan teori-teori etika dalam filsafat.¹⁰

Pemikiran Ibnu Miskawaih di dalam pendidikan akhlak termasuk salah satunya yang mendasari konsepnya dalam bidang pendidikan.¹¹ Konsep moral Ibnu Miskawaih sangat berhubungan erat dengan masalah roh, ia mempersamakan pembawaan roh dengan kebajikan-kebajikan yang mempunyai tiga macam pembawaan yaitu rasionalitas, keberanian, dan hasrat. Disamping itu ruh juga mempunyai tiga macam kebajikan yang saling berkaitan yaitu kebijaksanaan, keberanian dan kesederhanaan.¹²

1. Pengertian Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih

Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *Akhlak* bentuk jamak dari *khuluqun* yang berarti tabiat, budi pekerti dan kebiasaan. Secara terminologi Ibnu Miskawaih memberikan pengertian karakter (khuluk) adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran terlebih dahulu.¹³

Keadaan ini ada dua jenis, pertama yaitu alamiah dan bertolak dari watak, misalnya pada seseorang yang gampang sekali marah karena hal

¹⁰ A. Musthofa, *Filsafat Islam*, hlm. 85.

¹¹ A. Musthofa, *Filsafat Islam*, hlm. 175.

¹² Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 8.

¹³ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh*, hlm. 102.

yang paling kecil atau takut menghadapi insiden yang sepele. Kedua, tercipta melalui kebiasaan dan latihan pada mulanya keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan terlebih dahulu, namun kemudian melalui praktis terus menerus menjadi karakter.¹⁴

Ibnu Miskawaih menolak sebagian pendapat dari pemikiran Yunani yang mengatakan akhlak berasal dari watak tidak mungkin diubah, oleh karena itu Ibnu Miskawaih menegaskan kemungkinan perubahan akhlak itu terutama melalui pendidikan.¹⁵ Manusia dapat berusaha mengubah watak kejiwaan pembawaan fitrahnya yang tidak baik menjadi baik, manusia dapat mempunyai khuluk yang bermacam-macam baik secara cepat maupun lambat. Hal ini dapat dibuktikan pada perubahan-perubahan yang dialami anak dalam masa pertumbuhannya dari suatu keadaan kepada keadaan lain sesuai dengan lingkungan yang mengelilinginya dan macam pendidikan yang dialaminya.

Miskawaih menetapkan kemungkinan manusia mengalami perubahan-perubahan khuluk. Dari segi itulah maka diperlukan adanya aturan-aturan syariat, nasihat-nasihat dan berbagai macam ajaran terhadap adap sopan santun. Adanya itu semua memungkinkan manusia dengan akalunya untuk memilih dan membedakan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Dari sini pula Miskawaih memandang penting arti pendidikan dalam lingkungan bagi manusia dalam hubungannya dengan pembinaan Akhlak.¹⁶

Pembahasan Akhlak berkaitan dengan jiwa, maka Ibnu Miskawaih berpendapat bahwa jiwa (ruh) itu jauhar (elemen) yang hidup kekal tidak menerima mati dan binasah.¹⁷ Jiwa berbeda dengan materi karena jiwa

¹⁴ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib Al Akhlak*, Terj. Helmi Hidayat, *Menuju kesempurnaan Akhlak*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 56.

¹⁵ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, hlm. 61.

¹⁶ A. Musthofa, *Filsafat Islam*, hlm. 177-178.

¹⁷ Zainal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), hlm. 306.

dapat menangkap peristiwa baik yang material atau spiritual ataupun mental yang memiliki pengetahuan rasional bawaan.¹⁸

Ibnu Miskawaih berpendapat bahwa jiwa manusia mempunyai tiga macam kekuatan:

a. Fakultas Berpikir (*Al Quwwah Al Natiqoh*)

Merupakan fakultas tertinggi, biasa disebut fakultas raja, Merupakan fungsi jiwa tertinggi kekuatan berfikir melihat fakta.¹⁹, Fakta disebutkan bahwa kepekaan dalam melihat situasi dan kondisi yang terjadi disekitarnya. Sebagai khususiyah dari jiwa yang cerdas mempunyai sifat adil, harga diri, berani, pemurah, berani dan cinta.²⁰

b. Fakultas Nafsu Syahwiyah

Disebut fakultas binatang, pada fakultas ini memiliki sifat pengecut, boros, sombong, penipu, suka mengolok-olok, hina dina dan sebagainya.²¹

c. Fakultas Amarah (*Al Quwwah Al Ghodhobiyah*)

Ibnu Miskawaih menyebutkan bahwa fakultas ini disebut fakultas binatang buas, yang akan menimbulkan keberanian menghadapi resiko ambisi pada kekuasaan, kedudukan dan kehormatan.²²

Jika ketiganya itu terjadi keharmonisan, maka akan terjadi keutamaan pada manusia. Keharmonisan ketiga hal itu diperlukan yang kemudian menimbulkan keutamaan lainnya yaitu kearifan (*Hikmah*),²³

¹⁸ C. A. Qadir, *Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), hlm. 214.

¹⁹ Busyairi Madjidi, *Al Jami'ah: Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 51

²⁰ Hamzah Yakub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1983), hlm. 89.

²¹ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1987/1988), hlm. 353.

²² Busyairi Madjidi, *Al Jami'ah: Jurnal Ilmu*, hlm. 51.

²³ Menurut Busyairi Madjidi, *Al Jami'ah: Jurnal Ilmu*, hlm. 52-53., Al-Hikmah (kebijaksanaan) adalah fadhilah keutamaan, sifat utama dari natiqoh, jiwa pikir kritis,

keberanian (*syaja'ah*),²⁴ kesederhanaan (*iffah*),²⁵ dan keseimbangan (*Al Adlalah*).²⁶ Keempat keutamaan akhlak tersebut merupakan pokok atau induk akhlak yang mulia.

2. Tujuan Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih

Tujuan pendidikan akhlak yang dirumuskan oleh Ibnu Miskawaih adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik sehingga dapat mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempurna.²⁷

Kesempurnaan manusia menurut Ibnu Miskawaih ada dua macam karena ada fakultas yang dimilikinya yaitu fakultas kognitif dan fakultas praktis. Kalau seseorang menguasai kedua bagian ini maka ia akan memperoleh kebahagiaan puncak. Kesempurnaan manusia yang terdiri dari 2 bagian, yaitu melalui :

- a. Fakultas Kognitif yaitu dengan fakultas ini akan memunculkan pengetahuan terwujudlah bila mendapatkan pengetahuan sedemikian sehingga persepsinya, wawasan dan kerangka berpikirnya akurat.

analitis, untuk mengetahui segala yang ada karena keberaannya atau untuk hal ikhwal keTuhanan dan hal ikhwal kemanusiaan.

²⁴ Busyairi Madjidi, *Al Jami'ah: Jurnal Ilmu*, hlm. 52-53., As syaja'ah (keberanian) adalah sifat keutamaan pada jiwa ghodobiyah. Sifat ini nampak pada manusia ketika jiwa ini dikendalikan oleh sifat utama Al Hikmah dan digunakan sesuai akal pikiran untuk menghadapi masalah-masalah yang beresiko, umpamanya tidak gentar dalam menghadapi perkara-perkara yang menakutkan.

²⁵ Busyairi Madjidi, *Al Jami'ah: Jurnal Ilmu*, hlm. 52-53., Iffah (kesucian diri) adalah sifat utama pada penginderaan nafsu syahwat, Al Hissyu Syahwani nampak pada waktu seseorang men gendalikan nafsu dengan mempertimbangkan yang sehat sehingga dia tidak tunduk pada nafsunya itu.

²⁶ Busyairi Madjidi, *Al Jami'ah: Jurnal Ilmu*, hlm. 52-53., Al adlalah (keseimbangan) adalah sifat utama pada jiwa sebagai produk dari integrasi (ijtima') yang serasi dari tiga unsur jiwa yang telah disebut, Al Hikmah merupakan faktor yang dominan. Sifat ini membawa persaudaraan, kerukunan, silaturahmi

²⁷ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh*, hlm. 11.

Dengan demikian dia tidak akan melakukan kesalahan dalam keyakinannya dan tidak meragukan suatu kebenaran. Dengan mengetahui maujud-maujud, dimana dia bergerak maju secara sistematis, dia mencapai pengetahuan ilahi yang merupakan pengetahuan tertinggi tingkatannya. Pada pengetahuan ilahi inilah dia berpegang teguh jiwanya tentram, hatinya tenang, keraguannya hilang dan tampak jelas obyek terakhir yang diinginkannya didepan matanya sanpai dia bersatu dengannya.²⁸ Ini juga disebut dengan cara kesempurnaan dimana ia akan memperoleh pengetahuan yang sempurna.

- b. Fakultas Praktis yaitu kesempurnaan karakter dimulai dari menertibkan fakultas dan aktivitas yang khas bagi fakultas itu sehingga tidak saling berbenturan namun hidup harmonis didalam dirinya sehingga seluruh aktivitas sesuai dengan fakultas lihatnya dan tertata dengan baik diakhiri dengan penataan kehidupan sosial, dimana tindakan dikalangan masyarakat terjadi keselarasan dan masyarakat mencapai kebahagiaan seperti yang terjadi pada individu manusia.²⁹

3. Materi Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan Ibnu Miskawaih menyebutkan beberapa hal yang perlu dipelajari, diajarkan atau dipraktekkan. Sesuai dengan konsepnya tentang manusia, secara umum Ibnu Miskawaih menghendaki agar semua sisi manusia mendapatkan materi pendidikan yang memberi jalan bagi tercapainya tujuan pendidikan, materi –materi yang dimaksudkan Ibnu Miskawaih diabdikan pula sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.³⁰

²⁸ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib Al Akhlak*, hlm. 63.

²⁹ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib Al Akhlak*, hlm. 64.

³⁰ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh*, hlm.122

Ibnu Miskawaih menyebutkan tiga hal pokok yang dapat dipahami sebagai materi pendidikan akhlaknya, yaitu:

a. Materi-materi yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia

Materi ini berkaitan dengan kewajiban manusia terhadap pencipta yaitu Allah Azza wazalla³¹ Seperti dicontohkan dalam ibadah sholat, puasa, haji.³² Di antara materi-materi ini juga berkaitan dengan kebutuhan manusia secara fisik. Contoh dalam pelaksanaannya adalah :

1) Melakukan Sholat

Gerakan-gerakan dalam sholat yang teratur yang paling sedikit dilakukan lima kali dalam sehari seperti mengangkat tangan, berdiri, rukuk dan sujud memang memiliki unsur-unsur tubuh(gerak badan) bila mana berdiri, rukuk dan sujud dilakukan dengan tempo yang agak lama.³³ Selain itu jika sholat dilakukan secara berjama'ah akan menghasilkan serangkaian perbuatan seperti kesehajaan, imam dan ma'mum sama dalam satu tempat.³⁴ Dan ini mendidik manusia untuk cinta kepada tetangga dalam arti yang lebih luas.³⁵

2) Puasa

Dengan puasa, secara fisik untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan menahan makan dan minum dalam waktu yang terbatas dan upaya mengendalikan keinginan nafsu³⁶ merupakan latihan menahan diri dari perbuatan yang terkeji yang dilarang.³⁷

³¹ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib Al Akhlak*, hlm. 122.

³² Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh*, hlm. 13.

³³ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh*, hlm. 13-14.

³⁴ Abudin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 159.

³⁵ Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 84.

³⁶ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 62.

³⁷ Abudin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, hlm.160

3) Haji

Dalam ibadah haji ini mempunyai nilai terhadap pembinaan akhlak³⁸ kerana ibadah haji dalam islam harus bersifat komprehensif yang menuntut persyaratan yang banyak dan disamping harus menguasai ilmunya juga harus sehat secara fisik, ada kemauan keras, beradab dalam menjalankan dan harus mengeluarkan biaya serta rela meninggalkan tanah air, harta dan kekayaan.³⁹

b. Materi-materi yang wajib bagi jiwa

Materi akhlak yang dipelajari untuk keperluan jiwa dicontohkan dengan:

- 1) Berkeyakinan yang benar
- 2) Mengetahui keesaan Allah, memuji dan mengagungkanNya.⁴⁰
- 3) Merenungkan seluruh karunia yang telah dilimpahkan Tuhan pada dunia berkat kemurahan dan kearifan Nya dan memperdalam pengetahuan ini.⁴¹
- 4) Memotivasi untuk senang kepada ilmu.⁴²

Ibnu Miskawaih berpendapat bahwa ajaran-ajaran agama merupakan bimbingan jiwa kepada akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur. Ibadah-ibadah yang dilaksanakan semuanya merupakan latihan jiwa yang bertujuan pembinaan mental kepada akhlak yang baik,⁴³ serta menenangkan kepada rasa keutamaan sosial, semuanya

³⁸ Asep Kurniawan, Penanaman Nilai-nilai Tasawuf dalam Rangka Pembinaan Akhlak di Sekiolah Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(1), 2013. hlm. 187-206.

³⁹ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, hlm. 61.

⁴⁰ Ghozali Munir, *Jurnal Penelitian Wali Songo*, hlm. 160.

⁴¹ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib Al Akhlak*, hlm. 123.

⁴² Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, hlm. 14.

⁴³ Ramli, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Dalam Upaya Mencari Format Pendidikan yang Islami (Kajian Pemikiran Ibnu Miskawaih). *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 1.01, 2015.

berpangkal pada dasar cinta yang ada pada dalam diri manusia itu sendiri.⁴⁴

- c. Materi-materi yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia.

Materi yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia saat berinteraksi sosial seperti melangsungkan transaksi (ilmu muamalat), bercocok tanam (pertanian), menikah, menunaikan amanat, saling berkonsultasi dan membantu, dan berjuang melawan musuh, melindungi kaum wanita dan harta.⁴⁵ Para filosof berpendapat bahwa bentuk-bentuk ibadah ini adalah cara-cara yang dapat membawa kita kepada Allah dan merupakan kewajiban makhluk terhadap-Nya.⁴⁶

Selanjutnya karena materi-materi tersebut selalu dikaitkan dengan pengabdian kepada Allah maka apapun materinya yang terdapat dalam suatu ilmu yang ada asal tidak lepas dari tujuan kepada pengabdian Tuhan, Ibnu Miskawaih sependapat misalnya dengan:

- a. Ilmu Nahwu (tata bahasa). Materi ini akan membantu manusia untuk lurus dalam berbicara
- b. Ilmu Manthiq. Akan membantu manusia untuk lurus dalam berfikir.⁴⁷
- c. Ilmu Aritmatika dan Geometri. Akan membantu manusia untuk berbicara benar dan benci kepalsuan dan argumentasi yang tepat.⁴⁸
- d. Sejarah dan sastra akan membantu manusia untuk berlaku sopan.⁴⁹

⁴⁴ Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 354-355.

⁴⁵ Muktazzah Fiddini, *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih: Studi Kitab Tahdzib Al-Akhlak*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.

⁴⁶ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib Al Akhlak*, hlm. 70.

⁴⁷ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, hlm. 14.

⁴⁸ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib Al Akhlak*, hlm. 70.

⁴⁹ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, hlm. 14.

4. Metode Pendidikan akhlak Menurut Ibnu Miskawaih

Metode Pendidikan dapat diartikan sebagai cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Tujuan Pendidikan tersebut yaitu perubahan-perubahan kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, metode ini terkait dengan perubahan atau perbaikan.⁵⁰ Ibnu Miskawaih berpendapat bahwa akhlak dapat berubah.⁵¹ Dan dapat diusahakan atau menerima perubahan yang diusahakan maka usaha-usaha untuk mengubahnya diperlukan adanya cara-cara yang efektif untuk mengubahnya.⁵² Terdapat beberapa metode yang diajukan Ibnu Miskawaih dapat mencapai akhlak yang baik yaitu dengan kebiasaan dan latihan serta pelajaran yang baik,⁵³ dapat membantu seseorang mencapai sifat yang terpuji.⁵⁴ Untuk itu perlu :

- a. Adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih terus menerus dan menahan diri (Al a'adat Wa al-Jihad) untuk memperoleh keutamaan dan kesopanan yang sebenarnya sesuai keutamaan jiwa.⁵⁵ Pembinaan akhlak dapat dilakukan dengan menanamkan kebiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara kontinyu, pentingnya pengawasan akan perkembangan anak serta menanamkan kebiasaan yang baik guna mencapai kebaikan anak.⁵⁶ Bimbingan dan latihan mula-mula dengan membebaskan akal pikiran dari pendirian-pendirian yang tidak diyakini kebenarannya.⁵⁷ Al Ghozali juga sependapat dengan Ibnu

⁵⁰ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, hlm. 22.

⁵¹ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, hlm. 61.

⁵² Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, hlm. 22.

⁵³ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib Al Akhlak*, hlm. 14.

⁵⁴ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, hlm. 61.

⁵⁵ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, hlm. 82-83.

⁵⁶ Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual*, hlm. 84.

⁵⁷ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 102.

Miskawaih bahwa budi pekerti dapat diubah dengan latihan dan kesungguh-sungguhan yaitu dengan melemah lembutkan dan menuntun marah dan nafsu syahwat dengan latihan dan kesungguhan. Niscaya kita dapat menguasai keduanya. Dan yang demikian itu menjadi sebab keselamatan kita dan sampainya kita kepada Allah SWT. Apabila anak dibiasakan dengan sifat-sifat yang baik maka akan berkembanglah sifat-sifat yang baik itu pada dirinya dan akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁸

- b. Adanya pendidikan dan partisipasi praktis bagi kahlak-akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk dan menyiapkan tauladan yang baik dan alam sekitar yang menggalakkan tingkah laku yang dikehendaki. Dalam menanamkan sopan santun, memerlukan pendidikan yang panjang dan harus ada pendekatan yang baik, pendidikan itu tidak akan sukses melainkan jika disertai dengan pemberian tauladan yang baik dan nyata.⁵⁹ Selain itu dengan menjadikan semua pengetahuan dan pengalaman orang lain sebagai cermin bagi dirinya. Pengetahuan dan pengalaman disini berkenaan dengan hukum hukum akhlak yang berlaku sebagai sebab munculnya kebaikan dan keburukan manusia. Seseorang tidak akan hanyut dalam perbuatan buruk dan akibatnya akan dialami orang lain.⁶⁰
- c. Teman yang cocok. Tidak semua teman dapat memberi pengaruh yang baik, ketika berteman dengan orang jahat dia akan memiliki pengaruh yang buruk dan akan menonadi perangai kita oleh karena itu agar kesehatan mental kita tidak ternodai maka carilah teman

⁵⁸ Bukhori Amin, *Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Melalui Pembiasaan Praktik Ibadah pada Siswa di SMP Islam Pakis Kab. Malang*. Disertasi. University of Muhammadiyah Malang, 2015.

⁵⁹ Abudin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, hlm. 163.

⁶⁰ Ahmad Zain Sarnoto, *Aktualisasi Pemikiran Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawih Dalam Pendidikan. Statement/ Jurnal Media Informasi Sosial dan Pendidikan* 1.1, 2011, hlm. 49-58.

yang cocok yaitu orang yang baik, sholeh, pintar dan sebagainya agar kita turut terbiasa sifat-sifat yang yang terpuji. Maka anak harus dijauhkan dari pergaulan dengan teman yang berperangai buruk.⁶¹ Untuk itu diperlukan syariat agama yang merupakan faktor untuk meluruskan karakter agar membiasakan mereka untuk melakukan perbuatan yang baik, sekaligus mempersiapkan diri mereka untuk menerima kearifan dalam mencapai kebahagiaan melalui berfikir dan penalaran akurat. Kewajiban orang tua lah untuk mendidik mereka agar menaati syariat, berbuat baik, melalui nasehat atau diberi janji yang menyenangkan atau malah dipukul atau dihardik sebagai hukuman yang menakutkan sehingga mereka terbiasa dan mengetahui dalam kebajikan dalam mencapai kebahagiaan.⁶²

C. PENUTUP

Konssep pendidikan akhlak lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran plato dan aristoteles dan galen dalam mengemukakan teorinya Usaha Miskawaih adalah mempertemukan ajaran syariat islam dengan teori-teori etika dalam filsafat. Ibnu Miskawaih menyatakan bahwa akhlak pada manusia dapat diubah melalui pendidikan dan lingkungan yang ditemuinya. Tujuan pendidikan akhlak yang dirumuskan oleh Ibnu Miskawaih adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik sehingga dapat mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempurna. Ibnu Miskawaih menyebutkan tiga hal pokok yang dapat dipahami sebagai materi pendidikan akhlak adalah *Pertama*, Materi-materi yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia. *Kedua*, Materi-materi yang wajib bagi jiwa. *Ketiga*, Materi-materi yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Metode yang digunakan dalam konsep pendidikan akhlak yaitu dengan cara Adanya

⁶¹ A. Musthofa, *Filsafat Islam*, hlm. 181.

⁶² Ibnu Miskawaih, *Tahdzib Al Akhlak*, hlm. 59-60.

kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih terus menerus dan menahan diri, Memilihkan teman yang cocok serta adanya pendidikan yang praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Zainal Arifin. (1984). *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*. Jakarta: Pustaka al Husna.
- Amin, Bukhori. (2015). *Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Melalui Pembiasaan Praktik Ibadah pada Siswa di SMP Islam Pakis Kab. Malang*. Disertasi. University of Muhammadiyah Malang.
- Azra, Azyumardi. (1999). *Esai-esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Depag RI. (1987/1988). *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1994). *Ensiklopedi Islam 2*. Cet. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fiddini, Muktazzah. (2008). *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih: Studi Kitab Tahdzib Al-Akhlak*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kurniawan, Asep. (2013). Penanaman Nilai-nilai Tasawuf dalam Rangka Pembinaan Akhlak di Sekolahan Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(1).
- Madjidi, Busyairi. (1995). *Al Jami'ah: Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Miskawaih, Ibnu. (1994). *Tahdzib Al-Akhlak*. Terj. Helmi Hidayat. *Menuju Kesempurnaan Akhlak*. Jakarta: Mizan.
- Muhaimin, Tadjab, dan Abdul Mudjib. (1994). *Dimensi Studi Islam*. Surabaya: Abdi Tama.
- Munir, Ghozali. (1998). *Jurnal Penelitian Wali Songo*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Musthofa, A. (1997). *Filsafat Islam*. Bandung: Mizan.
- Nasution, Hasyimsyah. (1999). *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nata, Abudin. (2000). *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nata, Abudin. (2000). *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qadir, C. A. (1989). *Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ramli. (2015). Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Dalam Upaya Mencari Format Pendidikan yang Islami (Kajian Pemikiran Ibnu Miskawaih). *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 1.01.
- Sarnoto, Ahmad Zain. (2011). Aktualisasi Pemikiran Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawih Dalam Pendidikan. *Statement/ Jurnal Media Informasi Sosial dan Pendidikan* 1(1).
- Yakub, Hamzah. (1983). *Etika Islam*. Bandung: Diponegoro.

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DAN MUTU PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Abdul Kosim¹ & Muhamad Rifa'i Subhi²

abdulkosim@gmail.com

Abstrak

Keberhasilan belajar-mengajar tergantung pada proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik yang mampu mentransfer ilmu pengetahuan, dan menjadikan proses pembelajaran peserta didik menjadi senang oleh bentuk pembelajaran yang disajikan oleh pendidik atau guru. Dalam proses pembelajaran guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik, dengan kompetensi ini dapat mengembangkan pembelajaran yang variatif dan menyenangkan, sehingga peserta didik tidak jenuh ketika mengikuti pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kompetensi pedagogik guru dan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di MTs Negeri Pemalang, serta pengaruh dari kompetensi tersebut terhadap mutu pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket, yang ditujukan kepada seluruh guru PAI di MTs Negeri Pemalang, sejumlah 14 guru. Analisis data yang digunakan adalah analisis uji regresi linear yang mengungkap pola hubungan atau pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, kompetensi pedagogik guru PAI memiliki pengaruh yang besar terhadap mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang.

Kata Kunci: Kompetensi Pedagogik Guru, Mutu Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam.

A. PENDAHULUAN

Salah satu mata pelajaran pokok yang harus diajarkan di sekolah/madrasah adalah Pendidikan Agama Islam (PAI). Dijelaskan dalam Peraturan Menteri

¹ MTs Negeri Model Pemalang

² Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang

Agama RI bahwa PAI adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.³ PAI sendiri dibagi menjadi 4 mata pelajaran dalam kurikulum Madrasah, yakni: Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut saling terkait dan melengkapi.

Pada era globalisasi ini, PAI sangat dibutuhkan bagi peserta didik, agar dapat memahami secara benar ajaran Islam sebagai agama yang sempurna, kesempurnaan ajaran Islam yang dipelajari secara integral diharapkan dapat meningkatkan kualitas peserta didik dalam keseluruhan aspek kehidupannya. Oleh karena itu, agar ajaran Islam dapat dipelajari secara efektif dan efisien, perlu adanya usaha pengembangan dan peningkatan terhadap mutu pembelajaran PAI di sekolah/madrasah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang selalu dinamis.

Sekolah/madrasah sendiri merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai peranan penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Melalui sekolah/madrasah, diharapkan peserta didik dapat menggali dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, sudah semestinya suatu instansi sekolah/madrasah selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pembelajaran setiap mata pelajaran, agar dapat menjadikan peserta didiknya bermutu, termasuk diantaranya adalah peningkatan dalam mutu pembelajaran PAI.

Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa mutu adalah (ukuran) baik buruk suatu benda, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya), kualitas. Di mana kualitas yang dimaksud lebih mengarah pada sesuatu yang baik.⁴ Selain itu, Mulyasa menjelaskan bahwa mutu adalah

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 1 ayat 1.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 677.

suatu sistem manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan sesuatu hal tertentu secara berkelanjutan terus menerus.⁵ Mutu dalam konteks pembelajaran dapat dipahami dari input, proses dan output pembelajaran.⁶

Mutu input pembelajaran adalah segala hal yang berkaitan dengan masukan untuk proses pembelajaran di sekolah/madrasah. Indikator input pembelajaran adalah memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas; tersedia sumber daya yang siap; tersedianya staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi; memiliki harapan prestasi yang tinggi, berfokus pada peserta didik, dan memiliki input manajemen.⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa pembelajaran yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, efektif dan psikomotorik), metode, sarana prasarana, dukungan administrasi, serta penciptaan suasana belajar yang kondusif.

Mutu proses pembelajaran adalah segala hal yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi dalam pembelajaran.⁸ Dengan kata lain, mutu proses pembelajaran yang dimaksud menekankan pada standar atau acuan dalam hal proses pembelajaran, seperti *teamwork* yang solid, evaluasi yang berkelanjutan, serta seberapa efektif dan efisien pembelajaran di kelas.⁹ Sedangkan mutu output pembelajaran merupakan prestasi atau hasil dari proses pelaksanaan pembelajaran. Mutu output pembelajaran ini mengacu pada prestasi yang dicapai, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Begitu juga dengan mutu pembelajaran PAI, hanya saja ada sedikit tambahan yaitu adanya keseimbangan antara input, proses dan output

⁵ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional; dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm. 224.

⁶ Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 84.

⁷ Suharno, *Manajemen Pendidikan*, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Press, 2008), hlm. 50.

⁸ Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 84-85.

⁹ Suharno, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 46.

pembelajaran yang pada akhirnya mampu mencetak manusia muslim yang berkualitas. Dalam arti, peserta didik mampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup yang berperspektif Islam. Pemahaman manusia berkualitas dalam khasanah pemikiran Islam sering disebut sebagai insan kamil yang mempunyai sifat-sifat antara lain manusia yang selaras (jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi), manusia moralis (sebagai individu dan sosial), manusia *nazhar* dan *i'tibar* (kritis, berijtihad, dinamis, bersikap ilmiah dan berwawasan ke depan), serta menjadi manusia yang memakmurkan bumi.¹⁰

Pembelajaran di sekolah/madrasah merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai mutu pembelajaran PAI yang diharapkan. Hal ini dikarenakan keefektifan dan keefisienan pembelajaran merupakan titik awal dalam menentukan keberhasilan pengajaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pembelajaran PAI, diantaranya adalah: (1) pendidik, (2) peserta didik, dan (3) kurikulum.¹¹ Faktor lain yang juga ikut andil dalam mempengaruhi mutu pembelajaran PAI adalah sarana prasarana pendidikan, pengelolaan manajemen, dan lingkungan.¹²

Pemenuhan faktor-faktor tersebut berpengaruh besar terhadap keadaan mutu pembelajaran PAI. Di antara faktor tersebut, faktor utama yang paling dominan adalah Pendidik atau Guru. Hal ini dikarenakan guru merupakan ujung tombak dari keberhasilan dalam pembelajaran, mulai dari proses sampai dengan hasil pembelajaran. Guru merupakan faktor utama yang memegang peran penting dalam pembelajaran dan komponen utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa.¹³

¹⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 201.

¹¹ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 77.

¹² Misbahul Munir, *Supervisi Pendidikan Suplemen I dan II* (Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 43.

¹³ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 23.

Namun, tidak semua orang dewasa dapat dikategorikan sebagai guru. Seorang guru harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon guru sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, bahwa untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, ia harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹⁴

Oleh karena itu, salah satu komponen utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran adalah guru. Termasuk di dalamnya adalah keberhasilan belajar siswa. Namun, keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki guru dan kemampuan yang dimiliki siswa. Guru yang berkualitas adalah guru yang profesional dalam melaksanakan tugas pembelajaran, yakni mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menguasai bahan ajar, memahami karakteristik peserta didik, dan terampil dalam memilih metode pembelajaran.¹⁵

Dengan demikian, guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sehingga suatu keniscayaan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Kompetensi ini mutlak harus dikuasai oleh guru karena menentukan keberhasilan pembelajaran. Guru yang telah menguasai kompetensi, akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembelajaran dibanding dengan guru yang tidak memiliki kompetensi. Pada akhirnya, keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas pembelajaran, termasuk mutu pembelajaran PAI.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 dan 42.

¹⁵ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 35.

¹⁶ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 35.

Dengan kata lain, guru yang berkualitas harus mampu menguasai kompetensi yang menjadi kriteria dari seorang guru yang ideal.

Adapun yang dimaksud dengan kompetensi sebagaimana tercantum dalam kamus ilmiah populer adalah kecakapan, kewenangan, kekuasaan dan kemampuan.¹⁷ Dalam Undang-undang juga dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.¹⁸ Sedangkan menurut Saiful Sagala, kompetensi adalah perpaduan dari penguasaan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya.¹⁹

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru adalah kompetensi pedagogik, yang merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan siswa meliputi pemahaman terhadap siswa, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.²⁰ Pada intinya, kompetensi pedagogik menuntut guru untuk menguasai hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, dipahami bahwa peran guru yang berkompeten, memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah/madrasah, termasuk dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI. Di mana peran guru dalam pembelajaran dirasakan sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan tingkah laku siswa. Sehingga untuk

¹⁷ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: PT Arkola, 1994), hlm. 353.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 10.

¹⁹ Saiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 23.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 74 tahun 2008, tentang Guru, pasal 3 ayat 4-7.

dapat tercapai mutu pembelajaran sesuai harapan, diperlukan guru yang menguasai kompetensi, salah satunya adalah kompetensi pedagogik, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian mutu pembelajaran dengan kompetensi pedagogik guru memiliki kaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Apabila kompetensi guru tinggi, maka asumsinya adalah secara otomatis mutu pembelajaran akan tinggi pula.

Berdasarkan uraian diatas, penulis meneliti pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap mutu pembelajaran PAI di lapangan. Penulis memilih MTs Negeri Pemalang sebagai madrasah yang diteliti dengan pertimbangan bahwa seluruh guru PAI di MTs Negeri Pemalang telah memiliki sertifikat sebagai seorang pendidik yang kompeten. Selain itu, MTs Negeri Pemalang merupakan salah satu lembaga pendidikan bercirikan Islam, dan sudah didirikan cukup lama, sehingga telah diterima serta diakui oleh masyarakat Pemalang pada umumnya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. MTs Negeri Pemalang dalam kurikulumnya memberikan porsi pendidikan Islam lebih banyak dibandingkan dengan sekolah/madrasah lainnya baik negeri maupun swasta, sehingga siswanya memperoleh pengetahuan agama secara lebih mendalam.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, MTs Negeri Pemalang mempunyai tanggung jawab untuk melahirkan dan menjadikan siswanya menjadi generasi penerus yang mempunyai kepribadian muslim, sebagaimana tujuan pendidikan Islam. Sehingga nilai-nilai luhur agama Islam yang diajarkan di MTs Negeri Pemalang bukan hanya menjadi ilmu pengetahuan saja, tetapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan diharapkan nantinya para siswa disamping mempunyai kecerdasan intelektual dan pemahaman agama yang baik, juga mempunyai akhlak yang terpuji. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai upaya dalam memaksimalkan kompetensi pedagogik guru PAI dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran PAI.

B. KERANGKA TEORITIK

Mutu merupakan baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).²¹ Istilah mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk baik berupa barang maupun jasa, baik yang dapat dipegang (*tangible*) maupun yang tidak dapat dipegang (*intangible*). Dalam konteks pembelajaran, mutu mengacu pada masukan (*input*), proses dan hasil (*output*) pembelajaran. Proses pembelajaran yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, efektif dan psikomotorik), metode, sarana prasarana, dukungan administrasi, serta penciptaan suasana belajar yang kondusif. Sedangkan mutu dalam konteks hasil pembelajaran mengacu pada prestasi yang dicapai, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.²²

Begitu juga mutu pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam, hanya saja ada sedikit tambahan yaitu bagaimana madrasah bisa menyeimbangkan antara input, proses dan output pembelajaran yang pada akhirnya mampu mencetak manusia muslim yang berkualitas. Dalam arti, peserta didik mampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup yang berperspektif Islam. Pemahaman manusia berkualitas dalam khasanah pemikiran Islam disebut insan kamil yang mempunyai sifat-sifat antara lain manusia yang selaras (jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi), manusia moralis (sebagai individu dan sosial), manusia *nazhar* dan *i'tibar* (kritis, berijtihad, dinamis, ilmiah dan berwawasan), serta menjadi manusia yang memakmurkan bumi.²³

Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran PAI, tidak akan terlepas dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni: (1) pendidik, (2) peserta didik, dan (3) kurikulum.²⁴ Pemenuhan faktor-faktor

²¹ Partanto dan Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 505.

²² Suharno, *Manajemen Pendidikan*, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Press, 2008), hlm. 45-54.

²³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 201.

²⁴ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 77.

tersebut sangat mempengaruhi bagaimana keadaan mutu pembelajaran di madrasah. Diantara faktor tersebut, terdapat faktor utama yang paling dominan, yakni Pendidik atau Guru. Hal ini dapat dimaklumi karena guru merupakan ujung tombak dari keberhasilan sebuah pendidikan, baik mulai dari proses sampai dengan hasil pendidikan. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu komponen utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran, dan keberhasilan belajar peserta didik.

Keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki guru dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Guru yang memiliki kompetensi sebagai pendidik akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembelajaran. Keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.²⁵ Usaha meningkatkan kualitas pembelajaran harus dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas adalah guru yang profesional dalam melaksanakan tugas pembelajaran, yang mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran.

Seorang guru yang berkualitas harus mampu menguasai kompetensi yang menjadi kriteria dari seorang guru yang ideal. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam bidang pendidikan, meliputi pemahaman terhadap siswa, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.²⁶

Kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki guru sebagai pendidik yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dari sini lah dapat disimpulkan

²⁵ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 35.

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 74 tahun 2008, tentang Guru, pasal 3 ayat 4-7.

bahwa peran guru yang berkompeten, atau guru yang menguasai kompetensi pedagogik, memiliki peran yang penting dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, termasuk dalam meningkatkan mutu pembelajaran setiap bidang studi yang ada di sekolah/madrasah, salah satunya adalah pada bidang studi Pendidikan Agama Islam. Dengan kata lain, hubungan yang erat antara peran guru dengan mutu pembelajaran PAI ini pada akhirnya akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal, dan dapat merealisasikan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan kerangka teori di atas, hipotesis penelitian ini adalah Kompetensi Pedagogik Guru PAI memberi pengaruh terhadap Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTsN Pemalang.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menggunakan data berupa angka, yang kemudian diolah menggunakan statistik. Antar variabel pada penelitian ini memiliki hubungan yang bersifat sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kausalitas.²⁷ Berikut desain penelitian yang digunakan.



Gambar 1.1
Desain Penelitian

Keterangan:

- X = Kompetensi Pedagogik Guru
Y = Mutu Pembelajaran PAI
→ = Mempengaruhi

Pada penelitian ini, sampel penelitiannya adalah seluruh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bertugas di MTs Negeri Pemalang sejumlah 14

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 59).

orang, yakni: AK, US, EF, AT, SN, HW, MH, SB, LH, SZ, NE, SH, HF, dan MS. Dalam rangka untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa angket yang ditujukan kepada guru PAI MTs Negeri Pemalang. Angket yang digunakan terdiri dari dua macam, yakni sebagai berikut:

1. Angket Kompetensi Pedagogik. Angket ini ditujukan kepada seluruh guru PAI yang bertugas di MTs Negeri Pemalang, untuk mengetahui keadaan kompetensi pedagogiknya.
2. Angket Mutu Pembelajaran PAI, yang ditujukan kepada guru PAI guna mengetahui keadaan mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang.

Dalam rangka menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode analisis regresi linear sederhana.²⁸ Penggunaan analisis regresi linear sederhana karena pada penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis asosiatif/hubungan, dan melakukan prediksi, bagaimana perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen dimanipulasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan uji regresi linear di atas, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang besar dari kompetensi pedagogik guru terhadap mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang. Dimana dalam menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran PAI, peran guru sangat dominan dan memberi kontribusi yang besar. Pengaruh kompetensi pedagogik guru PAI terhadap mutu pembelajaran PAI ditunjukkan dengan nilai uji F sebesar 35,083 dengan tingkat signifikansi 0,000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang berarti bahwa kompetensi pedagogik guru PAI secara signifikan mempengaruhi mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang.

Selain itu, dapat pula dipahami berdasarkan koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil uji regresi linear di atas. Diperoleh koefisien determinasi

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 215.

sebesar 0,745 yang artinya bahwa ketercapaian mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang dipengaruhi sebesar 74,5% oleh kompetensi pedagogik guru PAI. Angka 74,5% tersebut menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru PAI di MTs Negeri Pemalang sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan Madrasah dalam mencapai mutu pembelajaran PAI yang diharapkan.

Diketahui pula bahwa sumbangan efektif yang diberikan oleh kompetensi pedagogik guru PAI terhadap ketercapaian mutu pembelajaran PAI yang baik adalah sebesar 0,745 atau kurang lebih sekitar 74,5%. Dengan kata lain, keberhasilan mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang dipengaruhi sebesar 74,5% oleh kompetensi pedagogik dari masing-masing guru PAI yang bertugas di MTs Negeri Pemalang. Sehingga hanya tersisa 25,5% yang dipengaruhi oleh faktor atau aspek-aspek lain. Presentase yang cukup besar ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru memang benar-benar mempengaruhi ketercapaian mutu pembelajaran PAI yang baik, khususnya di lingkungan MTs Negeri Pemalang.

Hal di atas menunjukkan bahwa keadaan dua aspek penting dalam pembelajaran tersebut, sudah masuk dalam kategori yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para ahli/pakar pendidikan. Namun, perlu diketahui bahwa dibalik keberhasilan kedua aspek tersebut tidak lepas dari adanya hubungan yang erat antara kompetensi guru dengan mutu pembelajaran dalam suatu institusi pendidikan,²⁹ termasuk di MTs Negeri Pemalang. Mutu merupakan baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).³⁰ Di dalam konteks pembelajaran, mutu mengacu pada masukan (*input*), proses dan hasil (*output*) pembelajaran. Begitu juga mutu pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam, hanya saja ada sedikit tambahan yaitu bagaimana madrasah bisa menyeimbangkan antara input,

²⁹ Ijang Kurnia, Hubungan Supervisi Pembelajaran Dan Motivasi Mengikuti Mgmp Dengan Peningkatan Kompetensi Guru. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 10(1), 2013.

³⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 505.

proses dan output pembelajaran yang pada akhirnya mampu mencetak manusia muslim berkualitas, yang dalam khasanah pemikiran Islam disebut sebagai insan kamil.³¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi baik buruknya mutu pembelajaran PAI di madrasah, diantaranya adalah: (1) pendidik, (2) peserta didik, dan (3) kurikulum.³² Diantara faktor tersebut, faktor utama yang paling dominan, adalah Pendidik atau Guru. Hal ini dapat dimaklumi karena guru merupakan ujung tombak dari keberhasilan sebuah pendidikan, baik mulai dari proses sampai dengan hasil pendidikan. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu komponen utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran, dan keberhasilan belajar peserta didik.

Di sinilah letak hubungan yang erat antara kompetensi guru dengan mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang. Dimana dalam menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran PAI, peran guru sangat dominan dan memberi kontribusi yang besar. Asumsi ini didasarkan pada temuan hasil penelitian mengenai mutu input, proses dan output di lapangan, yang mana dalam temuan-temuan tersebut selalu melibatkan peran penting dari pendidik atau guru PAI di MTs Negeri Pemalang yang telah menguasai dengan baik kompetensi pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional.

Deskripsi mutu input pembelajaran MTs Negeri Pemalang meliputi masukan dari tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, dan dukungan lainnya. Sangat sulit tercipta pembelajaran yang baik apabila mutu input pendidik atau guru MTs Negeri Pemalang tidak memiliki kompetensi yang memadai. Penguasaan kompetensi guru yang dimiliki berimbas pada pemanfaatan, penggunaan, serta pengembangan mutu input lainnya.

Penguasaan kompetensi pedagogik yang baik, menjadikan para guru PAI MTs Negeri Pemalang memiliki kemampuan dalam mengembangkan

³¹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 201.

³² Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 77.

kurikulum yang telah ditetapkan di MTs Negeri Pemalang. Hal ini ditunjukkan dari adanya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang selalu disiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Di dalam RPP tersebut juga dicantumkan bagaimana strategi dan metode, serta apa saja media yang digunakan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa melalui penguasaan kompetensi pedagogik, menjadikan para guru PAI MTs Negeri Pemalang dapat mengembangkan kurikulum, memahami bagaimana karakteristik serta apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, dan mampu memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia di MTs Negeri Pemalang.

Adapun penguasaan kompetensi lainnya, yakni pribadi dan sosial, memiliki peranan bagi para guru PAI dalam mengenal para peserta didik, para pendidik bidang studi lain, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembelajaran di MTs Negeri Pemalang. Kemampuan ini menciptakan hubungan yang kompak dan harmonis antar sesama guru, pimpinan, peserta didik, dan lain sebagainya. Sedangkan penguasaan kompetensi profesional dari para guru PAI MTs Negeri Pemalang berhubungan erat dengan kesiapan dan penguasaan materi pembelajaran yang akan diajarkan selama pembelajaran dilaksanakan. Selain itu, kemampuan ini juga menjadikan mereka memiliki keahlian dalam mengintegrasikan materi ajar dengan disiplin ilmu lain, seperti ilmu tentang seni, budaya, teknologi, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, mutu proses pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang pun dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan dalam mutu proses pembelajaran PAI ini juga tidak terlepas dari peran penting pendidik atau guru PAI yang telah menguasai kompetensi pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional. Kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, penguasaan teori-teori tentang pembelajaran, memahami pribadi diri sendiri, komunikasi dengan peserta didik dan sesama pendidik, penguasaan tentang materi ajar, serta keahlian dalam mengintegrasikan antar disiplin ilmu, dapat memperlancar pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga mutu proses pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang pun tetap dalam kondisi baik.

Adanya mutu input dan proses pembelajaran PAI yang baik, menyebabkan target atau mutu output pembelajaran yang telah dirumuskan oleh *stakeholder* MTs Negeri Pemalang tercapai sesuai harapan. Dimana mutu output pembelajaran PAI MTs Negeri Pemalang yang dimaksud, berupa prestasi yang dicapai oleh para peserta didik MTs Negeri Pemalang, baik prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Diketahui bahwa berdasarkan deskripsi dan hasil analisis di atas mengenai mutu output pembelajaran PAI, para peserta didik MTs Negeri Pemalang mampu mencapai KKM yang telah ditentukan madrasah dan mereka juga berhasil meraih prestasi dalam bidang non-akademik yang membanggakan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi.

Demikianlah pembahasan mengenai pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang. Dimana 2 hal tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Adanya pengelolaan mutu pembelajaran PAI yang baik memudahkan para guru PAI dalam memaksimalkan kompetensi yang dikuasainya, meliputi kompetensi pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional. Sebaliknya, penguasaan kompetensi guru yang baik mengakibatkan ketercapaian mutu pembelajaran PAI sesuai dengan harapan, baik itu mutu input, proses maupun output pembelajaran.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji regresi linear di atas, kesimpulan yang dipahami dari penjelasan mengenai kompetensi guru PAI MTs Negeri Pemalang, mutu pembelajaran PAI MTs Negeri Pemalang, dan pengaruh diantara keduanya adalah sebagai berikut.

1. Kompetensi Pedagogik Guru PAI di MTs Negeri Pemalang termasuk dalam kategori yang tinggi, yang ditunjukkan dengan adanya 11 dari 14 guru PAI yang diteliti, masuk dalam kategori guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang tinggi, yakni berkisar antara 109 s/d 144.

2. Berdasarkan hasil uji menggunakan angket mutu pembelajaran PAI, disimpulkan bahwa Mutu Pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang termasuk dalam kategori tinggi yang dijelaskan dengan adanya seluruh subjek penelitian masuk dalam kategori mutu pembelajaran PAI yang tinggi, yakni berkisar antara 139 s/d 184.
3. Kompetensi pedagogik guru PAI memiliki pengaruh yang besar terhadap mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai uji F sebesar 35,083 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian, penguasaan kompetensi guru yang baik mempengaruhi ketercapaian mutu pembelajaran PAI sesuai dengan harapan, baik itu mutu input, proses maupun output pembelajaran. Pengaruh yang besar tersebut juga ditunjukkan dengan adanya sumbangan efektif dari kompetensi pedagogik guru PAI terhadap ketercapaian yang baik pada mutu pembelajaran PAI. Sumbangan tersebut adalah sebesar 74,5%. Dengan kata lain, penguasaan yang baik oleh guru PAI di MTs Negeri Pemalang dalam hal kompetensi pedagogik turut andil sebesar 74,5% terhadap pencapaian mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Pemalang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro, Jerome S. (2007). *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, terj. Yosol Iriantara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif, Muh. Amin. (2012). "Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) se Kabupaten Wajo", *Tesis*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Arifin. (2011). *Kompetensi Guru dan Strategi Pengembangannya*, Jakarta: Lilin Persada Press.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Darajat, Zakiah. (1995). *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Depag RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota.

- Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. (2005). *Wawasan; Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: DEPAG.
- Fauzy, A. Machfudz. (2003). Menegaskan Profil Mengembangkan Kurikulum. *Jurnal Dakwah Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga*, 4(6).
- Hamalik, Oemar. (2002). *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanafiah, Nanang dan Cucu Suhana. (2009). *Konsep Strategi Pembelajaran*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Haryono, Deddy. (2012). "Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kinerja Guru terhadap Mutu Pembelajaran di Sekolah", *Thesis*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional; Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurnia, Ijang. (2013). Hubungan Supervisi Pembelajaran Dan Motivasi Mengikuti Mgmp Dengan Peningkatan Kompetensi Guru. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 10(1).
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional; dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK*, Bandung: Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, Miftakhul. (2012). "Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan agama islam di SMA Negeri 3 Malang", *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Munir, Misbahul. (2006). *Supervisi Pendidikan Suplemen I dan II*, Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: PT Arkola.

- Pattah, Nanang. (1996). *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru.
- Piet, Sahertian, A. (2000). *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan, Dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwanto, Ngalm. (2004). *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ramayulis. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Rohman, Mujibur. (2013). "Model Manajemen Peningkatan Mutu Terpadu Pendidikan Islam (Studi Kasus di MTs Negeri Model Brebes)", *Tesis*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Sagala, Saiful. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Samana. (1994). *Profesionalisme Keguruan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Slameto. (1994). *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudjana, Nana. (2005). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sudjono, Anas. (1987). *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syah, Muhibbin. (2004). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Tauhid, Abu. (1990). *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Sekretariat Ketua Jurusan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantara Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo.

- Tim Penulis Kurikulum. (2014). *Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Negeri Pemalang*, Pemalang: MTs Negeri Pemalang.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).
- Uno, Hamzah B., Fatna Yusnianti (ed.). (2006). *Model Pembelajaran menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*, Cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo. (tt). *Selayang Pandang MTs Negeri Pemalang*, Pemalang: MTs Negeri Pemalang.
- Wijaya, Cece, dan Tabrani Rusyan. (1994). *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wulandari, Supto Rini. (2010). "Kontribusi Kompetensi Pedagogik dan Profesional terhadap Proses dan Hasil Pembelajaran Matematika", *Tesis*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

PERAN STRATEGIS GURU DALAM MEA

Puji Dwi Darmoko¹

pujидwidarmoko@stipemalang.ac.id

Abstrak

Dengan dimulainya MEA maka setiap negara anggota ASEAN harus meleburkan batas teritori dalam sebuah pasar bebas, karena MEA akan menyatukan pasar setiap negara dalam kawasan menjadi pasar tunggal. Pembentukan MEA itu sendiri dilandaskan pada empat pilar yaitu kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, pertumbuhan ekonomi yang merata, integrasi ke perekonomian global dan pilar terakhir adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi melalui barang dan jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil. Untuk menyiapkan tenaga terampil yang berdaya saing, maka Indonesia harus bekerja keras meningkatkan SDMnya, baik secara formal maupun informal. Diharapkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia minimal mampu memenuhi ketentuan dalam *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* sebagai upaya untuk mendukung arus bebas tenaga kerja, memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa. Disinilah kompetensi profesi guru dipertaruhkan, karena ditangan guru terletak nasib suatu generasi, terutama dalam menghadapi MEA.

Kata kunci: kompetensi profesi guru, MEA.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi Asean merupakan sebuah integrasi kawasan di wilayah Asia Tenggara dalam bidang perekonomian. Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) telah diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015, di mana kawasan asean akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Indonesia beserta 9 negara anggota ASEAN seperti

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pematang

Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, Vietnam, Brunei Darusalam, dan Kamboja telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN atau dalam bahasa Inggris yaitu *ASEAN Economic Community (AEC)*.

Dengan dimulainya MEA maka setiap negara anggota ASEAN harus meleburkan batas teritori dalam sebuah pasar bebas. MEA akan menyatukan pasar setiap negara dalam kawasan menjadi pasar tunggal.

Masyarakat ekonomi ASEAN akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal, membuat sebuah kawasan menjadi lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang terdapat inisiatif ekonomi, mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan berbakat, dan memperkuat kelembagaan mekanisme sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pembentukan MEA itu sendiri dilandaskan pada empat pilar yaitu kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, pertumbuhan ekonomi yang merata, integrasi ke perekonomian global dan pilar terakhir adalah menjadikan Asean sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi melalui barang dan jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil (Bappenas 2009).

Berkaitan dengan penyiapan tenaga terampil yang berdaya saing, maka Indonesia harus bekerja keras meningkatkan SDMnya, baik secara formal maupun informal. Diharapkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia minimal mampu memenuhi ketentuan dalam *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* sebagai upaya untuk mendukung arus bebas tenaga kerja, memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa.

Mutual Recognition Arrangement (MRA) sendiri dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui oleh seluruh negara ASEAN yang saling mengakui dan menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat dengan tujuan menciptakan prosedur mekanisme akreditasi sehingga mendapat suatu kesetaraan dan mengakui adanya perbedaan antar

negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para profesional yang ingin berpraktek.

Menjadi suatu keharusan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya agar bisa digunakan baik di dalam negeri maupun di negara di kawasan MEA. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena memerlukan adanya cetak biru sistem pendidikan secara menyeluruh dan sertifikasi berbagai profesi terkait.

Salah satu langkah strategis dan mendesak untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang berdaya saing adalah melakukan pembenahan bidang pendidikan, tidak saja pembenahan sarana prasarana melainkan terutama pembenahan kualitas tenaga pendidiknya. Menjadi suatu keharusan meningkatkan kualitas tenaga pendidik jika menginginkan output didikan yang berkualitas. Guru sebagai komponen vital dalam pendidikan perlu terus ditingkatkan kualitas / kompetensi profesionalnya dalam upaya memenuhi tantangan MEA saat ini.

B. PEMBAHASAN

Perwujudan manusia berkualitas, tidak sebatas pada tenaga terampil sebagaimana kompetensi yang dipersyaratkan dalam MEA. Membentuk sosok yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, sadar hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, etos kerja tinggi dan berdisiplin adalah lebih utama yang menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan subjek yang mampu berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional sesuai bidang masing-masing untuk mengantisipasi era kesejagatan seperti MEA yang sudah dimulai tahun 2016.

Salah satu permasalahan fundamental yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan berkaitan dengan era MEA adalah bagaimana sekolah mampu menciptakan manusia tangguh yang berwawasan luas. Dalam hal ini sebagai salah satu komponen persekolahan peran guru menjadi sangat

penting, karena guru adalah salah satu tumpuan bagi negara dalam hal pendidikan.

Guru yang profesional dan berkualitas akan mampu mencetak anak bangsa yang berkualitas. Di tangan gurulah nasib suatu generasi bangsa dipertaruhkan. Kunci yang harus dimiliki oleh setiap guru adalah kompetensi, yang diartikan sebagai seperangkat ilmu serta ketrampilan mengajar di dalam menjalankan tugas profesionalnya sehingga tujuan dari pendidikan bisa dicapai dengan baik.

1. Kompetensi Guru

Guru adalah jabatan akademik yang memiliki tugas sebagai pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian masyarakat.² Menurut Rusyan guru sebagai tenaga kependidikan yang profesional berbeda dengan profesi lain, karena sebagai profesi dibutuhkan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.³

Sementara Undang-undang tentang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Meski kini era teknologi informasi, namun tetap saja ia tidak mampu menggantikan peran dan fungsi guru, hanya sedikit menggeser atau mengubah fungsinya. Guru tetap saja memegang peran penting dalam mewujudkan kebaikan di masyarakat, bangsa dan negara. Guru berperan strategis dalam menghasilkan tenaga terampil sebagaimana yang diharapkan dalam persaingan MEA.

² Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, bab XI pasal 39 ayat 2.

³ A. Tabrani Rusyan. *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. (Bandung: Yayasan Karya, 1990), hlm. 5.

Sebagai sosok yang memegang peran penting dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, guru harus memiliki kompetensi keprofesionalannya. Moqvist sebagaimana dikutip Mahmud dan Ija Suntana mengemukakan bahwa:

“competency has been defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work”.⁴

Sementara Len Holmes menyebutkan:

“A competence is a description of something which a person who works in a given occupational area should be able to do. It is a description of an action, behavior or outcome which a person should be able to demonstrate”.⁵

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang yang seharusnya dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan. Di mana untuk melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki kemampuan (*ability*) dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) sesuai bidangnya.

Dalam perspektif sosiologi-antropologi, ada tiga kemampuan penting yang harus dimiliki oleh guru profesional yaitu:

- a. Kompetensi professional, yang menuntut guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang studi yang diajarkan, dan penguasaan metodologis dalam artian memiliki pengetahuan konsep teoritis, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.
- b. Kompetensi personal, yang menuntut guru untuk memiliki sikap kepribadian yang mantap dan terpuji, sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantoro yaitu *Ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*”.

⁴ Mahmud dan Suntana. *Antropologi Pendidikan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 159

⁵ Mahmud dan Suntana. *Antropologi Pendidikan*. hlm. 159

- c. Kompetensi sosial, yang mengandung arti bahwa guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi social, baik dengan siswa, sesama guru, kepala sekolah, karyawan, maupun masyarakat.

Sementara dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah merumuskan empat kompetensi profesi guru sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 14 Tahun 2005, yaitu;

- a. Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum/silabus; perencanaan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; evaluasi hasil belajar; pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.
- b. Kompetensi kepribadian, mencakup kemampuan kepribadian yang mantap; stabil; dewasa; arif dan bijaksana; berwibawa; berakhlak mulia; teladan bagi peserta didik dan masyarakat; mengevaluasi kinerja sendiri; dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.
- c. Kompetensi sosial, merupakan kompetensi guru sebagai bagian dari masyarakat untuk: berkomunikasi lisan dan tulisan yang baik; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan bergaul santun dengan masyarakat.
- d. Kompetensi profesional, mencakup kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam meliputi; konsep, struktur, dan metode keilmuan / teknologi / seni yang menaungi / koheren dengan materi ajar; materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan keseharian; kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai budaya nasional.

Sebagai pembanding *National Board for Professional Teaching Skill* sebagaimana dikutip oleh Mahmud dan Ija Suntana telah merumuskan standar kompetensi bagi guru di Amerika sebagai dasar bagi guru mendapatkan sertifikasi, dengan rumusan;⁶ “*What teachers should know and be able to do*”, yang terdiri atas lima propoisi utama sebagai berikut;

- a. *Teachers are committed to students and their learning*, yang mencakup penghargaan guru terhadap perbedaan individual siswa; pemahaman guru tentang perkembangan belajar siswa; perlakuan guru terhadap seluruh siswa secara adil; misi guru dalam memperluas cakrawala berpikir siswa.
- b. *Teachers know the subjects they teach and how to teach those subjects too students*, mencakup; apresiasi guru tentang pemahaman materi mata pelajaran untuk dikreasikan, disusun, dan dihubungkan dengan mata pelajaran lain; kemampuan guru menyampaikan materi pelajaran; mengembangkan usaha untuk memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara (*multiple plain*).
- c. *Teachers are responsible for managing and monitoring student learning*, mencakup; penggunaan berbagai metode dalam pencapaian tujuan pembelajaran; menyusun proses pembelajaran dalam berbagai setting kelompok (*group setting*), kemampuan memberikan ganjaran (*reward*); menilai kemajuan siswa secara teratur; kesadaran akan tujuan utama pembelajaran.
- d. *Teachers think systematically about their practice and learn from experience*, mencakup; guru secara terus-menerus menguji diri untuk memilih keputusan-keputusan terbaik; guru meminta saran dari pihak lain dan melakukan berbagai riset tentang pendidikan untuk meningkatkan praktik pembelajaran
- e. *Teachers are members of learning communities*, mencakup guru memberikan kontribusi terhadap efektivitas sekolah melalui

⁶ Mahmud dan Suntana. *Antropologi Pendidikan*. hlm. 162

kolaborasi dengan kalangan profesional lainnya; guru bekerja sama dengan orangtua siswa; guru dapat menarik keuntungan dari berbagai sumber daya masyarakat.

2. Peran Strategis Guru dalam MEA

Dengan dimulainya MEA maka setiap negara anggota ASEAN harus meleburkan batas teritori dalam sebuah pasar bebas. MEA akan menyatukan pasar setiap negara dalam kawasan menjadi pasar tunggal. Sebagai pasar tunggal, arus barang dan jasa yang bebas merupakan sebuah kemestian. Selain itu negara dalam kawasan juga diharuskan membebaskan arus investasi, modal dan tenaga terampil.

Namun, arah regulasi seharusnya bukan hanya terkonsentrasi pada sektor perekonomian saja karena dengan terintegrasinya perekonomian dan pemberlakuan pasar tunggal di kawasan regional ASEAN akan membuat batas antar negara memudar, sehingga dibutuhkan kesiapan dari seluruh sektor kehidupan negara.⁷

Salah satu tantangan dalam MEA adalah sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia kerja serta sumber daya manusia yang memiliki karakter serta bertanggung jawab sehingga sumber daya Indonesia dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain, bukan justru semakin terpuruk dengan membanjirnya tenaga kerja dari negara lain.

Sebagaimana dilansir Media Indonesia, Kamis 27 Maret 2014, dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan. Di mana sda 8 (delapan) profesi bidang ketenagakerjaan yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu

⁷ Masnur Tiurmaida Malau. 2014. *Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberasisasi Ekonomi Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN*. (Jurnal Rechtsvindin, Vol. 3 Nomor 2, Agustus 2014), hlm. 12.

insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan Hal inilah yang akan menjadi ujian baru bagi masalah dunia ketenagakerjaan di Indonesia karena setiap negara pasti telah bersiap diri di bidang ketenagakerjaannya dalam menghadapi MEA.

Maka bagi Inonesia dalam rangka ketahanan nasional dengan tetap melihat peluang dan menghadapi tantangan bangsa Indonesia di era MEA nantinya, khususnya terhadap kesiapan tenaga kerja Indonesia sangat diperlukan langkah-langkah konkrit bidang pendidikan agar bisa bersaing menghadapi tenaga kerja asing tersebut.

Hal ini dapat dimengerti karena sektor pendidikan merupakan tulang punggung untuk dapat menjadi penghasil SDM yang berdaya saing. Dan sudah barang tentu akan menuntut juga kualitas tenaga pendidik di dalamnya, agar bisa mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di era MEA.

Rektor Universitas Sebelas Maret (Solo) Ravik Karsidi misalnya menyebutkan bahwa salah satu persiapan UNS menghadapi MEA adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan *hard skill* dan *soft skill*. Dari segi *hard skill*, UNS mempersiapkan kurikulum agar mahasiswanya mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri. Sementara itu, dari segi *soft skill*, UNS membekali mahasiswanya dengan persiapan spiritual dan mental melalui pelatihan spiritual quotient (SQ). Program ini ditindaklanjuti dengan pelatihan *soft skill* di tingkat fakultas. Di antara pelatihan itu adalah tentang kepemimpinan, komunikasi dan kemampuan Bahasa.

Dalam konstelasi MEA saat ini dunia pendidikan Indonesia memiliki tugas berat untuk melahirkan tenaga-tenaga terampil terdidik (*skilled labour*), memiliki karakter, dan daya juang serta kerja keras. Di mana dalam kurikulum 2013 dunia pendidikan diamanahi untuk melahirkan generasi bangsa yang beradab, produktif, kreatif, inovatif dan efektif, sehingga kita bisa menjadi bangsa kolaboratif-kompetitif.

Sulipan sebagaimana dikutip oleh Ratna Rosita Pangestika & Fitri Alfarisa mengemukakan bahwa salah satu kunci penting dalam membangun kualitas pendidikan adalah guru. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila akhir-akhir ini pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru semakin meningkat, yang diawali dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang segera diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif.⁸

Fasli Jalal mengatakan bahwa pendidikan yang bermutu sangat bergantung pada keberadaan pendidik yang bermutu yakni pendidik yang profesional, sejahtera dan bermantabat. Oleh karena itu keberadaan pendidik yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.⁹

Karena dalam pembangunan pendidikan, kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan program sangat strategis. Seiring dengan program peningkatan kualitas guru yang dilakukan secara berkelanjutan antara lain melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan dan penilaian kinerja guru.

⁸ Ratna Rosita Pangestika & Fitri Alfarisa., *Pendidikan Profesi Guru (Ppg): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia.*, Prosiding Seminar Nasional Mei 2015. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

⁹ Fasli Jalal. Artikel: *Sertifikasi Guru untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu.* (Universitas Negeri Medan, 2007), hlm. 1

Setidaknya sudah ada beberapa strategi yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas guru yang tentu berimplikasi pada kualitas peserta didik, yaitu antara lain: 1) Pendidikan dan Pelatihan, 2) Forum Diskusi masalah Pendidikan, 3) Seminar dan workshop, 4) Penelitian, 5) Penulisan buku bahan ajar, 6) Pembuatan media pembelajaran, 7) Pembuatan karya inovasi/seni

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa guru sebagai profesional mempunyai empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Tentu hukan tanpa alasan mengapa kompetensi pedagogis ditempatkan sebagai kompetensi pertama dan utama di antara kompetensi lainnya. Hal dapat dilihat dalam penjabarannya bahwa kompetensi tersebut merupakan kapabilitas guru untuk dapat *manage* pembelajaran siswa yang melingkupi pemahaman terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa melalui potensi yang dimilikinya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dapat menciptakan atmosfer positif sehingga bisa lebih memaksimalkan perannya untuk menghasilkan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan bermakna. Atau dengan kata lain pembelajaran yang menyenangkan (*joyful teaching and learning*). Pembelajaran seperti inilah yang dilihat Mendikbud Anies Baswedan sebagai kiat yang mendasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dapat diasumsikan bahwa jika siswa memperoleh pengalaman dari pembelajaran yang menyenangkan, dipastikan mereka akan menjadi agen pembelajar sejati yang tangguh dan berdaya saing dalam kompetisi global, tidak hanya di kawasan ASEAN.

Menurut Dave Meier dalam Hernowo, lima peran guru untuk membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan antara lain: membangkitkan minat belajar siswa, melibatkan siswa secara penuh dalam pembelajaran sehingga terjadi hubungan timbal balik dan komunikasi dua arah, menciptakan makna pembelajaran bagi siswa,

menguasai materi atau bahan ajar, dan memberi nilai yang membahagiakan sehingga membuat siswa nyaman.¹⁰

Penggunaan metode yang sesuai oleh guru tentu akan sangat membantu siswa dalam memahami materi. Disinilah kompetensi guru diuji. Seberapa tahu guru, seberapa terampil guru, dan seberapa luas penguasaan guru terhadap metode pengajaran dalam melibatkan dirinya akan berpengaruh pada proses pembelajaran yang memperlihatkan kompetensinya. Beberapa tolak ukur itulah yang bisa menjadi penjabaran dari arti kompetensi menurut Undang Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10.

Karena itulah dalam Undang-Undang tersebut pada Bab IV tentang Guru pada Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 14 ayat (1) poin d, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi guru, terutama kompetensi pedagogis, dengan tujuan menghasilkan guru yang berkualitas dan kompetitif. Jika kedua hal tersebut telah dimiliki guru, secara otomatis guru akan mentransfernya kepada siswa sehingga terjadilah proses pembelajaran yang bersinergi, sehingga dapat diidharapkan ke depan akan terjadi peningkatan mutu, relevansi, serta kompetensi dalam daya pikir dan daya saing yang bisa dilakukan oleh guru. Itulah bentuk nyata peran guru untuk bisa mensukseskan MEA yaitu dengan menjadi fasilitator bagi siswa agar sukses *learning to know*, *learning to do*, *learning to become*, dan *learning to be together* sebagai pondasi pendidikan yang berprinsip. Sehingga bisa disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi guru bisa menjadi jawaban dalam persoalan tantangan di era MEA.

¹⁰ Hernowo. *Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar Secara Menyenangkan*. Cetakan ke-2. (Bandung: Mizan Learning Center, 2005), hlm. 21.

C. PENUTUP

Harus diakui bahwa kompetensi profesi guru memegang peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan unggul. Menghadapi MEA, peran guru dalam pendidikan sangat membantu kemajuan perkembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, dalam rangka mencapai kesuksesan di era pasar bebas ASEAN. Di tangan gurulah terletak nasib suatu generasi bangsa. Oleh karena itu, untuk memajukan pendidikan di Indonesia tidak hanya dengan merubah kurikulum dan melengkapi sarana dan prasarana saja, melainkan juga memperhatikan pembangunan SDM yang akan mengemban pendidikan tersebut, yaitu melalui peningkatan kompetensi profesi guru. Dengan demikian Indonesia dapat diyakini mampu dan siap menghadapi segala sesuatu yang timbul dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2009). *Persiapan daerah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*.
- Fasli. (2007). Artikel: *Sertifikasi Guru untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu*. Universitas Negeri Medan.
- Hernowo. (2005). *Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar Secara Menyenangkan*. Cetakan ke-2. Bandung: Mizan Learning Center
- Karsidi, Ravik. (2011). *Sosiologi Pendidikan*. Surakarta: LPP dan UNS Press. Jalal
- Mahmud dan Ija Suntana. (2012). *Antropologi Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Malau, Masnur Tiurmaida. (2014). *Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberasisasi Ekonomi Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 Nomor 2, Agustus 2014.
- Meier, Dave. (2005). *The Accelerated Learning*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

- Ratna Rosita Pangestika & Fitri Alfarisa. (2015). *Pendidikan Profesi Guru (Ppg): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia.*, Prosiding Seminar Nasional: Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rusyan, A. Tabrani. (1990). *Profesionalisme Tenaga Kependidikan.* Bandung: Yayasan Karya.
- Suryaningsih, Arifah. (2016). *Guru Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015* <https://www.researchgate.net/publication/281570225>, diunduh, Minggu 19 Juni 2016, pkl. 21.53 WIB
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) PEMALANG

PROGRAM STUDI :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pendidikan Agama Islam (PAI) | S1 |
| 2. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | S1 |
| 3. Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) | S1 |
| 4. Pendidikan Bahasa Arab (PBA) | S1 |
| 5. Manajemen Pendidikan Islam (MPI) | S1 |



STIT Press

ISSN 2086-3462



9 7 7 2 0 8 6 3 4 6 2 6 6